



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

ISSN 3047-0994



# Kajian Fiskal Regional

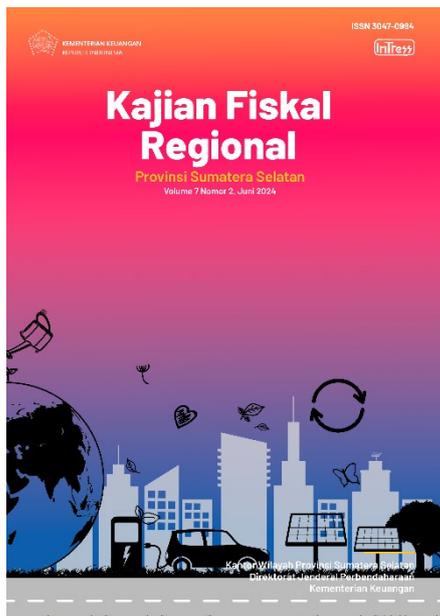
Provinsi Sumatera Selatan

Volume 7 Nomor 2, Juni 2024



Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Kementerian Keuangan

**Kajian Fiskal Regional**  
**Provinsi Sumatera Selatan**  
Volume 7 Nomor 2, Juni 2024



Kajian Fiskal Regional  
diterbitkan oleh Kanwil  
Direktorat Jenderal  
Perbendaharaan Provinsi  
Sumsel, Kementerian  
Keuangan, dengan periode  
publikasi triwulanan

**Diterbitkan oleh:**

Kanwil DJPb Provinsi Sumsel

**Pengarah:**

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumsel

**Penanggung Jawab:**

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

**Reviewer:**

Prof. Bernadette Robiani, M. Sc.

**Kontributor:**

**Analisis Ekonomi Regional:** Riedho Hizwar

**Analisis Fiskal Regional:** Yudho Bintoro Sandi, M. Telly Anggra

**Pengembangan Ekonomi Daerah:** Riedho Hizwar

**Analisis Tematik:** Yessi Marseilli

**Desain dan Layout:** Nur Rahma Kartika, Riedho Hizwar

**Alamat Redaksi:** Gedung Keuangan Negara Palembang Lantai II  
Jl. Kapten A. Rivai No. 2-4 Palembang

**Situs Web:** <https://djp.b.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/>

Download KFR



Feedback



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2024.

KFR berperan untuk memberikan gambaran perkembangan implementasi kebijakan fiskal Pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian regional Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Penyusunan KFR ini diharapkan dapat menjadi alat analisis, evaluasi dan menjadi media informasi yang bernilai strategis baik bagi Kementerian Keuangan maupun bagi para mitra kerja Kementerian Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi menyediakan data dan informasi dan telah berpartisipasi dalam penyelesaian KFR Provinsi Sumatera Selatan ini. Kami berharap koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan KFR Provinsi Sumatera Selatan dapat terus berlanjut secara berkala di masa mendatang, guna mendukung kesinambungan implementasi kebijakan fiskal di Sumatera Selatan. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak, selalu kami harapkan, agar dapat menjadi perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kualitas dari hasil kajian yang dilakukan.

Harapan kami, semoga KFR Provinsi Sumatera Selatan Periode Triwulan II Tahun 2024 ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pembuat dan pelaksanaan kebijakan di Sumatera Selatan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam upaya memberikan kontribusi pemikiran demi terwujudnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan

ttd

**Rahmadi Murwanto**

## DAFTAR ISI

Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan

Volume 7 Nomor 2, Juni 2024

TIM PENYUSUN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vi
DASHBOARD .....	viii
BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL .....	1
A. PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKROEKONOMI .....	2
B. PERKEMBANGAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN .....	5
BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL .....	7
A. PELAKSANAAN APBN DI PROVINSI SUMSEL .....	8
B. PELAKSANAAN APBD DI PROVINSI SUMSEL .....	20
C. PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN .....	24
BAB III PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH .....	25
A. HARMONISASI BELANJA K/L YANG MENDUKUNG DAK FISIK SUMSEL.....	26
BAB IV ANALISIS TEMATIK.....	33
A. PERUBAHAN IKLIM DAN UPAYA PEMERINTAH.....	34
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	40

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2024 disusun untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian daerah. Fokus utama KFR Triwulan II 2024 adalah mengevaluasi peran kebijakan fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ketahanan ekonomi daerah, serta mitigasi dampak perubahan iklim.

### Perekonomian Regional

Ekonomi Sumsel tumbuh sebesar 4,96% (yoy) pada Triwulan II 2024, sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,05%. Meskipun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, Sumsel mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.

Namun, perlambatan terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian, yang hanya tumbuh 0,90% (yoy), jauh lebih rendah dari pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang mencapai 4,14%. Faktor eksternal, seperti penurunan permintaan dari negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, menjadi penyebab utama melemahnya sektor ini.

### Kondisi Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan menunjukkan beberapa pencapaian yang signifikan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun menjadi 3,97%, turun dari 4,53% pada periode yang sama tahun sebelumnya, didukung oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan akomodasi makan minum.

Tingkat Kemiskinan Sumsel per Maret 2024 berada di angka 10,97%, turun dari 11,78% pada Maret 2023. Meskipun turun dari tingkat kemiskinan secara umum, terjadi peningkatan dalam kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2), yang menunjukkan adanya pelebaran ketimpangan di antara kelompok miskin.

Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan tren peningkatan, mencapai 122,40 pada Juni 2024, didorong oleh kenaikan harga komoditas perkebunan seperti karet, kopi, dan kakao. Sementara itu, laju inflasi di Sumsel terkendali di angka 2,48% (yoy), di bawah target inflasi nasional sebesar  $2,5\% \pm 1\%$ .

## Pelaksanaan APBN dan APBD

Pelaksanaan APBN di Sumsel pada Triwulan II 2024 mencatatkan realisasi pendapatan sebesar Rp9,16 triliun (41,40% dari target), tumbuh 9,13% (yoy). Penerimaan pajak menjadi kontributor utama, dengan pertumbuhan 7,23% (yoy), meskipun penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi sebesar -8,28% akibat normalisasi harga komoditas ekspor.

Di sisi pengeluaran, belanja negara di Sumsel mencapai Rp22,51 triliun (42,93% dari pagu), tumbuh 21,51% (yoy). Belanja pemerintah pusat didorong oleh pengeluaran terkait pemilu 2024, proyek strategis nasional (PSN) seperti jalan tol Betung-Tempino, dan kenaikan gaji ASN, yang turut mendorong konsumsi rumah tangga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Realisasi APBD di Sumsel juga mencatatkan pertumbuhan yang positif, meskipun masih didominasi oleh transfer dana pusat, yang menjadi tantangan utama bagi kemandirian fiskal daerah. Hanya Pemerintah Kota Palembang yang masuk dalam kategori "menuju kemandirian", sementara daerah lainnya masih sangat bergantung pada dana transfer.

## Pengembangan Ekonomi Daerah

Laporan ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam mengawal pelaksanaan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendukung Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Sumsel. Pada tahun 2024, alokasi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik di Sumsel mencapai Rp2,68 triliun (12,53% dari total pagu), namun realisasi DAK Fisik masih rendah, hanya mencapai 13,79% pada triwulan II. Hambatan teknis seperti keterlambatan regulasi dan anggaran yang diblokir menjadi salah satu kendala dalam percepatan penyerapan anggaran DAK Fisik.

## Analisis Tematik Perubahan Iklim

Pada analisis tematik, laporan ini membahas perubahan iklim sebagai tantangan yang signifikan bagi Sumsel. Peningkatan suhu udara dan bencana hidrometeorologis seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menjadi ancaman utama bagi sektor pertanian dan perkebunan, dua sektor andalan Sumsel.

Upaya pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi perubahan iklim telah dilaksanakan, namun terdapat inkonsistensi dalam penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging), sehingga sulit mengukur secara tepat alokasi anggaran untuk mitigasi dan adaptasi. Hal ini menjadi area yang perlu diperbaiki dalam kebijakan fiskal ke depan, terutama untuk mengendalikan karhutla yang masih berulang.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara keseluruhan, perekonomian dan fiskal Sumsel pada Triwulan II 2024 tetap menunjukkan kinerja yang baik, namun masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam kemandirian fiskal dan penanganan perubahan iklim. Beberapa rekomendasi yang diajukan antara lain:

1. Peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan asli daerah (PAD) dan penguatan peran sektor-sektor produktif.
2. Perbaikan kualitas penyerapan anggaran, terutama untuk DAK Fisik, dengan mempercepat regulasi dan mengatasi kendala teknis.
3. Penguatan mitigasi perubahan iklim dengan memperbaiki *climate budget tagging* dan memperkuat koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana karhutla.



---

# D A S H B O A R D

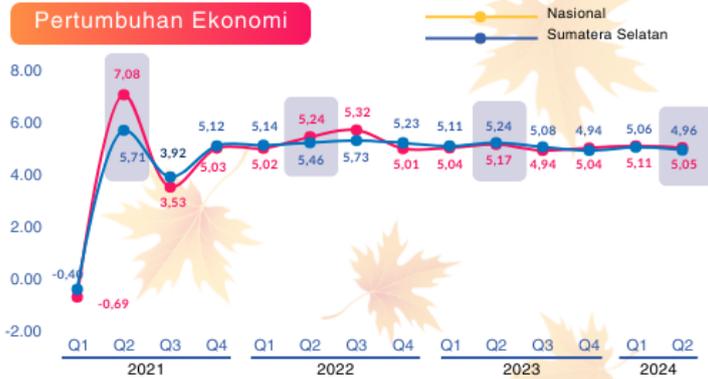
---



# Dashboard Ekonomi Regional

## Indikator Makro Ekonomi

### Pertumbuhan Ekonomi



Ekonomi Sumsel tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu;

Faktor utama yang mempengaruhi melambatkan ekonomi Sumsel adalah perlambatan yang terjadi pada sektor lapangan usaha pertambangan yang hanya tumbuh 0,90% (yoy) akibat turunnya produksi batubara sebesar -1,27% (yoy)

Sumber: BPS Provinsi Sumsel

### Inflasi

m - to - m **0,46%**  
y - on - y **2,48%**

Ekonomi Sumsel Laju Inflasi Sumsel pada periode triwulan II 2024 terkendali dan dalam tren yang menurun

### Perkembangan Harga Pangan Sumsel

y - to - d



Beras Medium  
**0,58%**



Bawang Putih  
**-5,37%**



Bawang Merah  
**-22,06%**



Cabai Merah  
**-20,72%**



Daging Ayam  
**-0,42%**



Telur Ayam  
**-1,82%**

Sumber: Badan Pangan Nasional

## Indikator Kesejahteraan

Selain kuat dan stabil, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan kualitas yang baik. Hal tersebut terlihat dari perkembangan indikator kesejahteraan Sumsel yang hingga triwulan II 2024 menunjukkan perkembangan yang terus membaik

### Kemiskinan



Tingkat Kemiskinan Sumsel per Maret 2024 sebesar:

**10,97%**



### Tingkat Pengangguran Terbuka



Tingkat Pengangguran Terbuka Sumsel s.d. Februari 2024 sebesar:

**3,97%**



### Gini Ratio



Tingkat Ketimpangan di Sumsel s.d. Maret 2024 sebesar:

**0,333**



### Nilai Tukar Petani



Nilai Tukar Petani di Sumsel per Juni 2024 sebesar:

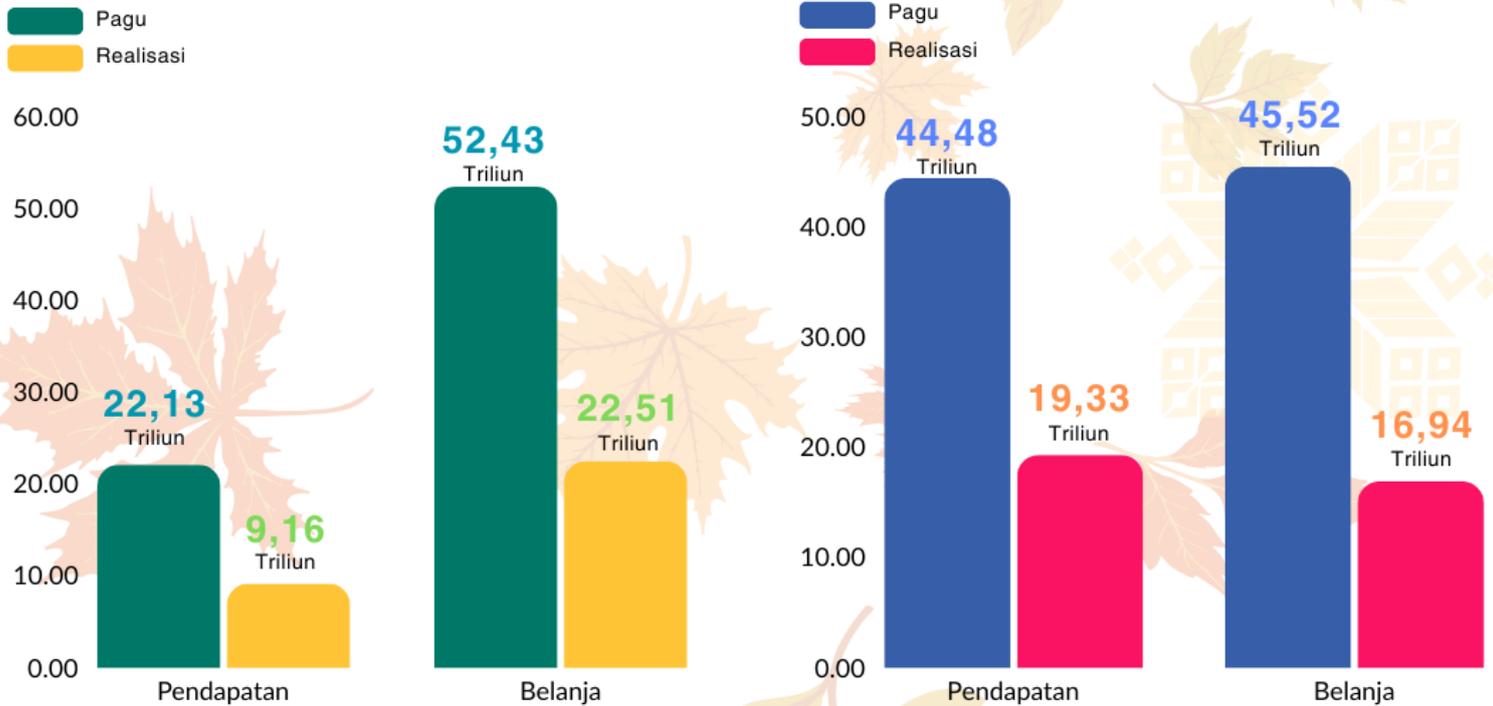
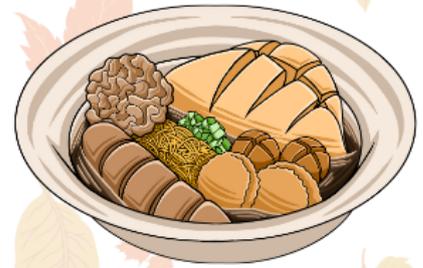
**122,40**



Sumber: BPS Provinsi Sumsel

# Kinerja Fiskal Regional

Triwulan 2 Tahun 2024

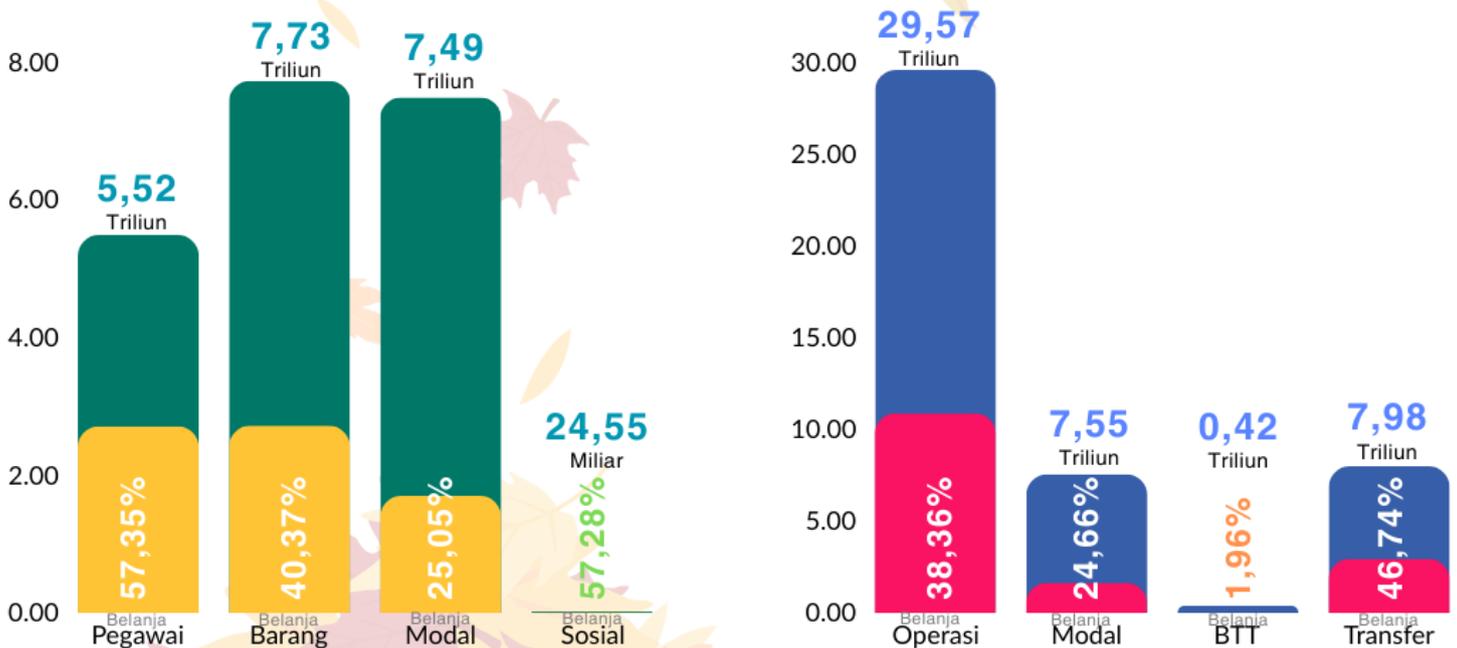


## APBN

Sumber: Online Monitoring SPAN

## APBD

Sumber: Dit. APK, DJPb



# BAB I: ANALISIS EKONOMI REGIONAL

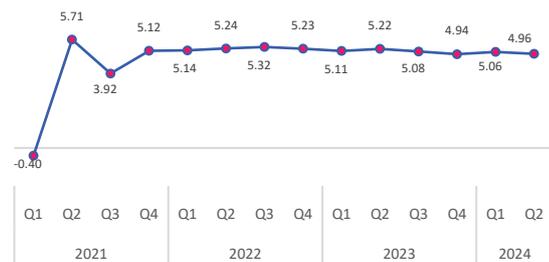


## A. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

### A.1. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Sumsel tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2024, ekonomi Sumsel mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,96% (yoy), lebih lambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,06% (yoy). Capaian tersebut berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05% (yoy). Namun di Pulau Sumatera, pertumbuhan ekonomi Sumsel pada triwulan II 2024 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Year on Year Sumsel (%)



sumber: BPS Sumsel, 2024

Perlambatan ekonomi Sumsel yang terjadi pada triwulan II 2024 utamanya dipengaruhi oleh melemahnya kinerja sektor lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang merupakan kontributor terbesar pada ekonomi Sumsel. Pada triwulan II 2024, Sektor Pertambangan dan Penggalian hanya tumbuh sebesar 0,90% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,14% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi pada komponen investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kinerja PMTB pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 4,05% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,85% (yoy). Selain itu, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah juga melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,32% (yoy) menjadi 12,41% (yoy) di triwulan II 2024.

Secara triwulanan, aktivitas perekonomian Sumsel pada triwulan II 2024 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2024, ekonomi Sumsel tumbuh sebesar 4,47% (qtq), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2024 yang hanya tumbuh sebesar 0,02% (qtq). Capaian tersebut juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 3,79% (qtq). Di Pulau Sumatera, laju pertumbuhan ekonomi Sumsel secara triwulan berada di urutan kelima tertinggi, setelah Provinsi Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Jambi.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Quarter to Quarter Sumsel (%)



sumber: BPS Sumsel, 2024

Lebih tingginya aktivitas perekonomian Sumsel pada triwulan II 2024 dibanding triwulan sebelumnya didorong oleh sektor Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami pertumbuhan signifikan akibat *low base effect* triwulan sebelumnya. Kinerja sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib triwulan II 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 22,78% (qtq), *rebound* dari yang sebelumnya tumbuh negatif -3,89 (qtq) di triwulan I 2024.

Sejalan dengan sektor lapangan usaha, perekonomian Sumsel dari sisi pengeluaran secara triwulanan juga didorong oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh tinggi dipengaruhi *low base effect* pada triwulan sebelumnya. Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2024 tercatat tumbuh tinggi sebesar 33,78% (qtq), *rebound* dari triwulan I 2024 yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -39,35% (qtq).

#### A.1.1. PDRB Menurut Pengeluaran

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor utama PDRB dan sekaligus sebagai sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi Sumsel. Pada triwulan II 2024, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 62,77% terhadap total PDRB Sumsel, dengan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 2,85% (yoy). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi sebesar 30,47% terhadap total PDRB Sumsel dengan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,22% (yoy). Konsumsi Pemerintah memberikan andil sebesar 0,75% (yoy) atas pertumbuhan ekonomi Sumsel. Selanjutnya ekspor-impor dan konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPR) bersama-sama memberikan andil sebesar 0,14% (yoy) terhadap pertumbuhan ekonomi Sumsel.

Konsumsi rumah tangga Sumsel pada triwulan II 2024 meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu. Aktivitas konsumsi rumah tangga Sumsel tercatat tumbuh sebesar 4,82% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,19% (yoy). Secara triwulanan, Sumsel tumbuh sebesar 3,45% (qtq), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 0,63% (qtq). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut dipengaruhi oleh adanya momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, Idul Adha dan libur sekolah yang mendorong permintaan konsumsi masyarakat. Selain itu, adanya kenaikan gaji ASN, gaji ke 13, dan pemberian tunjangan hari raya (THR) 100% juga menjadi faktor yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

Konsumsi Pemerintah menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Pada triwulan II 2024, konsumsi pemerintah di Sumsel tumbuh sebesar 12,41% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,32% (yoy). Berdasarkan triwulanan, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 37,78% (qtq), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar -39,35% (qtq). Pertumbuhan konsumsi pemerintah tersebut didorong oleh realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah yang tumbuh positif, baik untuk belanja pegawai, barang, dan sosial. Peningkatan belanja pegawai disebabkan oleh kenaikan gaji ASN, pembayaran gaji 13, gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan THR 100%.

Tabel 1.1. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran PDRB Sumsel

Komponen	Share (%)	QtQ (%)		YoY (%)	
		Tw. I	Tw. II	Tw. I	Tw. II
Konsumsi RT	62.77	0.63	3.45	4.19	4.82
Konsumsi LNPRT	1.68	11.50	2.87	20.41	18.24
Konsumsi Pemerintah	6.07	-39.35	37.78	13.32	12.41
PMTB	30.47	-2.67	0.19	4.82	4.05
Ekspor	15.76	-15.72	9.52	-18.72	-10.52
Impor	4.48	14.85	-18.71	183	92.03
PDRB	100	0.02	4.47	5.06	4.96

sumber: BPS Sumsel, 2024

**Kegiatan investasi atau PMTB wilayah Sumsel tumbuh positif dan mencatatkan peningkatan dibandingkan tahun lalu.** PMTB Sumsel pada triwulan II 2024 tercatat tumbuh sebesar 4,05% (yoy), lebih lambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,82% (yoy). Berdasarkan triwulanan, PMTB Sumsel tumbuh sebesar 0,19% (qtq), rebound dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -2,67% (qtq). Pertumbuhan PMTB tersebut didorong oleh peningkatan realisasi belanja modal pemerintah, khususnya pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) seperti jalan Tol Betung-Tempino, Bendungan Tiga Dihaji, dan Irigasi Lematang. Selanjutnya, berdasarkan jenis aliran modal yang dicatat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sampai dengan Triwulan II 2024, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) sama-sama tumbuh positif di triwulan II 2024, yaitu sebesar 59,96% dan 2,25%.

**Konsumsi LNPRT masih dalam tren pertumbuhan yang tinggi di tahun politik.** Pada triwulan II 2024, konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 18,24% (yoy), lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 20,41% (yoy). Namun berdasarkan triwulanan, konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 2,87% (qtq), turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,50% (qtq). Konsumsi LNPRT pada triwulan II 2024 masih tinggi disebabkan oleh adanya hari besar keagamaan dan kegiatan partai politik dalam rangka persiapan pemilihan kepala daerah.

Grafik 1.3. Neraca Perdagangan Sumsel (US\$ Juta)



sumber: BPS Sumsel, 2024

**Ekspor Sumsel menunjukkan perbaikan, meskipun masih mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.** Ekspor Sumsel pada triwulan II 2024 tumbuh negatif sebesar -10,52% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar -18,72% (yoy). Berdasarkan Triwulanan, ekspor Sumsel tumbuh positif sebesar 9,52% (qtq), lebih baik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -15,72% (qtq). Dibandingkan tahun lalu, nilai dan volume ekspor Sumsel pada triwulan II 2024 mengalami penurunan pada beberapa komoditas seperti

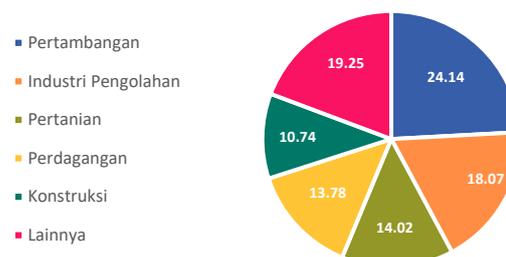
bahan bakar mineral, pulp, dan migas. Penurunan tersebut diantaranya dipengaruhi penurunan permintaan dari mitra dagang utama Sumsel seperti Tiongkok yang sedang mengalami pelemahan ekonomi.

**Impor Sumsel masih dalam tren pertumbuhan yang tinggi.** Pada triwulan II 2024, impor Sumsel tumbuh sebesar 92,03% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 183% (yoy). Berdasarkan triwulanan, impor Sumsel pada triwulan II 2024 mengalami kontraksi sebesar -18,71% (qtq). Kegiatan impor Sumsel pada tahun 2024 didorong oleh aktivitas investasi yang dilakukan PT. OKI Pulp & Paper Mills yang melakukan impor barang modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi.

### A.1.2. PDRB Menurut Lapangan Usaha

**Struktur PDRB Sumsel menurut Lapangan Usaha ditopang oleh 5 (lima) sektor utama, yaitu Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi.** Pada triwulan II 2024, kelima sektor tersebut tumbuh positif, baik tahunan maupun triwulanan. Sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor industri pengolahan dengan andil 0,90% (yoy), diikuti sektor perdagangan dengan andil 0,87% (yoy), konstruksi 0,36% (yoy), pertanian 0,54% (yoy), dan sektor Pertambangan dan Penggalian 0,21% (yoy).

Grafik 1.4. Struktur PDRB Lapangan Usaha Sumsel (%)



sumber: BPS Sumsel, 2024

**Sektor Pertambangan dan Penggalian melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.** Kinerja sektor Pertambangan dan Penggalian di triwulan II 2024 hanya tumbuh sebesar 0,90% (yoy), lebih lambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,14% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan oleh turunnya produksi batubara karena terjadinya pelemahan permintaan ekspor dari Tiongkok, yang merupakan salah satu mitra dagang utama komoditas batubara Sumsel. Namun, berdasarkan triwulanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh positif sebesar 8,01%(qtq).

Tabel 1.2. Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Sumsel

Komponen	Share (%)	QtQ (%)		YoY (%)	
		Tw. I	Tw. II	Tw. I	Tw. II
Pertanian, kehutanan, Perikanan	14,02	9,48	4,58	2,11	3,25
Pertambangan dan Penggalian	24,14	-5,62	8,01	4,14	0,9
Industri Pengolahan	18,07	0,66	1,48	4,65	5,03
Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	-2,87	6,91	8,07	8,89
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,10	-0,53	-0,88	2,52	1,85
Konstruksi	10,74	0,05	0,35	6,89	7,28
Perdagangan Besar dan Eceran	13,78	-0,04	2,97	6,81	7,69
Transportasi & Pergudangan	2,57	-3,08	5,75	2,72	3,74
Penyediaan Akomodasi Makan Minum	2,03	-4,32	7,93	9,65	9,57
Informasi & Komunikasi	3,01	2,43	3,34	6,12	9,88
Jasa Keuangan & Asuransi	2,14	3,6	-0,18	10,17	8,08
Real Estate	2,92	2,11	1,92	6,51	8,41
Jasa Perusahaan	0,11	-1,02	1,19	3,96	5,07
Adm. Pemerintahan, Pertahanan dst	2,79	-3,89	22,78	10,02	9,95
Jasa Pendidikan	2,13	-6,93	6,86	4,94	5,98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	-0,17	3,76	3,67	7,65
Jasa lainnya	0,70	-3,82	1,26	4,92	6,49
PDRB	100,00	0,02	4,47	5,06	4,96

sumber: BPS Sumsel, 2024

**Industri Pengolahan Sumsel tumbuh positif baik secara tahunan maupun triwulanan.** Industri Pengolahan Sumsel pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 5,03% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,65% (yoy). Berdasarkan periode triwulanan, sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 1,48% (qtq), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,66% (qtq). Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan Sumsel tersebut didukung oleh positifnya kinerja subsektor utama yaitu, Industri Pengolahan Makan Minum, Kimia, Karet, dan kertas.

**Kinerja sektor Pertanian Sumsel tumbuh positif baik secara tahunan maupun triwulanan.** Pada triwulan II 2024, sektor pertanian Sumsel tumbuh sebesar 3,25% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,11% (yoy). Sejalan dengan tahunan, kinerja triwulan sektor pertanian juga tumbuh positif sebesar 4,58% (qtq), meskipun lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,48% (qtq). Berdasarkan data survei BPS, produksi karet Sumsel pada triwulan II 2024 tercatat naik 3,54% (yoy) dan produksi padi naik 9,50% (yoy).

**Sektor Perdagangan Sumsel tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.** Aktivitas perdagangan Sumsel pada triwulan II 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,69% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 6,81% (yoy). Berdasarkan triwulanan, sektor perdagangan tumbuh sebesar 2,97% (qtq), meningkat dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi -0,04% (qtq). Adanya momen Idul Adha dan libur sekolah menjadi factor pendorong sektor perdagangan Sumsel di triwulan II 2024. Selain itu, membaiknya daya beli masyarakat dan terjaganya laju inflasi turut menopang kinerja sektor perdagangan Sumsel.

**Sektor Konstruksi menunjukkan tren pertumbuhan yang meningkat.** Sektor konstruksi pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 7,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,89% (yoy). Berdasarkan triwulanan, sektor konstruksi tumbuh sebesar 0,35% (qtq), meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 0,05% (qtq). Percepatan penyelesaian PSN menjadi faktor yang mendorong tingginya kinerja sektor konstruksi di triwulan II 2024. Saat ini terdapat 15 PSN yang sedang dilaksanakan di Sumsel pada tahun 2024.

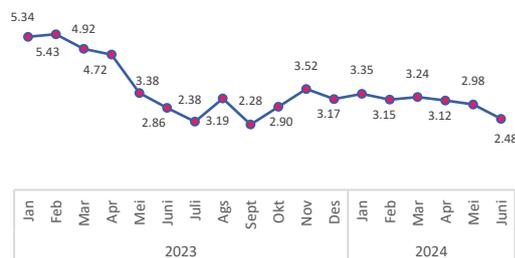
## A.2. Inflasi

**Laju inflasi Sumsel pada periode triwulan II 2024 terkendali dan dalam tren yang menurun.** Per Juni 2024, Inflasi Sumsel tercatat sebesar 2,48% (yoy), turun dibandingkan posisi Maret 2024 yang sebesar 3,24% (yoy). Dan jika dilihat secara bulanan, akumulasi inflasi Sumsel di triwulan II 2024 sebesar 0,46%, meningkat jika dibandingkan triwulan I 2024 yang sebesar 0,18%. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju inflasi Sumsel di triwulan II 2024 adalah cuaca ekstrem yang berdampak pada penurunan produksi dan distribusi komoditas utama, kenaikan tarif angkatan udara akibat tingginya permintaan selama momen HBKN Idul Fitri, Idul Adha, libur sekolah, dan kenaikan harga emas yang didorong oleh ketidakpastian situasi global. Namun demikian, laju inflasi Sumsel secara *year to date* berada di angka 0,64% (ytd), masih dibawah target inflasi 2,5%±1%.

**Secara tahunan, kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar adalah Makanan, Minuman, dan Tembakau.** Pada Juni 2024, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,44% (yoy) dengan andil terhadap

inflasi umum sebesar 1,34% (yoy). Komoditas dominan yang menyumbang inflasi tahunan Sumsel yaitu emas perhiasan, beras, cabai merah, tarif air minum PDAM, daging ayam ras, gula pasir, sigaret kretek mesin, cabai rawit, bawang merah, dan bahan bakar rumah tangga.

Grafik 1.5. Inflasi Sumsel (% , yoy)



sumber: BPS Sumsel, 2024

Berdasarkan data inflasi bulanan, kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Berdasarkan akumulasi April-Juni 2024, inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 3%, dengan andil sebesar 0,22%. Komoditas dominan yang menyumbang inflasi bulanan pada triwulan II 2024 tersebut adalah emas perhiasan, bawang merah, jeruk, ketimun, dan tarif angkutan udara.

Tabel 1.3. Andil Inflasi Kelompok Pengeluaran (% , yoy)

Kelompok Pengeluaran	YoY	Andil Inflasi
Makanan Jadi, Minuman....	4,44	1,34
Pakaian dan Alas Kaki	-1,18	-0,06
Perumahan, Air, Listrik....	2,30	0,32
Perlengkapan, Peralatan....	-1,30	-0,08
Kesehatan	1,26	0,03
Transportasi	1,91	0,25
Informasi, Komunikasi....	-0,51	-0,03
Rekreasi, Olahraga....	2,07	0,04
Pendidikan	1,47	0,08
Penyediaan Makanan....	1,97	0,17
Perawatan Pribadi....	5,94	0,42

sumber: BPS Sumsel, 2024

## B. Perkembangan Indikator Kesejahteraan

### B.1. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Sumsel mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan ekonomi yang terus positif. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sumsel per Februari 2024 berada di angka 3,97% (yoy), turun dari kondisi Februari 2024 yang sebesar 4,53% (yoy). Berdasarkan jumlah, aktivitas perekonomian Sumsel dalam satu tahun tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 85,2 ribu orang dan pengangguran berkurang sebanyak 22,8 ribu orang.

Sektor Pertanian dan Akomodasi Makan Minum menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar. Selama periode Februari 2023 s.d. Februari 2024, sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 76 ribu orang, terutama peningkatan pada pekerja keluarga yang didominasi pekerja dengan

pendidikan SD ke bawah. Sektor makan minum menyerap sebanyak 39,3 ribu orang, dengan peningkatan pada pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan didominasi oleh pekerja dengan pendidikan SMA sederajat.

Grafik 1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka Sumsel (%)



sumber: BPS Sumsel, 2024

Sektor Jasa Profesional & Perusahaan dan sektor perdagangan menjadi sektor yang mengalami penurunan tenaga kerja terbesar. Kedua sektor tersebut secara total mengalami penurunan jumlah tenaga kerja sebanyak 65 ribu orang. Sektor Jasa Profesional dan Perusahaan didominasi pekerja berstatus buruh dengan mayoritas pekerja berpendidikan SMA derajat

### B.2. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan Sumsel secara umum mengalami tren perbaikan dari periode ke periode. Per Maret 2024, kemiskinan Sumsel berada di angka 10,97%, turun dari Maret 2023 yang sebesar 11,78%. Namun demikian, perbaikan tingkat kemiskinan Sumsel tidak diiringi oleh perbaikan pada kondisi tingkat kedalaman (P1) maupun peparahan (P2). Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Sumsel per Maret 2024 di angka 1,888, meningkat dari Maret 2023 yang diangka 1,724. Hal tersebut menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran

Grafik 1.7. Tingkat Kemiskinan Sumsel (%)



sumber: BPS Sumsel, 2024

penduduk miskin Sumsel cenderung menjauh dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sumsel (P2) per Maret 2024 di angka 0,457, meningkat dari Maret 2023 yang tercatat 0,393, yang mengindikasikan bahwa terdapat pelebaran ketimpangan antar penduduk miskin di Sumsel. Berdasarkan wilayah, kemiskinan di wilayah Pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Per Maret 2024, tingkat kemiskinan di Pedesaan tercatat di angka 11,53% dan perkotaan 10,04%.

Komoditas makanan memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan Sumsel. Per Maret 2024, komoditas makanan berkontribusi sebesar 74,57% dari total garis kemiskinan, dengan beras, rokok kretek filter, daging ayam, telur ayam ras, dan mie instan sebagai komoditas dominan. Sementara itu, komoditas non makanan yang

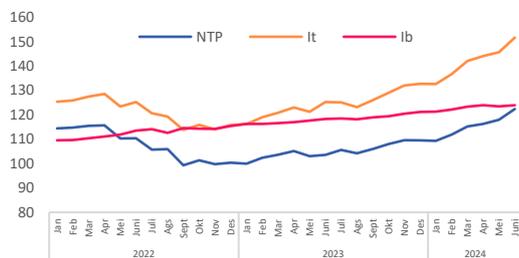
dominan menyumbang garis kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, Pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Kondisi ketimpangan Sumsel per Maret 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi per Maret 2023. Gini Ratio Sumsel tercatat di angka 0,333, turun dari periode sebelumnya yang tercatat 0,338. Membaiknya tingkat ketimpangan tersebut tidak terlepas dari program pemerintah yang memberikan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah.

### B.3. Nilai Tukar Petani

**Nilai Tukar Petani (NTP) Sumsel secara umum menunjukkan tren peningkatan.** Per Juni 2024, NTP Sumsel tercatat di angka 122,40, meningkat 18,15% (yoy) atau 6,25% (qtq). Peningkatan NTP tersebut didorong oleh subsektor perkebunan yang mengalami peningkatan dipengaruhi oleh kenaikan harga kopi, karet, dan kakao. Dari 5 (lima) subsektor, 3 sektor mengalami surplus yaitu Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan.

Grafik 1.8. Nilai Tukar Petani Sumsel (Indeks)



sumber: BPS Sumsel, 2024

**Peningkatan Indeks Terima (It) Petani Sumsel lebih tinggi dari peningkatan Indeks Bayar (Ib).** Per Juni 2024, It Sumsel di angka 151,69, naik 21,08% (yoy) atau 6,73% (qtq). Peningkatan It tersebut ditopang oleh kinerja sektor perkebunan yang per Juni 2024 mencatatkan It di angka 164,70. Sementara itu, Ib Sumsel per Juni berada di angka 123,90, meningkat 4,78% (yoy) atau 0,46% (qtq).

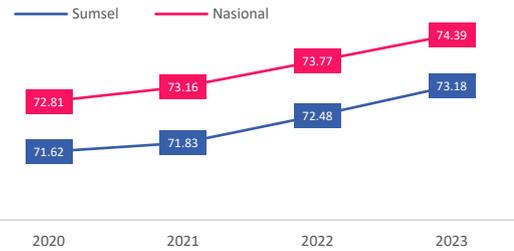
**Indeks Bayar (Ib) Petani Sumsel pada triwulan II 2024 didorong oleh konsumsi rumah tangga.** Per Juni 2024, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Petani Sumsel tercatat di angka 124,67, lebih tinggi dari Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPM) yang sebesar 120,78. Adapun komoditas yang menyumbang IKRT Sumsel pada triwulan II 2024 adalah bawang merah, ketimun, terung, kubis/kol, dan gula pasir. Dan komoditas yang menyumbang BPPM Sumsel adalah upah pemanenan, upah penanaman, ongkos angkut, upah menyangi, dan pelet ikan.

### B.4. Indeks Pembangunan Manusia

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kinerja perekonomian Sumsel.** IPM Sumsel tahun 2023 berada diangka 73,18, meningkat 0,96% dibandingkan tahun 2022. Namun demikian, IPM Sumsel dibawah IPM Nasional yang sebesar 74,29.

**Dari dimensi pembentuk IPM, peningkatan terjadi disemua dimensi.** Kenaikan tertinggi pada dimensi Pengeluaran Perkapita yang meningkat 3,26% (yoy), diikuti Rata-rata Lama Sekolah 1,55% (yoy), Angka Harapan Hidup 0,38% (yoy), dan Harapan Lama Sekolah meningkat 0,63% (yoy).

Grafik 1.9. Indeks Pembangunan Manusia Sumsel (Indeks)



sumber: BPS Sumsel, 2024

---

# BAB II: ANALISIS FISKAL REGIONAL

---



## A. Pelaksanaan APBN Sumsel

Untuk mendukung tema kebijakan fiskal tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, APBN sebagai instrumen pemerintah pusat menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi di Sumatera Selatan (Sumsel). Melalui pengoptimalan fungsi distribusi dan stabilisasi, APBN di Sumsel difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilisasi harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting. Melalui pengoptimalan fungsi alokasi, APBN juga difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (*physical capital*), serta penguatan reformasi kelembagaan.

Kebijakan fiskal 2024 juga difokuskan untuk melanjutkan reformasi fiskal secara holistik, melalui optimalisasi pendapatan negara yang dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi. Target pendapatan negara pada tahun 2024 di Sumsel meningkat 11,15% (yoy) dibandingkan target tahun sebelumnya, yang ditetapkan sebesar Rp22,13 triliun dengan rincian penerimaan pajak Rp19,53 triliun, PNBPN Rp2,22 triliun, serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp378,84 miliar. Penerimaan pajak sebagai kontributor utama, ditargetkan meningkat 11,27% (yoy) di tahun 2024 dengan asumsi semakin baiknya kondisi perekonomian di Sumsel pasca pemulihan ekonomi dan semakin meningkatnya konsumsi domestik di Sumsel, efektivitas implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dan peningkatan kepatuhan dan integrasi teknologi (implementasi *core tax system*).

Selain itu, untuk melanjutkan reformasi fiskal secara holistik maka peningkatan kualitas belanja (*spending better*) perlu ditempuh guna mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi terhadap ketidakpastian global maupun domestik. Alokasi belanja negara pada tahun 2024 di Sumsel meningkat 1,96% (yoy) dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, yang ditetapkan sebesar Rp52,43 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat (BPP) Rp20,77 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp31,65 triliun. Alokasi belanja pemerintah pusat meningkat 22,40% (yoy) yang diarahkan semakin berkualitas (*spending better*) melalui belanja yang semakin efektif, efisien, transparan, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan akuntabel. Sementara itu, alokasi TKD diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui perbaikan kualitas *output* dan *outcome* layanan publik serta pemerataan kesejahteraan rakyat di Sumsel.

Alokasi belanja pemerintah pusat di Sumsel utamanya digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024, penuntasan proyek strategis nasional (PSN) berupa pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta peruntukan kenaikan gaji pokok ASN serta pembayaran Gaji 13 dan THR. Hal ini terlihat dari pagu belanja barang yang meningkat 14,94% (yoy) yang digunakan utamanya untuk dukungan pelaksanaan pemilu seperti pembentukan badan *ad hoc* (pembayaran honor), pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pengadaan barang/jasa/logistik pemilu, dan pelaksanaan tahapan penetapan hasil pemilu. Pagu belanja modal juga meningkat 50,63% (yoy) utamanya digunakan untuk penuntasan PSN di Sumsel seperti pembangunan jalan TOL Betung-Tempino, Bendungan Tiga Dihaji, Daerah Irigasi Lematang, dan Daerah Irigasi Lempuing. Selain itu, pagu belanja pegawai meningkat 5,30% (yoy) yang utamanya digunakan untuk pembayaran kenaikan gaji pokok ASN 8% sesuai Perpres 10/2024 dan pembayaran Gaji 13 dan THR sesuai PP 14/2024 dimana

komponen tunjangan kinerja dibayarkan 100% di 2024, sementara di 2023 dibayarkan 50%. Sementara itu, pagu belanja bantuan sosial menurun 3,05% (yoy) sebagai respon normalisasi kebijakan bantuan sosial seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin menguat dan telah terlewatinya pandemi Covid-19.

Alokasi TKD 2024 di Sumsel tetap dominan dalam mendukung APBD di wilayah Sumsel untuk mendorong pencapaian program prioritas nasional dan kegiatan produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi, meskipun alokasinya sedikit mengalami penurunan. Alokasi TKD menurun 8,12% (yoy) dipengaruhi alokasi DBH, DAK Fisik, Hibah ke daerah, dan insentif fiskal yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi DBH menurun karena penerimaan negara tahun 2023 yang dibagikan menjadi alokasi DBH 2024, lebih rendah dibandingkan penerimaan negara di 2022 yang dibagikan menjadi alokasi DBH 2023. Hal tersebut utamanya didorong oleh mulai ternormalisasinya harga komoditas utama Sumsel (Batubara) di tahun 2023, dimana di tahun 2022 mengalami *windfall* komoditas. Di sisi lain, alokasi DAK Fisik lebih rendah dan cenderung berfluktuasi bergantung dengan arah kebijakan, prioritas nasional, sasaran DAK Fisik, serta rencana kegiatan pemda yang disetujui. Pagu insentif fiskal cenderung lebih rendah karena belum mencakup pagu insentif fiskal atas kinerja tahun berjalan 2024 kategori pengendalian inflasi (periode I – III) dan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat yang baru akan teridentifikasi pada Semester II 2024. Sementara itu, hibah ke daerah 2024 lebih rendah karena *nationwide water* hibah program telah selesai di tahun 2023 untuk proyek air minum perkotaan (AMK) dan air minum pedesaan (AMD) sehingga tidak dialokasikan lagi pada tahun 2024. Pagu Hibah ke daerah tahun 2024 digunakan untuk membiayai program instalasi pengolahan air limbah untuk kota Palembang/ *Palembang City Sewerage Project* (PCSP) yang dibiayai dari hibah luar negeri dari pemerintah Australia dan hibah sanitasi untuk air limbah setempat dan terpusat yang berasal dari penerimaan dalam negeri (Rupiah Murni).

Dengan mencermati alokasi dan arah kebijakan fiskal 2024, kinerja realisasi belanja negara di Sumsel tumbuh positif ditopang oleh telah terlaksananya agenda pemilu, *progress* penuntasan PSN, dan pembayaran kenaikan gaji ASN, Gaji 13, dan THR, serta penyaluran TKD. Hingga triwulan II 2024, realisasi belanja negara di Sumsel telah mencapai Rp22,51 triliun atau tumbuh positif 21,51% (yoy) dan mencapai 43,48% dari pagu belanja di 2024. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang baru mencapai 36,02%. Baik dari sisi belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, semuanya menunjukkan kinerja realisasi yang positif. Hal ini terlihat dari Belanja pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) yang terealisasi sebesar Rp8,18 triliun atau tumbuh positif 35,90% (yoy), dan belanja transfer ke daerah di wilayah Sumsel yang terealisasi sebesar Rp14,32 triliun atau tumbuh positif 14,59% (yoy). Secara keseluruhan, peningkatan realisasi belanja ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sumsel melalui akselerasi belanja yang lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Dengan mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang dihadapi, pemerintah perlu tetap waspada dalam mengantisipasi berbagai risiko global dan domestik, seperti ketidakpastian ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, serta ancaman perubahan iklim. Oleh karena itu, belanja negara harus terus diarahkan pada program-program prioritas yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi Sumsel secara berkelanjutan.

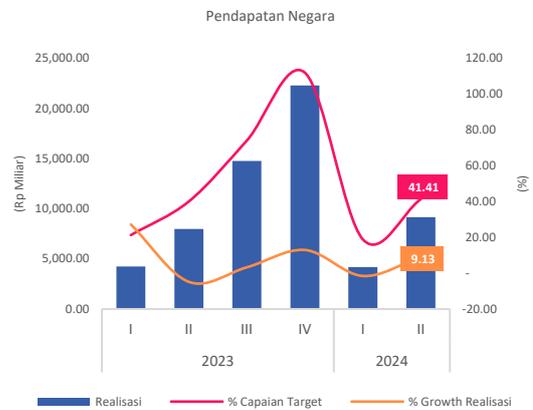
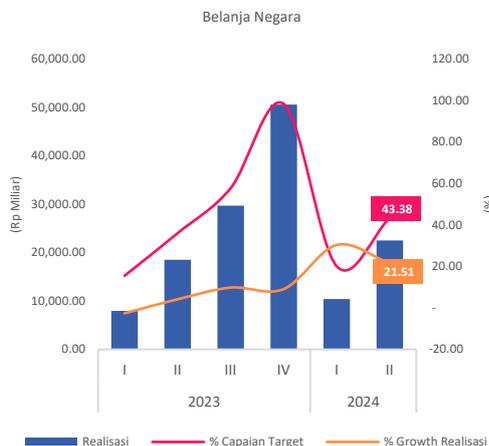
Tabel 2.1. Laporan Realisasi APBN di Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2023-2024 (c-to-c)

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2023			TA 2024			% Growth 2023-2024
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pendapatan Negara	19.914,83	8.396,40	42,16	22.134,71	9.163,37	41,40	9,13
Perpajakan	17.827,38	7.206,35	40,42	19.909,78	7.701,60	38,68	6,87
Penerimaan Pajak	17.552,61	7.040,46	40,11	19.530,94	7.549,45	38,65	7,23
Kepabeanaan dan Cukai	274,76	165,88	60,37	378,84	152,15	40,16	-8,28
PNBP	2.087,45	1.190,05	57,01	2.224,93	1.461,78	65,70	22,83
Belanja Negara	51.428,90	18.525,60	36,02	52.435,19	22.510,99	42,93	21,51
Belanja Pemerintah Pusat	16.976,88	6.020,55	35,46	20.779,60	8.181,86	39,37	35,90
Belanja Pegawai	5.245,76	2.711,14	51,68	5.523,80	3.167,92	57,35	16,85
Belanja Barang	6.728,89	2.449,36	36,40	7.734,42	3.122,15	40,37	27,47
Belanja Modal	4.976,91	847,92	17,04	7.496,84	1.877,73	25,05	121,45
Belanja Bantuan Sosial	25,32	12,12	47,88	24,55	14,06	57,28	15,97
Transfer ke Daerah	34.452,02	12.505,06	36,30	31.655,59	14.329,13	45,27	14,59
Dana Bagi Hasil	13.544,47	3.341,50	24,67	9.969,62	3.931,19	39,43	17,65
Dana Alokasi Umum	12.254,41	5.641,24	46,03	13.400,40	6.825,67	50,94	21,00
DAK Fisik	1.568,36	198,93	12,68	1.430,07	93,95	6,57	-52,78
DAK Non Fisik	4.171,97	2.092,96	50,17	4.251,07	2.155,93	50,71	3,01
Insentif Fiskal	254,87	26,57	10,43	73,48	36,74	50,00	38,25
Dana Desa	2.572,42	1.155,63	44,92	2.521,37	1.280,86	50,80	10,84
Hibah ke Daerah	85,53	48,22	56,38	9,57	4,79	50,03	-90,07
Surplus / Defisit	-31.514,07	-10.129,21	32,14	-30.300,48	-13.347,62	44,05	31,77

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Tumbuh positifnya belanja negara, mempengaruhi kondisi perekonomian Sumsel pada triwulan II yang tetap tumbuh positif. Hal ini terlihat dari lebih tingginya aktivitas perekonomian Sumsel yang didorong oleh sektor lapangan usaha administrasi pemerintahan yang tumbuh signifikan 9,95% (yoy). Sejalan dengan itu, perekonomian Sumsel dari sisi pengeluaran juga didorong oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh positif 12,41% (yoy), yang utamanya dipengaruhi pembayaran kenaikan gaji ASN, gaji 13, dan THR 100%. Kebijakan fiskal yang proaktif ini tidak hanya meningkatkan daya beli, tetapi juga memberikan *multiplier effect* pada sektor-sektor lain seperti perdagangan dan jasa, memperkuat daya tahan dan kebangkitan ekonomi Sumsel.

Grafik 2.1. Perkembangan Realisasi Belanja dan Pendapatan Negara Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)



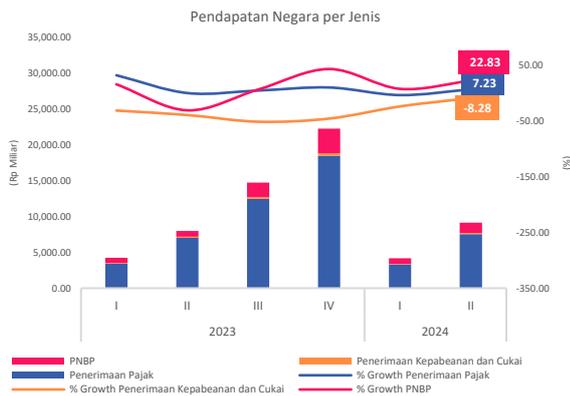
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Dengan melihat kondisi perekonomian Sumsel yang tetap tumbuh positif, sejalan dengan itu kinerja realisasi pendapatan negara juga turut tumbuh positif di Sumsel. Hingga triwulan II 2024, realisasi pendapatan negara di Sumsel telah mencapai Rp9,17 triliun atau tumbuh positif 9,13% dan mencapai 41,41% dari target. Capaian tersebut sedikit menurun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 42,16% dari target. Kendati demikian, pendapatan negara tetap tumbuh kuat utamanya dikontribusi dari penerimaan pajak yang mencapai Rp7,55 triliun atau tumbuh positif 7,23% (yoy). Stabilitas penerimaan pajak ini memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan dan penguatan infrastruktur di Sumsel.

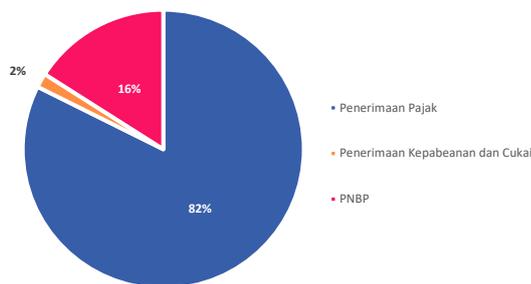
## A.1 Pendapatan Negara

Pendapatan negara di Sumsel meningkat dipengaruhi penerimaan pajak dan PNB yang mencatatkan tren positif, meskipun penerimaan kepabeanan dan cukai masih melambat. Hingga triwulan II 2024, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp7,54 triliun atau tumbuh positif 7,23% (yoy) dan menjadi kontributor utama penyumbang pendapatan negara di Sumsel dengan share 82%. Selanjutnya, realisasi PNB mencatatkan penerimaan sebesar Rp1,46 triliun atau tumbuh positif 22,83% dan menjadi kontributor kedua terbesar dengan share 16%.

Grafik 2.2. Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Pendapatan Negara Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)



Kontribusi Pendapatan Negara s.d. Triwulan II 2024



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Namun demikian, pada penerimaan kepabeanan dan cukai tren perkembangannya masih menunjukkan pertumbuhan negatif hingga triwulan II 2024 dan hanya menyumbangkan 2% dari total pendapatan negara di Sumsel. Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp152,15 miliar atau tumbuh negatif 8,28% (yoy) dipengaruhi penurunan bea keluar karena telah ternormalisasinya harga komoditas ekspor yang dikenakan bea keluar khususnya *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya di Sumsel sejak 2023 hingga saat ini dibandingkan pada tahun 2022 yang mengalami *windfall*.

### A.1.1 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak meningkat didorong tingginya aktivitas konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah di Sumsel. Hingga triwulan II 2024, penerimaan pajak mencapai Rp7,54 triliun (38,65% dari target) atau tumbuh positif 7,23% (yoy) yang utamanya dikontribusikan dari peningkatan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai 8,8% (yoy) dan peningkatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) mencapai 1,7% (yoy). Meningkatnya PPN dan PPh didorong oleh konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor utama (62,77%) PDRB Sumsel mengalami pertumbuhan 4,82% (yoy) dan memiliki andil 2,85% terhadap pertumbuhan ekonomi Sumsel di triwulan II. Selain itu, peran dari pengeluaran konsumsi pemerintah juga berdampak pada peningkatan PPN dan PPh melalui realisasi belanja modal untuk *progress* penuntasan proyek strategis nasional (PSN) di Sumsel, serta pembayaran belanja pegawai untuk kenaikan gaji ASN, Gaji 13, dan THR yang mempengaruhi peningkatan level penghasilan pegawai dan berimplikasi pada peningkatan pembayaran PPh pasal 21.

Kelompok pajak penghasilan (PPh) menjadi kontributor utama total penerimaan pajak di Sumatera Selatan. Kelompok PPh mencatatkan penerimaan sebesar Rp4,45 triliun (50,79% dari target). Hal ini dipengaruhi oleh terjaganya pertumbuhan ekonomi di Sumsel yang utamanya ditopang dari konsumsi rumah tangga. Selain itu, baiknya aktivitas konsumsi pemerintah di Sumsel juga berpengaruh pada capaian PPN & PPNBM yang mencapai Rp2,90 triliun (34,53 % dari target). Sementara itu, sisanya dikontribusi dari PBB yang mencatatkan Rp93 miliar (4,36% dari target), dan pajak lainnya 91,73 miliar (45,44% dari target). Capaian PBB hingga triwulan II masih rendah karena jatuh tempo pembayaran PBB untuk tahun 2024 masih 6 bulan sejak SPPT PBB disampaikan pada bulan Mei. Sehingga, penerimaan PBB baru akan mulai terealisasi pada triwulan IV 2024 mendatang.

Tabel 2.2 Penerimaan Per Kelompok Pajak s.d. Triwulan II 2023-2024 (c-to-c)

Kelompok Pajak (Rp Miliar)	2023			2024			Growth (%)	Share Kelompok Pajak s.d. TW II (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Pajak Penghasilan (PPh)	8.058,11	4.099,87	50,88	8.780,91	4.459,90	50,79	8,78	59,08
PPN & PPNBM	7.216,26	2.856,13	39,58	8.413,01	2.904,82	34,53	1,70	38,48
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	2.073,62	-24,85	-1,20	2.135,12	93,00	4,36	474,19	1,23
Pendapatan Pajak Lainnya	204,62	109,31	53,42	201,89	91,73	45,44	-16,08	1,22
Total Penerimaan Pajak	17.552,61	7.040,46	40,11	19.530,94	7.549,45	38,65	7,23	100,00

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Babel (diolah)

Tabel 2.3. Penerimaan Per Jenis Pajak s.d. Triwulan II 2023-2024 (c-to-c)

Jenis Pajak (Rp Miliar)	Realisasi		Growth (%)	Share Jenis Pajak s.d. TW II (%)
	2023	2024		
PPN Dalam Negeri	2.766,09	2.783,00	0,61	36,86
PPh Pasal 21	1.678,54	2.089,95	24,51	27,68
PPh Pasal 25/29 Badan	1.123,88	975,47	-13,21	12,92
PPh Final & FLN	422,27	525,44	24,43	6,96
PPh Pasal 23	448,78	402,87	-10,23	5,34
PPh Pasal 22	223,18	212,22	-4,91	2,81
PPh Pasal 25/29 OP	115,33	136,10	18,01	1,80
PPN Impor	89,34	121,14	35,60	1,60
Pajak Lainnya	173,06	303,25	75,23	4,02
Total	7.040,46	7.549,45	7,23	100

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Babel (diolah)

Berdasarkan jenisnya, mayoritas jenis penerimaan pajak tumbuh positif. PPN dalam negeri menjadi kontributor utama yang berkontribusi 36,86% dari penerimaan negara di Sumsel dan tercatat Rp2,78 triliun atau tumbuh 0,61%. Hal ini dipengaruhi peningkatan setoran pemungut instansi pemerintah APBN dan APBD dengan kontribusi terbesar dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Selanjutnya, PPh 21 berkontribusi 27,68% dan mencatatkan Rp2,08 triliun atau tumbuh 24,51% didorong terjaganya utilitas tenaga kerja dan peningkatan level penghasilan karyawan. PPh final tumbuh 24,43% karena peningkatan pembayaran dari pelaksanaan jasa konstruksi pada Proyek Strategis Nasional. PPh pasal 25/29 Orang Pribadi (OP) tumbuh positif 18,01% karena pembayaran PPh Tahunan Orang Pribadi dan pembayaran masa angsuran Tahun Pajak 2024. Serta, PPN Impor tumbuh positif 35,60% karena karena tingginya aktivitas impor barang modal pada sektor industri pengolahan dan perdagangan besar.

Beberapa jenis pajak mengalami kontraksi dipengaruhi peningkatan restitusi maupun penurunan harga komoditas utama di Sumsel. Hingga triwulan II 2024, PPh Badan tercatat Rp975,47 miliar dan terkontraksi 13,21% (yoy). Hal ini dipengaruhi penurunan signifikan harga komoditas utama batubara tahun 2023 setelah mengalami *windfall* di tahun 2022, yang mengakibatkan penurunan pembayaran PPh Tahunan. Penurunan produksi batubara 1,27% (yoy) dan penurunan ekspor batubara 3,96% (yoy) mengakibatkan terkontraksinya pph pasal 22 hingga triwulan II sebesar 4,91% (yoy). Sementara itu, pada PPh pasal 23 menurun 10,2% (yoy) yang didorong restitusi atas upaya hukum wajib pajak.

Berdasarkan sektornya, pertumbuhan positif penerimaan pajak suatu sektor selalu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sektor yang sama. Tumbuh kuatnya PDRB sektor administrasi pemerintah 9,98% (ctc) mempengaruhi penerimaan pajak pada sektor administrasi pemerintah 50,03% (ctc). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran PPN dalam negeri atas belanja modal APBN dan APBD serta peningkatan pembayaran PPh 21 atas belanja pegawai. PDRB pada sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh positif 7,26% (ctc) yang mempengaruhi pertumbuhan positif penerimaan pajak sektor perdagangan besar dan eceran secara bruto 0,8%. Meskipun, jika dilihat secara netto mengalami kontraksi 4,70% (ctc) dikarenakan peningkatan restitusi dan penurunan harga komoditas tahun 2023. Hal yang serupa terjadi pada PDRB sektor industri pengolahan yang tumbuh 4,84% (ctc), yang mempengaruhi pertumbuhan positif penerimaan bruto pajak sektor industri pengolahan 5,9%. Meskipun, jika dilihat secara netto mengalami kontraksi 0,6% (ctc) dikarenakan peningkatan restitusi.

Kontribusi sektor penerimaan pajak memiliki keterkaitan dengan bagaimana struktur ekonomi di Sumsel. Secara kontribusinya, penerimaan pajak hingga triwulan II 2024 utamanya berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran (22,79%) yang memiliki pangsa PDRB 13,91%, sektor industri pengolahan yang menyumbangkan 13,98% memiliki pangsa PDRB 18,39%, serta sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi sebesar 12,01% dengan pangsa PDRB sebesar 23,68%.

Tabel 2.4 Perbandingan PDRB dan Penerimaan Pajak Per Sektor s.d. Triwulan II 2023-2024 (c-to-c)

Sektor / Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (c-to-c, %)		Share PDRB TW II (%)	Pertumbuhan Pajak (c-to-c, %)		Share Pajak s.d. TW II (%)
	TW I	TW II		TW I	TW II	
	Pertanian, kehutanan, Perikanan	2,11		2,69	13,94	
Pertambangan dan Penggalian	4,14	2,43	23,68	-9,28	-1,09	12,01
Industri Pengolahan	4,65	4,84	18,39	-20,36	-0,63	13,98
Pengadaan Listrik dan Gas	8,07	8,49	0,13	73,84	75,81	3,90
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,52	2,19	0,10	265,07	60,09	0,40
Konstruksi	6,89	7,09	10,98	-39,86	-24,27	2,93
Perdagangan Besar dan Eceran	6,81	7,26	13,91	-18,32	-4,70	22,79
Transportasi dan Pergudangan	2,72	3,24	2,52	25,80	4,64	5,54
Penyediaan Akomodasi Makan Minum	9,65	9,61	2,00	21,08	12,24	0,39
Informasi dan Komunikasi	6,12	8,00	3,04	28,73	32,12	0,46
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,17	9,12	2,19	17,58	25,77	8,32
Real Estate	6,51	7,46	2,97	-18,99	-8,71	0,65
Jasa Perusahaan	3,96	4,52	0,11	4,42	8,41	2,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,02	9,98	2,59	70,16	50,03	14,65
Jasa Pendidikan	4,94	5,47	2,11	7,11	15,33	0,16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,67	5,66	0,62	8,42	9,98	1,04
Jasa lainnya	4,92	5,70	0,71	20,54	27,79	2,50
PDRB	5,06	5,01	100	-3,05	7,23	100

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Babel dan BPS Sumsel (diolah)

## A.1.2 Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Sejalan dengan aktivitas ekspor Sumsel yang masih berkontraksi, penerimaan kepabeanaan dan cukai di Sumsel menurun dipengaruhi penerimaan bea keluar yang berkontraksi. Hingga triwulan II, penerimaan bea keluar mencatatkan realisasi Rp47,63 miliar atau turun 46,05% (yoy) dengan share 31,30%, penerimaan bea masuk terealisasi Rp106,55 miliar atau naik 34,99% (yoy) dan menjadi kontributor utama dengan share 68,63%, sementara penerimaan cukai mencapai Rp110,45 juta atau turun 57,42% (yoy) dengan share 0,07%.

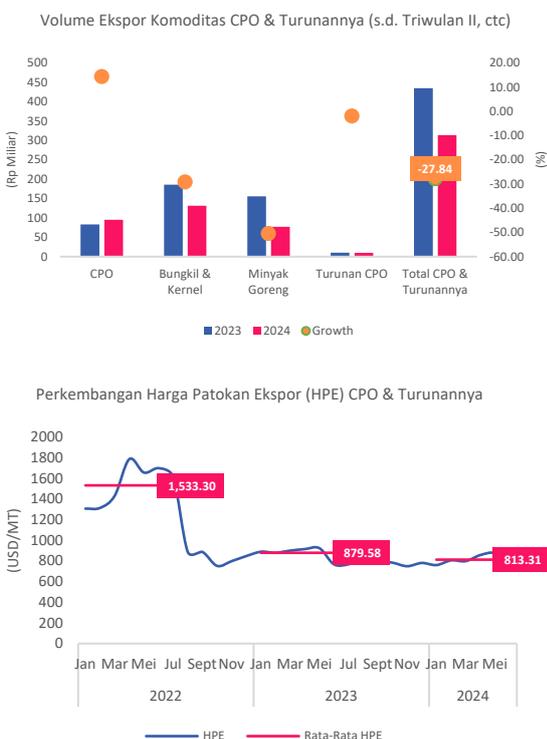
**Grafik 2.3. Perkembangan Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)**



Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Penerimaan bea keluar selain mengalami kontraksi, capaiannya pun masih rendah yang baru mencapai 27% dari target. Penurunan dan rendahnya capaian bea keluar terpengaruh oleh kontraksi aktivitas ekspor di Sumsel khususnya pada komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya. Hal ini disebabkan hanya komoditas tersebut yang menjadi sumber penerimaan bea keluar Sumsel, dari beberapa komoditas yang dapat dikenakan bea keluar sesuai PMK 38/2024.

**Grafik 2.4. Perkembangan Volume dan Harga Patokan Ekspor CPO & Turunannya**



Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim dan Kementerian Perdagangan (diolah)

Meskipun dari sisi produksi komoditas CPO meningkat, aktivitas ekspornya masih berkontraksi. Berdasarkan rilis BPS Sumsel, produksi CPO Sumsel naik 14,08% (yoy) pada triwulan II, namun volume ekspor produk CPO turun 27,84% (yoy) semula 434,87 ribu ton menjadi 313,81 ribu ton menurut Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur. Berdasarkan temuan BPS Sumsel di lapangan, hal tersebut terjadi karena beberapa perusahaan penghasil komoditas CPO di Sumsel merupakan anak perusahaan dari induk yang berasal dari daerah di luar Sumsel. Sehingga, produk CPO yang dihasilkan tidak diekspor melalui Sumsel, namun dikirimkan ke daerah asal induk perusahaan. Selain itu, penurunan rata-rata Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk produk CPO sebesar 7,53% (yoy) dari USD879,58/MT menjadi USD813,31/MT juga menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan volume ekspor CPO dan turunannya. Hal ini berujung pada penurunan penerimaan bea keluar di Sumsel hingga triwulan II 2024 dan menekan potensi penerimaan negara yang berasal dari komoditas CPO dan turunannya yang selama ini menjadi salah satu komoditas andalan ekspor wilayah Sumsel.

Aktivitas impor Sumsel yang masih dalam tren pertumbuhan yang tinggi berdampak pada pertumbuhan penerimaan bea masuk di Sumsel. Pada triwulan II 2024, impor Sumsel tumbuh 92,03% (yoy) yang berimplikasi pada penerimaan bea masuk yang tumbuh 34,99% (yoy) atau mencapai 51,58% dari target dan menjadi kontributor utama dengan *share* 68,63% dari total penerimaan kepabeanaan dan cukai di wilayah Sumsel hingga triwulan II 2024. Impor Sumsel utamanya didorong oleh aktivitas investasi yang dilakukan PT. OKI *Pulp & Paper Mills* yang melakukan impor barang modal berupa mesin untuk peningkatan kapasitas produksi. Hal ini tergambar dari komoditas mesin yang menjadi kontributor utama impor di Sumsel mencapai USD293,65 juta. Meskipun menjadi kontributor utama, impor komoditas mesin di Sumsel mayoritas tidak dikenakan bea masuk. Hal ini terjadi karena sesuai ketentuan pada PMK 188/2015 bahwa impor mesin untuk pengembangan industri dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor.

**Tabel 2.5. Realisasi Impor dan Bea Keluar Per Komoditas s.d. Triwulan II 2024**

Top 10 Komoditas Impor		Top 10 Komoditas terkena Bea Masuk	
Komoditi	Jumlah (Juta USD)	Komoditi	Jumlah (Rp Miliar)
Mesin	293,65	Serealia	33,65
Reaktor, Turbin, Generator	257,36	Bahan Baku Karet	15,98
Mesin Perkakas	152,84	Mesin	5,79
Serealia	48,04	Barang Dari Keramik	3,55
Bahan Baku Karet	46,30	Parts Mesin	2,35
Generator	30,88	Produk Olahan Kimia	1,79
Pupuk	28,81	Parts Alat Berat	1,70
Senjata Dan Bagiannya	27,83	Baja Lembaran Lapis	1,16
Pipa	21,81	Parts Dan Aksesoris Mobil	1,11
Parts Generator	19,78	Kawat	1,00

Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Penerimaan bea masuk di Sumsel meningkat dikontribusikan dari peningkatan importasi komoditas serealia dan bahan baku karet. Pada tahun 2024, kuota impor beras di Sumsel

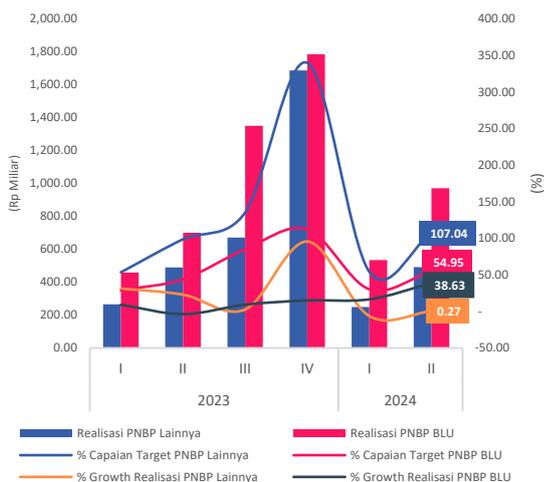
adalah 105.000 ribu ton (Perum BULOG Sumsel-Babel), sementara hingga triwulan II 2024 sebanyak 74.837 ribu ton kuota telah direalisasikan oleh Perum BULOG Sumsel-Babel yang berkontribusi pada penerimaan bea masuk mencapai Rp33,65 miliar. Selain itu, peningkatan impor bahan baku karet juga turut bersumbangsih pada penerimaan bea masuk mencapai Rp15,98 miliar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur dengan pengusaha karet di Sumsel, peningkatan impor bahan baku karet disebabkan penurunan produksi karet akibat wabah jamur putih dan kurangnya bahan baku karet dari lokal yang berkualitas sesuai kebutuhan produksi. Impor bahan baku karet di Sumsel utamanya untuk diolah dan diekspor kembali, sehingga sebagian besar mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

**Penerimaan cukai di Sumsel tidak ditargetkan dan utamanya berasal dari sanksi administrasi cukai (*ultimum remedium*).** Hingga triwulan II, penerimaan cukai mencapai Rp110,45 juta yang berasal dari sanksi administratif penindakan rokok (hasil tembakau) ilegal sebanyak 28.340 batang dan denda Minuman Mengandung Etil Alcohol (MMEA). Jumlah penerimaan ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp259,40 juta yang mengindikasikan penurunan maraknya beredar rokok (hasil tembakau) dan MMEA ilegal di wilayah Sumsel

### A.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak

**Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sumsel tumbuh positif dipengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas layanan Badan Layanan Umum (BLU) maupun Kementerian/Lembaga (K/L).** Hingga triwulan II, total PNBP di Sumsel terealisasi Rp1,46 triliun (65,70% dari target) atau tumbuh positif 22,83% (yoy). Berdasarkan jenisnya, PNBP BLU mencatatkan realisasi sebesar Rp970,40 miliar (54,95% dari target) dan tumbuh positif 38,63% (yoy). PNBP BLU berkontribusi lebih besar dengan share 66,39% dibandingkan PNBP Lainnya yang berkontribusi 33,61% dari total PNBP Sumsel. PNBP Lainnya mencatatkan penerimaan mencapai Rp491,37 miliar (107,04% dari target) dan tumbuh positif 0,27% (yoy).

**Grafik 2.5. Realisasi Per Jenis PNBP Sumsel (c-to-c)**



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

**Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan menjadi faktor utama pendorong tumbuh positifnya PNBP BLU di Sumsel.** Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit yang bersumber dari RSUP Dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang menjadi kontributor utama peningkatan PNBP BLU di Sumsel. Peningkatan pendapatan jasa layanan RSMH

Palembang didorong oleh peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatannya. Secara kuantitas, hal ini terlihat dari peningkatan sebesar 29,40% (yoy) jumlah pasien RSMH Palembang yang terlayani semula 25.785 pasien menjadi 33.365 pasien. Peningkatan jumlah pasien terjadi hampir di seluruh kelas rawat, kecuali pada non kelas yang mengalami penurunan. Peningkatan kuantitas terjadi didorong oleh faktor peningkatan kualitas layanan.

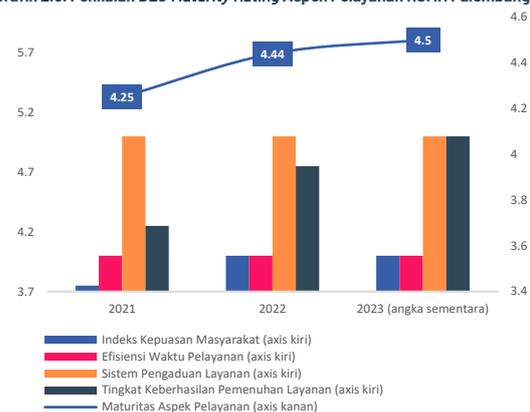
**Tabel 2.6. Jumlah Pasien Terlayani RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang s.d. Triwulan II (c-to-c)**

Kelas	2023	2024	Growth (%)
Di atas kelas I	997	1.458	46,24
Kelas I	5.312	7.531	41,77
Kelas II	3.787	4.250	12,23
Kelas III	13.194	17.650	33,77
Non Kelas	2.495	2.476	-0,76
Total	25.785	33.365	29,40

Sumber: Direktorat PPKBLU (diolah)

Secara kualitas, hal ini dapat tergambarkan dari nilai aspek pelayanan pada BLU *Maturity Rating* RSMH Palembang yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari BLU *Integrated Online System* (BIOS), nilai maturitas aspek pelayanan pada RSMH Palembang mencapai nilai 4,5 untuk kinerja tahun 2023 (bobot tertinggi 5), lebih baik dari nilai di tahun 2022 (4,44) dan 2021 (4,25).

**Grafik 2.6. Penilaian BLU *Maturity Rating* Aspek Pelayanan RSMH Palembang**



Sumber: Direktorat PPKBLU (diolah)

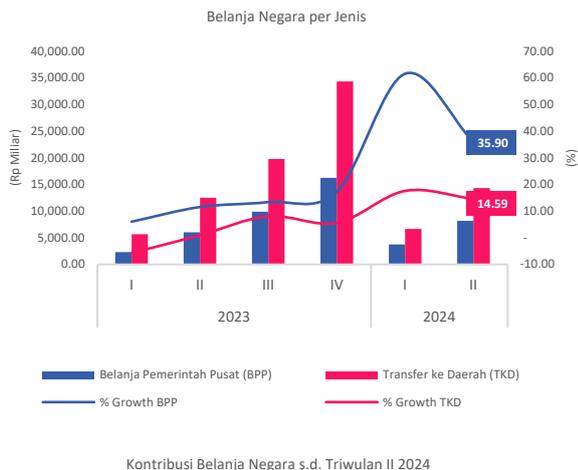
**Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan jasa kepelabuhan menjadi faktor utama pendorong tumbuh positifnya PNBP Lainnya di Sumsel.** Pendapatan Jasa Kepelabuhan yang bersumber dari Satker Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Sumsel menjadi kontributor utama peningkatan PNBP Lainnya. Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi meningkatnya aktivitas bongkar muat dan bongkar muat *ship-to-ship* yang dikelola KSOP Kelas I Palembang. Selain itu, mulai beroperasinya dermaga II Pelabuhan Tanjung Api-Api yang dikelola BPTD Sumsel sejak September 2023, berdampak pada meningkatnya pungutan jasa bandar oleh BPTD di 2024.

### A.2 Belanja Negara

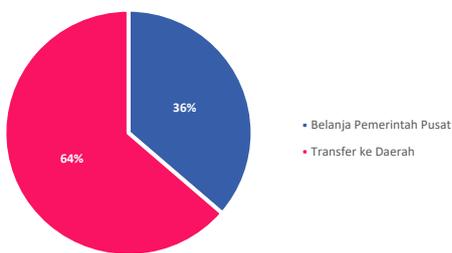
**Belanja negara yang tumbuh positif, berdampak pada kondisi pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) yang juga menunjukkan tren peningkatan di Sumsel.** Hingga triwulan II, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp22,51 triliun dengan realisasi pada belanja pemerintah pusat (BPP) Rp8,18 triliun dan TKD Rp14,32 triliun. Baik dari BPP dan TKD menunjukkan kinerja yang positif dimana tumbuh 35,90% (yoy) dan 14,59% (yoy). Mencermati kondisi belanja negara

yang tumbuh positif, BPS mencatatkan bahwa konsumsi pemerintah di wilayah Sumsel tumbuh sebesar 12,41% (yoy) pada triwulan II 2024. Berdasarkan FGD yang dilaksanakan dengan BPS Sumsel, realisasi belanja negara berkontribusi sebesar 29,39% dari total PKP triwulan II 2024, dimana sisanya dikontribusi dari realisasi belanja daerah (66,61%) dan realisasi belanja desa (4,00%). Kontribusi dari belanja negara cenderung lebih kecil dibandingkan belanja daerah, karena komponen pembentuk PKP hanya memperhitungkan belanja pegawai, barang, dan bantuan sosial. Namun demikian, mengingat utamanya belanja daerah dibiayai dari TKD, maka belanja negara melalui BPP dan TKD berperan krusial dalam menggerakkan ekonomi Sumsel melalui PKP.

**Grafik 2.7. Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Belanja Negara Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)**



Kontribusi Belanja Negara s.d. Triwulan II 2024



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

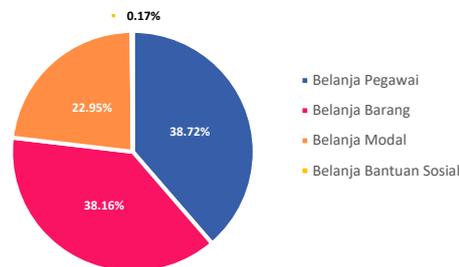
Belanja negara di Sumsel utamanya dimanfaatkan untuk mendukung APBD melalui penyaluran TKD. Hal ini terlihat dari proporsi realisasi belanja TKD hingga triwulan II di Sumsel yang memiliki *share* 64% dari total belanja negara atau mencapai Rp14,32 triliun. Sementara itu, realisasi BPP berkontribusi sebesar 36% dari total belanja negara. Baik BPP maupun TKD, keduanya mencatatkan capaian belanja yang lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya dengan BPP mencapai 39,37% dari pagu dimana tahun sebelumnya 35,46% dan TKD mencapai 45,27% dari pagu dimana tahun sebelumnya 36,30%. Baiknya capaian dan pertumbuhan belanja TKD diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah untuk membiayai belanjanya dan melaksanakan program dan kegiatan di daerah yang dapat memberikan *multiplier effect* yang tinggi bagi perekonomian.

### A.2.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Mencermati bahwa sebagian besar agenda dari alokasi utama BPP di Sumsel telah terlaksana hingga triwulan II, kinerja seluruh jenis BPP tumbuh positif. Agenda pemilu, *progress* penuntasan PSN, dan pembayaran kenaikan gaji ASN, Gaji 13, dan THR telah terlaksana hingga berakhirnya triwulan II 2024. Hal ini menjadi pendorong utama dari tumbuh kuat dan positifnya realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal di Sumsel. Sementara, belanja bantuan sosial tumbuh positif dipengaruhi kenaikan penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di wilayah Sumsel. Melalui peningkatan belanja pegawai, barang, bantuan sosial, pemerintah pusat di Sumsel berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pembentukan PKP. Sementara itu, peningkatan belanja modal berdampak terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Sumsel.

Berdasarkan jenisnya, realisasi BPP dikontribusi dari belanja pegawai dan barang. Realisasi belanja pegawai berkontribusi 38,72% dari total BPP Sumsel. Sejalan dengan itu, realisasi belanja barang juga berkontribusi besar bagi total BPP Sumsel dengan *share* 38,16%. Sementara itu, belanja modal yang diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* tinggi cenderung masih relatif rendah yang berkontribusi 22,95% dari total BPP. Meskipun realisasi belanja modal tumbuh tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi *progress* penuntasan PSN namun capaiannya tergolong rendah dimana baru mencapai 25,05% dari pagu. Di sisi lain, belanja bantuan sosial berkontribusi 0,17% dari total BPP yang dipergunakan dalam rangka perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan di Sumsel.

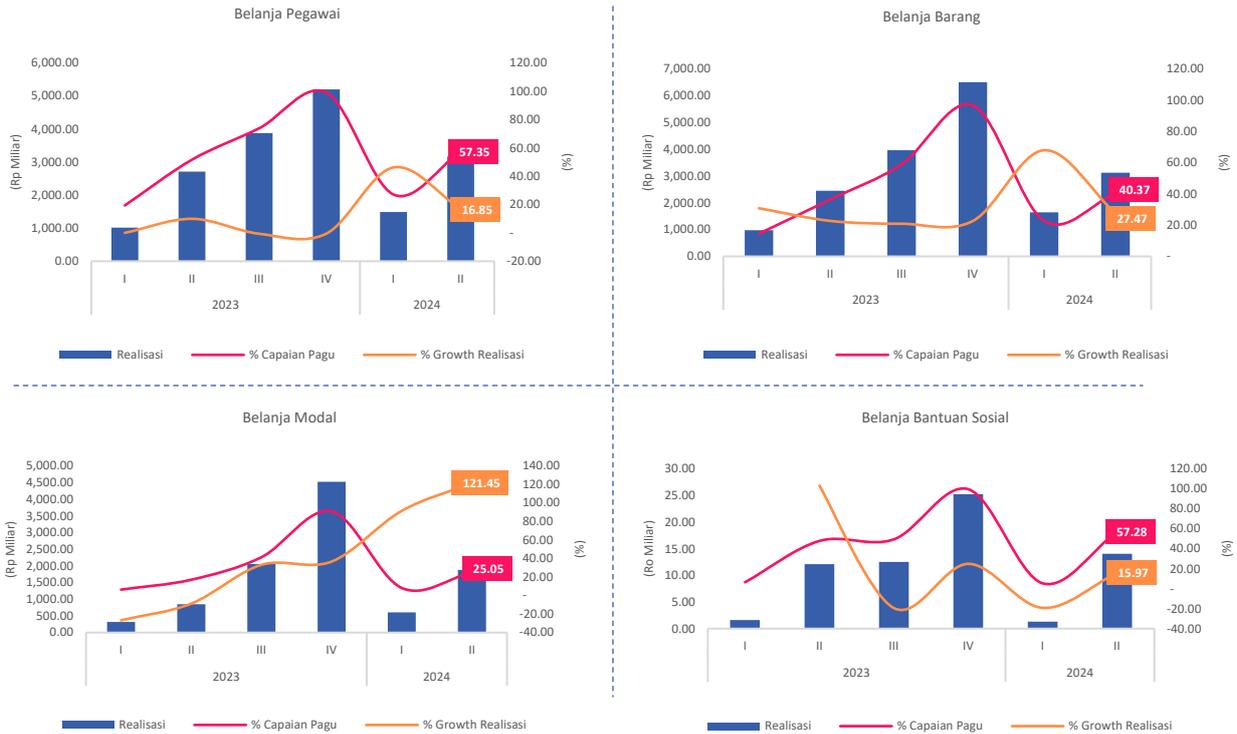
**Grafik 2.8. Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat per Jenis**



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja pegawai Sumsel tumbuh positif dan berperan krusial mendukung peningkatan produktivitas ASN serta melanjutkan proses reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas maka kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitasnya dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi ASN melalui pemberian kenaikan gaji pokok, gaji 13, dan THR. Realisasi belanja pegawai di Sumsel mencapai Rp3,17 triliun dan tumbuh positif 16,85% (yoy). Capaian dari belanja pegawai tersebut *on track* hingga triwulan II karena sudah mencapai 57,35% dari pagu. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja pegawai utamanya dipengaruhi pembayaran kenaikan gaji pokok ASN di tahun 2024 sebesar 8% sesuai Perpres 10/2024, pembayaran gaji 13 dan THR ASN sesuai PP 14/2024 (Komponen tunjangan kinerja dibayarkan 100% di tahun 2024, dimana di 2023 dibayarkan 50%), serta meningkatnya pembayaran belanja pegawai PPPK yang dipengaruhi signifikansi pengangkatan PPPK pada kantor vertikal Kementerian/Lembaga di Sumsel.

Grifik 2.9. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat per Jenis (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

**Belanja barang Sumsel tumbuh positif dan berperan strategis mendukung kegiatan operasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung program prioritas.**

Realisasi belanja barang di Sumsel meningkat 27,47% (yoy) yang utamanya digunakan untuk pembayaran penyelenggaraan dan pengawasan pemilu, pembayaran dukungan layanan kesehatan untuk penguatan SDM, dan pembayaran pelaksanaan program infrastruktur konektivitas. Hingga triwulan II, realisasi belanja barang mencapai Rp3,65 triliun atau 45,23% dari pagu. Pemanfaatan dari belanja barang hingga triwulan II antara lain untuk:

- KPU dan Bawaslu sebesar Rp810,67 Miliar (22,21% dari realisasi belanja barang), utamanya untuk pembayaran pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pembayaran honorarium badan adhoc (PPK, PPS, KPPS, dan PANTARLIH), pengadaan barang/jasa/logistik pemilu, pelaksanaan tahapan penetapan hasil pemilu.
- Kementerian Kesehatan sebesar Rp445,97 (12,21% dari realisasi belanja barang) Miliar, utamanya untuk mendukung layanan umum kesehatan dan layanan sarana internal, pembelian obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), fasilitas pengelolaan manajemen proyek dan rekomendasi penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan pelayanan kanker terpadu (IsDB) pada RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang.
- Kementerian PUPR sebesar Rp175,21 Miliar (4,80% dari realisasi belanja barang), utamanya untuk preservasi pemeliharaan rutin/rehabilitasi/rekonstruksi jalan dan jembatan, pembiayaan *availability payment* (AP) KPBU Jalintim Sumsel.
- Kementerian Perhubungan sebesar Rp109,86 Miliar (3,00% dari realisasi belanja barang), utamanya untuk layanan angkutan jalan perintis (DAMRI), penyelenggaraan layanan perintis LRT Sumsel (subsidi ongkos/angkutan LRT), serta operasi prasarana perkeretaapian.

**Belanja modal Sumsel tumbuh positif dan dipertajam pemanfaatannya untuk mendukung reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.**

Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi tersebut, realisasi belanja modal Sumsel meningkat 121,45% (yoy) untuk mendorong peningkatan akses terhadap layanan dasar (infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan) dan konektivitas di Sumsel. Hingga triwulan II, realisasi belanja modal mencapai Rp1,88 triliun atau 25,05% dari pagu. Peningkatan realisasi belanja modal di Sumsel utamanya dipengaruhi meningkatnya belanja pada program infrastruktur konektivitas, meningkatnya belanja pada program ketahanan sumber daya air, serta meningkatnya belanja pada program pendidikan dan pelatihan vokasi dan program pendidikan tinggi. Pemanfaatan dari belanja modal hingga triwulan II antara lain untuk:

- Kementerian PUPR sebesar Rp1,51 triliun (80,31% dari realisasi belanja modal), utamanya dikontribusikan dari pembangunan Jalan TOL Betung-Tempino yang mencapai Rp806,91 miliar dan pembangunan/operasional/pemeliharaan jalan dan jembatan. Selain itu, juga dikontribusikan dari *progress* pembangunan bendungan tiga dihaji Rp308,85 miliar, serta pembangunan daerah irigasi lematang Rp82,21 miliar.
- Kementerian Perhubungan sebesar Rp136,99 miliar (7,28% dari realisasi belanja modal), utamanya dikontribusikan dari Peningkatan Jalur KA, Penanganan Rintang Jalan, dan Peningkatan 2 unit Jembatan KA lintas Tarahan- Tanjung Enim dan penanganan daerah rawan dan jembatan lintas prabumulih-tarahan, pengembangan bandar udara Silampari (Lubuk Linggau), Pekonserai, dan Atung Bungsu (Pagar Alam).
- Kemenparekraf sebesar Rp51,59 miliar (2,74% dari realisasi belanja modal), untuk prasarana bidang pendidikan tinggi pada Politeknik Pariwisata Palembang.

- d. Kemendikbudristek sebesar Rp31,33 miliar (1,66% dari realisasi belanja modal), untuk realisasi penerimaan pendaanaan BOPTN Vokasi pada Politeknik Sriwijaya
- e. Kementerian Agama sebesar Rp15,48 miliar (0,82% dari realisasi belanja modal), untuk pembangunan gedung pendidikan tinggi yang dibiayai SBSN pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, serta pengadaan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada UIN Raden Fatah Palembang.

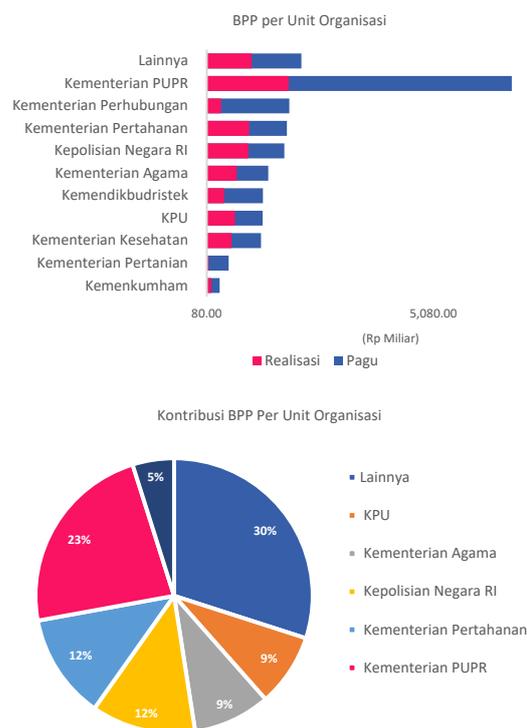
**Capaian realisasi belanja modal Sumsel relatif rendah, meskipun pertumbuhan realisasinya positif.** Capaian 25,05% dari pagu dinilai relatif rendah karena masih kurang dari 50% hingga triwulan II. Masih diblokirnya pagu belanja modal pada PSN Bendungan Tiga Dihaji sebesar Rp2,75 triliun (36,68% dari total pagu belanja modal Sumsel) menjadi faktor penahan akselerasi realisasi belanja modal. Utamanya realisasi belanja modal di Sumsel akan tinggi jika *progress* dari penuntasan PSN di Sumsel berjalan dengan baik khususnya untuk proyek Bendungan Tiga Dihaji. Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji bersifat *Multiyears*, di mulai tahun 2018 dan terus di *carry over* hingga tahun 2024. Berdasarkan FGD dengan Kementerian PUPR, permasalahan kendala teknis dan juga keterbatasan waktu berpotensi menyebabkan proyek bendungan tiga dihaji realisasinya akan di-*carry over* ke 2025. Selain itu, proyek pembangunan daerah irigasi lempuing yang bersumber dari pinjaman luar negeri (JICA) juga berpotensi di-*carry over* ke 2025 karena terkendala proses lelang yang membutuhkan waktu lama dan bersifat internasional.

**Belanja bantuan sosial Sumsel tumbuh positif dan terus dijaga agar tetap optimal dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.** Hingga triwulan II, realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp14,06 miliar (57,28% dari pagu) dan tumbuh positif 15,97% (yoy). Pertumbuhan belanja bantuan sosial terjadi dipengaruhi kenaikan penyaluran bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Semester I 2024 yang dikontribusi dari 600 penerima KIP Kuliah *on going* 2023, dimana di tahun sebelumnya baru disalurkan pada Semester II 2023. Hingga triwulan II 2024, KIP Kuliah tersalur kepada 1.729 mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin pada Universitas Islam Raden Fatah Palembang dengan *unit cost* Rp6,6 juta/semester per mahasiswa atau mencapai Rp11,41 miliar. Selain itu pertumbuhan belanja bantuan sosial juga didorong penyaluran asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) dan bantuan peralatan/sarana oleh Sentra Budi Perkasa Palembang untuk penyandang disabilitas yang telah tersalur mencapai Rp2,64 miliar. Sementara itu, bantuan peralatan/sarana untuk penyandang disabilitas disalurkan berupa motor roda tiga, alat bantu dengar, kruk/tongkat, walker, dan kursi roda.

**Berdasarkan unit organisasi, BPP di Sumsel utamanya dikontribusi oleh aktivitas belanja pada Kementerian PUPR.** Realisasi belanja Kementerian PUPR mencapai Rp1,88 triliun atau menyumbangkan 23% dari total BPP Sumsel hingga triwulan II. Meskipun menjadi kontributor utama, capaian belanja Kementerian PUPR relatif rendah dengan persentase 27,70% dari pagu dipengaruhi oleh masih terdapat blokir pagu belanja modal di Kementerian PUPR untuk proyek Bendungan Tiga Dihaji sebesar Rp2,75 triliun. Ditinjau dari capaiannya, aktivitas belanja pada Kepolisian Negara RI, Kementerian Pertahanan, dan Komisi Pemilihan Umum menunjukkan kinerja yang *on track* karena telah mencapai lebih dari 50% pagu. Belanja pada tiga unit organisasi tersebut utamanya digunakan untuk dukungan manajemen serta

penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi di Sumsel.

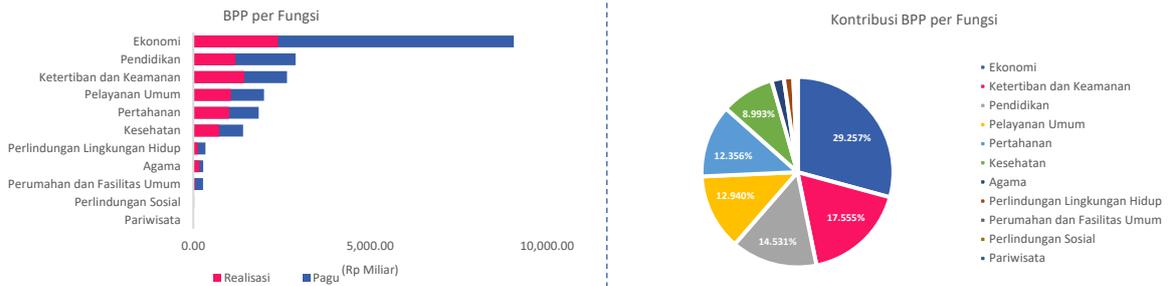
**Grafik 2.10. Realisasi dan Kontribusi BPP per Unit Organisasi**



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

**Berdasarkan fungsi, BPP di Sumsel utamanya dikontribusi dari belanja fungsi ekonomi.** Realisasi belanja fungsi ekonomi mencapai Rp2,39 triliun atau menyumbangkan 29,26% dari total BPP Sumsel hingga triwulan II. Meskipun menjadi kontributor utama, capaian belanja fungsi ekonomi relatif rendah dengan persentase capaian 26,44% dari pagu dipengaruhi serapan pada belanja subfungsi pengairan dan transportasi yang belum optimal. Hal ini disebabkan belanja subfungsi pengairan berkaitan dengan beberapa PSN seperti Bendungan Tiga Dihaji yang masih terdapat blokir pagu, serta Daerah Irigasi Lempuing yang belum terdapat realisasi belanja hingga triwulan II 2024. Ditinjau dari capaiannya, realisasi belanja hingga triwulan II pada fungsi agama, kesehatan, ketertiban dan keamanan, pelayanan umum, perlindungan sosial, serta pertahanan menunjukkan kinerja yang *on track* karena telah mencapai lebih dari 50% pagu. Belanja pada fungsi agama mencapai Rp170,37 miliar utamanya dilaksanakan untuk dukungan manajemen dalam rangka peningkatan kehidupan beragama, pelayanan keagamaan lainnya, dan litbang. Selanjutnya belanja pada fungsi kesehatan mencapai Rp735,84 miliar utamanya digunakan untuk program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, pelayanan kesehatan dan JKN, pengawasan obat dan makanan, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Dari sisi belanja pada fungsi pelayanan umum, realisasinya mencapai Rp1,06 triliun utamanya digunakan untuk penyelenggaraan dan pengawasan pemilu, penyediaan informasi statistik, pemeriksaan keuangan negara, pengawasan pembangunan, pengelolaan penerimaan negara, perencanaan pembangunan nasional, kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN, penyiaran publik, pengelolaan perbendaharaan negara, kekayaan negara dan risiko, serta pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa.

Grafik 2.11. Realisasi dan Kontribusi BPP per Fungsi

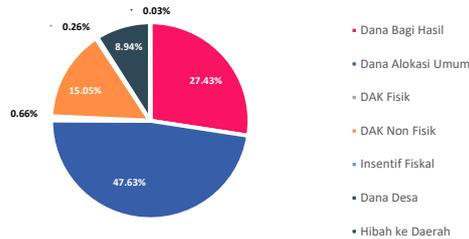


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

### A.2.2 Transfer ke Daerah (TKD)

Kinerja realisasi TKD di Sumsel tumbuh positif untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumsel. Hingga triwulan II, realisasi TKD mencapai Rp14,32 triliun dan tumbuh positif 14,59% (yoy). Dari sisi capaiannya pun mencatatkan kinerja yang lebih baik dimana hingga triwulan II 2024 telah mencapai 45,27% dari pagu sementara di periode tahun lalu mencapai 36,20% dari pagu. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh percepatan pemenuhan syarat salur pemda, pemdes, maupun unit terkait pada penyaluran dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dana desa, dan dana alokasi khusus (DAK) non fisik. Selain itu, meningkatnya jumlah penerima insentif fiskal tahun 2024 di Sumsel untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dibandingkan tahun 2023 menjadi pendorong lebih tingginya realisasi insentif fiskal hingga triwulan II.

Grafik 2.12. Kontribusi Transfer ke Daerah per Jenis



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Berdasarkan jenisnya, TKD di Sumsel didominasi oleh penyaluran DAU. Realisasi DAU mencapai 47,63% dari total realisasi TKD Sumsel hingga triwulan II. Hal ini lumrah terjadi sebab alokasi DAU selalu menjadi yang paling tinggi sejalan dengan kebijakan *hold harmless* sampai 2027 yang mengharuskan alokasi DAU tidak akan berkurang dari tahun sebelumnya. Selain itu, penyaluran DAU *block grant* yang dilakukan setiap bulan sesuai rekomendasi salur sebesar 1/12 dari pagu tahunan, menjadi pendorong realisasi DAU lebih cepat dari jenis TKD lainnya yang lebih dipengaruhi oleh

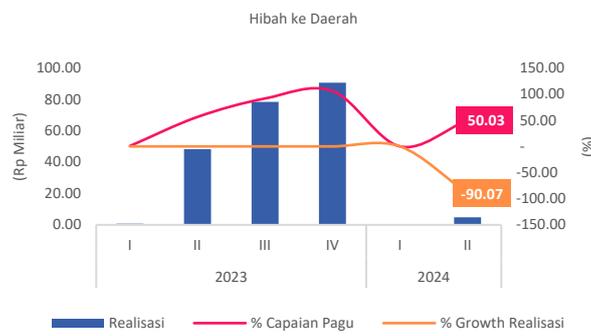
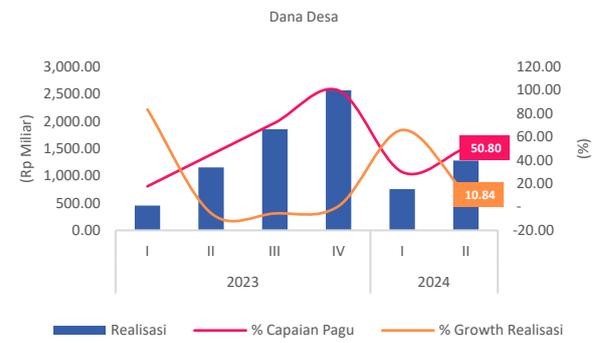
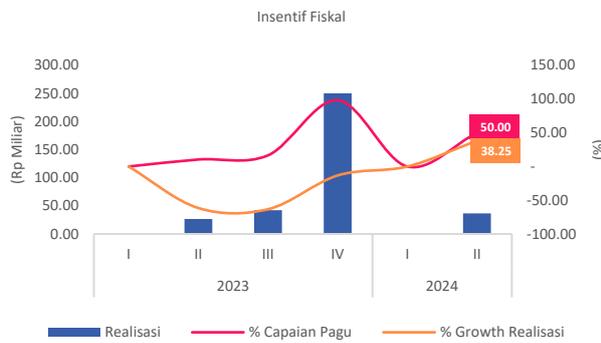
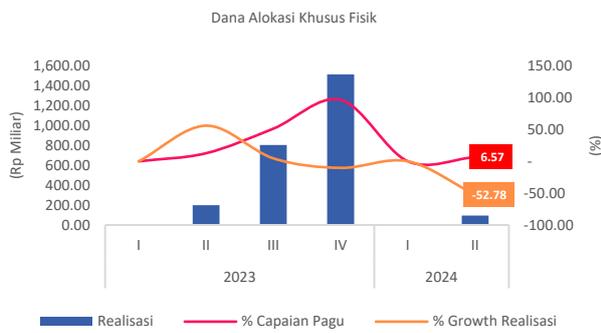
kecepatan pemda/pemdes dalam memenuhi syarat salur sesuai batas waktu.

Penyaluran DBH Sumsel tumbuh positif dan berperan penting mengurangi *vertical imbalance*, menanggulangi eksternalitas *negative*, serta meningkatkan pemerataan di Sumsel. Hingga triwulan II, realisasi DBH mencapai Rp3,93 triliun (39,43% dari pagu) dan meningkat 17,65% (yoy). Sebagai wilayah dengan SDA melimpah dan beberapa kabupaten/kota merupakan daerah penghasil, peningkatan realisasi DBH Sumsel dikontribusi oleh lebih tingginya penyaluran DBH SDA Minerba – royalti yang mencapai Rp2,04 triliun atau tumbuh positif 39,06% (yoy). Selain itu, peningkatan DBH juga dipengaruhi meningkatnya DBH PBB migas, DBH PBB Panas Bumi, DBH PPH pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, DBH Sawit, serta DBH SDA Panas Bumi. Dilihat dari strukturnya, kontribusi realisasi DBH Sumsel hingga triwulan II 2024 utamanya berasal dari DBH SDA Minerba-royalti (52%), DBH PBB Migas bagian daerah kabupaten/kota (18,86%), dan DBH SDA Gas Bumi (12,48%).

Penyaluran DAU Sumsel tumbuh positif dan digunakan untuk menjaga pemerataan keuangan daerah dan memperkuat kebijakan penggunaan yang telah ditentukan untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan mendukung penggajian PPPK di Sumsel. Hingga triwulan II, realisasi DAU mencapai Rp6,82 triliun dan meningkat 21% (yoy). Capaian realisasinya pun mencatatkan kinerja yang lebih baik dimana tercapai 50,94% dari pagu, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 46,03% dari pagu. Pertumbuhan positif realisasi DAU utamanya didorong lebih tingginya penyaluran DAU *block grant* (tidak ditentukan penggunaannya) mencapai Rp5,99 triliun atau naik 27,25% (yoy) sebagai dampak dari kebijakan *hold harmless* dimana alokasi DAU terus meningkat. Selain itu, pertumbuhan juga didorong oleh lebih cepatnya tersalur DAU *specific grant* (ditentukan penggunaannya) terkhusus untuk penggajian formasi PPPK di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran DAU Penggajian formasi PPPK hingga triwulan II 2024 mencapai Rp44,09 miliar.

Grafik 2.13. Perkembangan Transfer ke Daerah per Jenis (c-to-c)





Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

**Penyaluran DAK Fisik Sumsel terkontraksi dipengaruhi keterlambatan terbitnya aturan teknis pengelolaan DAK Fisik.** Hingga triwulan II, realisasi DAK Fisik baru mencapai Rp93,95 miliar (6,57% dari pagu) dan turun 52,78% (yoy). Terlambatnya terbit peraturan pengelolaan DAK Fisik yang baru berlaku akhir April 2024 menjadi faktor penyebab capaian realisasi DAK Fisik masih rendah dan juga mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 18 pemda di wilayah Sumsel, DAK Fisik baru tersalur di 8 pemda dan menyisakan 10 pemda yang dalam tahap pemenuhan syarat salur hingga batas akhir 31 Juli 2024. Untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, DAK Fisik tematik untuk Kawasan sentra produksi pangan telah tersalur untuk bidang pertanian sebesar Rp2,76 miliar dan bidang jalan sebesar Rp9,72 miliar. Selain itu, untuk mendukung penguatan daya saing usaha, realisasi DAK Fisik tematik pengembangan *food estate* telah tersalur untuk bidang irigasi sebesar Rp2,15 miliar, bidang jalan sebesar Rp15,31 miliar, dan bidang pertanian sebesar Rp1,04 miliar. Selanjutnya, untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, DAK Fisik Sumsel telah tersalur ke bidang pendidikan sebesar Rp21,32 miliar untuk pengembangan PAUD, SD, SMP dan perpustakaan, serta pada bidang kesehatan dan KB sebesar Rp3,48 miliar. Sementara itu, sisanya digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas serta elektrifikasi di perdesaan.

**Penyaluran DAK Non Fisik Sumsel tumbuh positif dan digunakan untuk bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) dan tunjangan guru, serta peningkatan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) primer.** Hingga triwulan II, realisasi DAK Non Fisik mencapai Rp2,15 triliun (50,71% dari pagu) dan tumbuh positif 3,01% (yoy). Pertumbuhan positif tersebut dipengaruhi lebih tingginya penyaluran dana BOSP sebesar 3,28% (yoy) dan lebih tingginya penyaluran DAK Non Fisik lainnya 4,59% (yoy). DAK Non Fisik telah tersalur untuk BOSP sebesar Rp958,73 miliar, DAK Non Fisik lainnya diantaranya untuk tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan ASN daerah, BOK Dinas, BOKB, dana peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil, dan dana fasilitasi penanaman modal yang mencapai Rp1,12 triliun. Selain itu, DAK Non Fisik Sumsel juga telah tersalur untuk BOK Puskesmas sebesar Rp69,28 miliar.

**Penyaluran Insentif Fiskal tumbuh positif dipengaruhi meningkatnya jumlah pemda penerima insentif fiskal di Sumsel untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.** Hingga triwulan II, realisasi insentif fiskal mencapai Rp36,74 miliar (50% dari pagu) dan tumbuh positif 38,25%. Pertumbuhan positif tersebut dipengaruhi meningkatnya jumlah pemda di Sumsel yang mendapatkan penghargaan kinerja tahun sebelumnya dimana semula di tahun 2023 berjumlah 2, kemudian menjadi 8 pemda di tahun 2024. Adapun pemda yang mendapatkan insentif fiskal atas baiknya kinerja

pengelolaan keuangan pemerintah, kinerja pelayanan dasar, kinerja dukungan fokus kebijakan nasional, kinerja sinergi kebijakan pemerintah adalah Kab. Ogan Komering Ilir, Ogan ilir, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang, Banyuasin, dan Kota prabumulih, serta Lubuk Linggau.

**Penyaluran Dana Desa Sumsel tumbuh positif dan terakselerasi sejak awal tahun 2024.** Hingga triwulan II, realisasi dana desa telah mencapai Rp1,28 triliun (50,80% dari pagu) dan tumbuh positif 10,84% (yoy). Hal ini didorong desa-desa di Sumsel lebih cepat menyampaikan syarat salur sejak awal tahun 2024. Baiknya kinerja pemenuhan syarat salur desa-desa terlihat dari sebanyak 2.854 desa dari 2.855 desa di Sumsel telah tersalur dana desa tahap I untuk *non earmark* dengan total realisasi mencapai Rp572,26 miliar dan hanya menyisakan 1 desa yang belum salur. Bahkan lebih dari sebagiannya (2.189 desa) telah tersalur dana desa tahap II *non earmark* yang mencatatkan realisasi Rp23,58 miliar. Sementara itu, dari sisi dana desa yang di- *earmark* untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa, program ketahanan pangan, dan penurunan stunting, telah tersalur untuk tahap I ke 2.854 dari 2.855 desa di Sumsel dan mencatatkan Rp674,53 miliar. Selanjutnya, untuk tahap II dana desa  *earmark* telah tersalur ke 2.106 desa dengan realisasi mencapai Rp10,48 miliar.

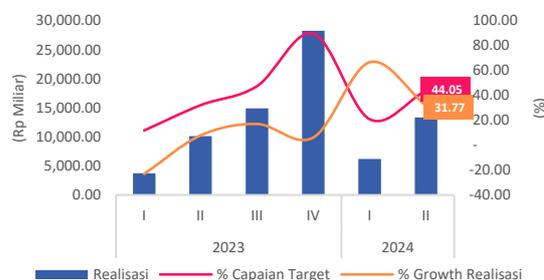
**Hibah ke Daerah Sumsel menurun dipengaruhi oleh alokasinya yang menurun dalam mendukung pembangunan fisik dan layanan publik untuk peningkatan layanan infrastruktur dasar.** Hingga triwulan II, realisasi hibah ke daerah mencapai Rp4,79 miliar (50,03% dari pagu) dan turun 90,07% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya pagu hibah ke daerah di Sumsel karena *nationwide water hibah program* telah selesai di tahun 2023 untuk proyek air minum perkotaan (AMK) dan air minum pedesaan (AMD) sehingga tidak dialokasikan lagi pada tahun 2024. Pagu Hibah ke daerah tahun 2024 di Sumsel digunakan untuk membiayai program instalasi pengolahan air limbah untuk kota Palembang/ *Palembang City Sewerage Project* (PCSP) yang dibiayai dari hibah luar negeri dari pemerintah Australia dan hibah sanitasi untuk air limbah setempat dan terpusat yang berasal dari penerimaan dalam negeri (Rupiah Murni). Hingga triwulan II, hibah ke daerah di Sumsel telah terselesaikan untuk membiayai program instalasi pengolahan air limbah untuk kota Palembang yang mencatatkan realisasi Rp4,79 miliar.

### A.2.3 Surplus/Defisit

**Defisit APBN Sumsel tumbuh positif dan diarahkan untuk mendukung kelanjutan konsolidasi fiskal dan akselerasi transformasi ekonomi.** Hingga triwulan II, defisit APBN Sumsel tercatat mencapai Rp13,34 triliun (44,05% dari target) atau

tumbuh 31,77% (yoy). Pertumbuhan tersebut terjadi sebagai dampak dari kebijakan fiskal yang ekspansif dimana kinerja realisasi belanja pemerintah pusat dan TKD lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan terus diakselerasi untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan akselerasi transformasi ekonomi di Sumsel.

**Grafik 2.14. Perkembangan Defisit APBN Sumsel (c-to-c)**



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

### A.2.4 Proyeksi Realisasi APBN

**Proyeksi pendapatan negara di Sumatera Selatan akan melewati target di akhir tahun 2024.** Berdasarkan hasil proyeksi realisasi pendapatan negara *ontrack* tercapai di setiap triwulannya. Dari masing-masing jenis pendapatan negara, pendapatan pajak yang di proyeksi melampaui target yaitu 101,66%. Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan yang menunjukkan tren positif dan kecenderungan setoran pajak yang akan menumpuk di akhir tahun. Untuk penerimaan Pajak dan Bea Cukai diproyeksikan tercapai target 100% s.d akhir tahun 2024. Pendapatan bea masuk di dorong oleh meningkatnya aktivitas impor di Sumsel sampai dengan akhir tahun. Untuk PNPB diproyeksikan mengalami peningkatan karena perbaikan tata kelola pada BLU Rumah Sakit dan adanya kebijakan Kementerian Pendidikan untuk dapat menaikkan UKT (Uang Kuliah Tunggal).

**Kinerja Belanja Negara diproyeksikan ontrack sampai dengan akhir tahun 2024.** Belanja Pemerintah Pusat diproyeksi akan mencapai 96,45%, didorong oleh realisasi belanja untuk kelanjutan proses penuntasan PSN Jalan Tol Simpang Betung-Tempino, Bendungan Tiga Dihaji, Jaringan Daerah Irigasi Lematang dan Jaringan Daerah Irigasi Lempuing di Sumsel serta pelaksanaan Pilkada Serentak pada November 2024. Untuk penyaluran Transfer ke Daerah diproyeksi akan mencapai 96,91% di akhir tahun 2024. Hal tersebut didorong oleh kebijakan penyaluran TKD yang dilakukan melalui KPPN sehingga proses koordinasi dan kerja sama antara pemda sudah semakin baik dan mengurangi potensi adanya gagal salur TKD.

**Tabel 2.7. Proyeksi Realisasi APBN Sumsel 2024**

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	Pagu	Real s.d. TW II		Proyeksi s.d. TW III		Proyeksi s.d. TW IV	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
<b>Pendapatan Negara</b>	22.134,71	9.163,37	41,40	15.649,24	70,70	22.457,88	101,46
Penerimaan Pajak	19.530,94	7.549,45	38,65	13.683,38	70,06	19.855,15	101,66
Kepabeanan dan Cukai	378,84	152,15	40,16	301,03	79,46	378,84	100
PNBP	2.224,93	1.461,78	65,70	1.665,14	74,84	2.224,93	100
<b>Belanja Negara</b>	52.435,19	22.510,99	42,93	32.971,25	62,88	50.573,74	96,45
Belanja Pemerintah Pusat	20.779,60	8.181,86	39,37	11.804,89	56,81	19.890,24	95,72
Transfer Ke Daerah	31.655,59	14.329,13	45,27	21.133,27	66,76	30.677,43	96,91
<b>Surplus/Defisit</b>	-30.300,48	-13.347,62	44,05	-17.289,46	57,06	-28.094,61	92,72

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

## B. Pelaksanaan APBD Sumsel

**Alokasi APBD Sumsel 2024 meningkat untuk mendukung arah kebijakan pembangunan.** Pada tahun 2024, arah kebijakan pembangunan Sumsel membawa tema “Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan”. Target pendapatan daerah ditetapkan lebih tinggi Rp3,51 triliun atau naik 8,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, pagu belanja daerah dialokasikan lebih tinggi Rp4,03 triliun atau naik 9,73% dibandingkan tahun sebelumnya untuk mendukung program prioritas pembangunan Sumsel untuk penanganan bencana, pengendalian inflasi, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan pelaksanaan pemilu dan pilkada, serta peningkatan ekonomi daerah.

**Kinerja APBD di Sumsel tumbuh positif hingga triwulan II 2024 dipengaruhi pembangunan infrastruktur di wilayah Sumsel dan pelaksanaan pemilu di tahun 2024.** Pendapatan dan belanja daerah sampai dengan bulan Juni 2024 mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi APBD Sumsel mencatatkan surplus dimana pendapatan daerah lebih tinggi dibandingkan belanja daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, sedangkan pada sisi belanja daerah terdapat pada seluruh jenis belanja. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja fiskal daerah dapat saling memberikan pengaruh terhadap gerak perekonomian di Sumsel.

**Penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah turut mempengaruhi kinerja APBD pemda di Sumsel.** Kinerja APBD di Sumsel diharapkan dapat selaras dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui APBN. Pengaturan tata kelola yang diamanatkan dalam UU HKPD, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kinerja fiskal daerah yang berkualitas. Pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah di pemda Sumsel turut terpengaruh dari kebijakan tersebut. Pertumbuhan pendapatan daerah dari transfer dari pemerintah pusat dipengaruhi oleh proporsi Dana Bagi Hasil yang semakin adil untuk daerah penghasil. Selain itu terlihat juga pertumbuhan di retribusi daerah khususnya layanan Kesehatan yang merupakan dampak rasionalisasi objek retribusi yang dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

**Belanja daerah berkualitas mendorong pembangunan aktivitas ekonomi daerah.** UU HKPD telah mengatur alokasi wajib pelaksanaan belanja daerah. Ketentuan belanja daerah wajib mengalokasikan 40% untuk pembangunan infrastruktur dari total belanja APBD. Hal tersebut dapat terlihat indikasi di pertumbuhan realisasi belanja modal di Semester I 2024. Belanja infrastruktur dimaksud terkait percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah. Hal tersebut didukung pula dengan kebijakan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendorong percepatan tersedianya layanan dasar yang terstandarisasi di daerah.

Tabel 2.8. Laporan Realisasi APBD Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II 2024

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2023			TA 2024			% Growth 2023-2024
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	40.968,55	12.549,98	30,63	44.481,61	19.334,62	43,47	54,06
<b>PAD</b>	<b>9.701,62</b>	<b>2.310,38</b>	<b>23,81</b>	<b>9.357,78</b>	<b>2.645,72</b>	<b>28,27</b>	<b>14,51</b>
Pajak daerah	6.527,93	1.746,63	26,76	6.779,28	1.677,53	24,75	-3,96
Retribusi daerah	227,56	30,26	13,30	241,87	57,78	23,89	90,94
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	370,40	223,66	60,38	430,89	304,46	70,66	36,13
Lain-lain PAD yang sah	2.575,73	309,83	12,03	1.905,75	605,93	31,80	95,57
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>30.522,34</b>	<b>10.009,55</b>	<b>32,79</b>	<b>34.758,53</b>	<b>16.650,47</b>	<b>47,90</b>	<b>66,35</b>
Transfer Pemerintah Pusat	28.631,67	9.312,40	32,52	32.383,19	15.531,44	47,96	66,78
Transfer Antar Daerah	1.890,67	697,15	36,87	2.375,33	1.119,04	47,11	60,52
<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>	<b>744,58</b>	<b>230,04</b>	<b>30,90</b>	<b>365,30</b>	<b>38,43</b>	<b>10,52</b>	<b>-83,29</b>
Pendapatan Hibah	84,74	105,92	125,00	53,21	9,04	17,00	-91,46
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	659,85	124,12	18,81	312,10	29,39	9,42	-76,32
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>41.491,35</b>	<b>10.438,13</b>	<b>25,16</b>	<b>45.528,86</b>	<b>16.945,16</b>	<b>37,22</b>	<b>62,34</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>26.824,06</b>	<b>7.598,09</b>	<b>28,33</b>	<b>29.577,21</b>	<b>11.346,43</b>	<b>38,36</b>	<b>49,33</b>
Belanja Pegawai	14.401,81	5.024,89	34,89	15.411,74	6.994,64	45,39	39,20
Belanja Barang dan Jasa	11.272,76	2.353,62	20,88	12.039,97	3.423,94	28,44	45,48
Belanja Bunga	80,33	25,46	31,69	33,76	17,10	50,64	-32,85
Belanja Subsidi	14,58	3,99	27,39	16,79	9,32	55,50	133,40
Belanja Hibah	1.019,58	183,19	17,97	2.009,33	884,47	44,02	382,81
Belanja Bantuan sosial	35,01	6,93	19,80	65,62	16,97	25,86	144,91
<b>Belanja Modal</b>	<b>6.863,53</b>	<b>801,07</b>	<b>11,67</b>	<b>7.552,18</b>	<b>1.862,20</b>	<b>24,66</b>	<b>132,46</b>
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>123,08</b>	<b>1,67</b>	<b>1,35</b>	<b>422,76</b>	<b>8,28</b>	<b>1,96</b>	<b>397,03</b>
<b>Belanja Transfer</b>	<b>7.680,67</b>	<b>2.037,30</b>	<b>26,53</b>	<b>7.976,71</b>	<b>3.728,25</b>	<b>46,74</b>	<b>83,00</b>
Belanja Bagi Hasil	2.034,24	991,48	48,74	2.313,83	890,36	38,48	-10,20
Belanja Bantuan Keuangan	5.646,43	1.045,83	18,52	5.662,88	2.837,89	50,11	171,35
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>-522,79</b>	<b>2.111,85</b>	<b>-403,95</b>	<b>-1.047,25</b>	<b>2.389,46</b>	<b>-228,16</b>	<b>13,15</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>522,79</b>	<b>1.795,96</b>	<b>343,53</b>	<b>1.047,25</b>	<b>1.140,31</b>	<b>108,89</b>	<b>-36,51</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1.412,68</b>	<b>2.070,27</b>	<b>146,55</b>	<b>1.400,36</b>	<b>1.248,62</b>	<b>89,16</b>	<b>-39,69</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>889,88</b>	<b>274,31</b>	<b>30,83</b>	<b>353,10</b>	<b>108,31</b>	<b>30,67</b>	<b>-60,51</b>
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		6.019,66			5.919,23		-1,67

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

## B.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Sumsel tumbuh positif didorong realisasi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan triwulan II 2024, realisasi pendapatan daerah Sumsel sebesar Rp19,33 triliun atau telah mencapai 43,47% dari target APBD 2024. Capaian tersebut lebih tinggi Rp6,78 triliun dari periode yang sama tahun lalu dengan kontributor utamanya adalah pendapatan transfer pemerintah pusat (86,12%) dan Pendapatan Asli Daerah (13,68%).

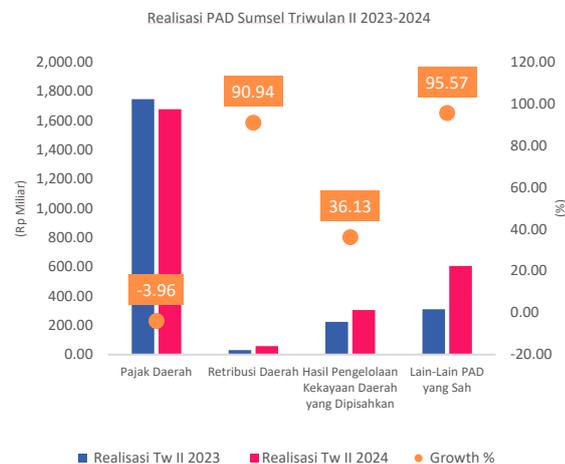
Grafik 2.15. Pertumbuhan dan Kontribusi Realisasi Per Jenis Pendapatan Daerah



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Dari sisi pertumbuhannya, realisasi pendapatan daerah tumbuh sebesar 54,05% (yoy), dimana dipengaruhi oleh akselerasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan khususnya Dana Desa, DAK Non Fisik, DAU, Insentif Fiskal, dan DBH yang telah salur sejak awal tahun. Selain itu pada pendapatan asli daerah yang terindikasi oleh dorongan beberapa kegiatan *event* kepariwisataan yang dilaksanakan di Sumsel.

Grafik 2.16. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Pendapatan Asli Daerah tumbuh positif meskipun terjadi kontraksi pada penerimaan pajak daerah. Realisasi PAD tercatat Rp2,64 triliun atau 28,27% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 13,68% dari total realisasi pendapatan daerah hingga triwulan II 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi PAD tumbuh 14,51% (yoy) yang dipengaruhi pajak daerah sebagai kontributor utama PAD, meskipun terjadi kontraksi pada pajak daerah yang dikelola oleh pemrov (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor dan Pajak Air Permukaan). Hal ini terindikasi sebagai dampak dari kebijakan baru PDRD Sumsel tahun 2024 diantaranya:

penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang semula 1,5% menjadi 1%, tidak diberlakukannya lagi tarif pajak progresif untuk PKB kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya, serta tidak dikenakannya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Indikasi lainnya dikarenakan penyesuaian dalam penatausahaan penerimaan daerah pada unit penerimaan karena penggunaan aplikasi SIPD.

Pelaksanaan *event* Kepariwisataan di Sumsel mendorong pertumbuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di triwulan II 2024. Sejak bulan April 2024, Sumsel mengadakan beberapa *event* kepariwisataan di beberapa wilayah. *Event* kepariwisataan tersebut direncanakan berlangsung sampai dengan bulan November 2024. Kegiatan yang diadakan tersebut mengundang wisatawan untuk berpariwisata di Sumsel sehingga memberikan dampak pertumbuhan dalam penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pertumbuhan terbesar terdapat pada Pajak Hiburan tumbuh 845,86% (yoy) dan Pajak Reklame tumbuh 87,84% (yoy). Indikasi lain yang menyebabkan tumbuhnya Pajak reklame karena dampak kegiatan pemilu yang dilaksanakan di tahun 2024.

Komponen PAD yang lain selain Pajak Daerah mengalami pertumbuhan positif di triwulan II 2024. Realisasi retribusi daerah sebesar Rp57,78 miliar atau tumbuh 90,94% (yoy) yang utamanya dipengaruhi pertumbuhan pada retribusi jasa umum yaitu retribusi layanan kesehatan dan retribusi layanan pendidikan. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp304,46miliar atau tumbuh 36,13% (yoy) yang dipengaruhi peningkatan dividen atas penyertaan modal pada BUMD dan BUMN. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah tercatat Rp605,93 miliar atau tumbuh 95,57% (yoy) yang dipengaruhi pertumbuhan pada penerimaan komisi, potongan dan selisih tukar rupiah dan penerimaan pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan.

Pendapatan dari dana transfer terakselerasi dan bekerja optimal sejak awal tahun hingga triwulan II 2024. Realisasi pendapatan dari Dana Transfer sebesar Rp16,65 triliun atau 47,90% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 86,12% dari total realisasi pendapatan daerah hingga triwulan II 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi pendapatan dari dana transfer tumbuh positif 50,88% (yoy) yang utamanya dipengaruhi peningkatan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dan juga pendapatan transfer antar daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 2.17. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Pendapatan dari Dana Transfer



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Pendapatan transfer pemerintah pusat tumbuh signifikan mengindikasikan terjadi percepatan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah di wilayah Sumsel. Pendapatan transfer pemerintah pusat realisasi sebesar Rp15,53 triliun atau tumbuh positif 66,78% (yoy). Hal tersebut didorong oleh percepatan penyaluran TKD s.d triwulan II 2024 pada hampir semua jenis TKD, kecuali DAK Fisik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan juknis pelaksanaan penyaluran DAK Fisik yang baru diterbitkan pada bulan Mei 2024 lalu. Selain itu pertumbuhan juga terjadi pada pendapatan transfer antar daerah yang telah terealisasi sebesar Rp1,12 triliun atau tumbuh 60,52% (yoy). Pertumbuhan positif pada pendapatan bagi hasil pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel 2.9. Kondisi Kemandirian Fiskal Pemda di Wilayah Sumatera Selatan Triwulan II 2024

Pemerintah Daerah	IKF	Kategori
Prov. Sumatera Selatan	0,19	Belum Mandiri
Kab. Musi Banyuasin	0,08	Belum Mandiri
Kab. OKU	0,04	Belum Mandiri
Kab. Muara Enim	0,08	Belum Mandiri
Kab. Lahat	0,03	Belum Mandiri
Kab. Musi Rawas	0,03	Belum Mandiri
Kab. Ogan Komering Ilir	0,06	Belum Mandiri
Kab. Banyuasin	0,02	Belum Mandiri
Kab. OKU Timur	0,05	Belum Mandiri
Kab. OKU Selatan	0,01	Belum Mandiri
Kab. Ogan Ilir	0,06	Belum Mandiri
Kab. Empat Lawang	0,04	Belum Mandiri
Kab. PALI	0,02	Belum Mandiri
Kab. Musi Rawas Utara	0,03	Belum Mandiri
Kota Palembang	0,25	Menuju Kemandirian
Kota Prabumulih	0,08	Belum Mandiri
Kota Pagar Alam	0,05	Belum Mandiri
Kota Lubuk Linggau	0,06	Belum Mandiri

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Seluruh pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah di Sumsel masih didominasi oleh pendapatan dari dana transfer, yang menunjukkan kemandirian yang masih rendah. Sampai dengan bulan Juni 2024, dari 18 pemerintah daerah di Sumsel terdapat 17 pemda yang indeks kemandirian fiskal dalam kategori “Belum Mandiri” dan hanya 1 pemda yang masuk dalam kategori “Menuju Kemandirian”. Pemda yang masuk dalam kategori “Menuju Kemandirian” adalah Pemerintah Kota Palembang memiliki nilai Indeks Kemandirian Fiskal sebesar 0,25.

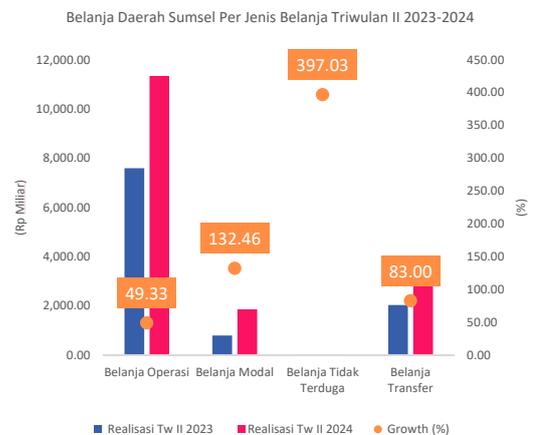
Lain-lain pendapatan daerah terkontraksi pada triwulan II 2024. Realisasi lain-lain pendapatan sebesar Rp38,43 miliar atau 10,52% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 0,20% dari total realisasi pendapatan daerah hingga triwulan II 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi lain-lain pendapatan daerah terkontraksi sebesar 83,29% (yoy) yang utamanya dipengaruhi oleh penurunan penerimaan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontraksi penerimaan hibah terbesar terdapat pada penerimaan hibah yang berasal dari pemerintah pusat.

## B.2 Belanja Daerah

Belanja daerah Sumsel tumbuh positif didorong kinerja realisasi semua jenis belanja kecuali belanja hibah yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga berakhirnya triwulan II 2024, realisasi belanja daerah Sumsel sebesar Rp16,94 triliun atau telah mencapai 37,22% dari target APBD

2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja daerah tumbuh positif 49,33% (yoy), dimana dipengaruhi oleh pertumbuhan dari sisi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

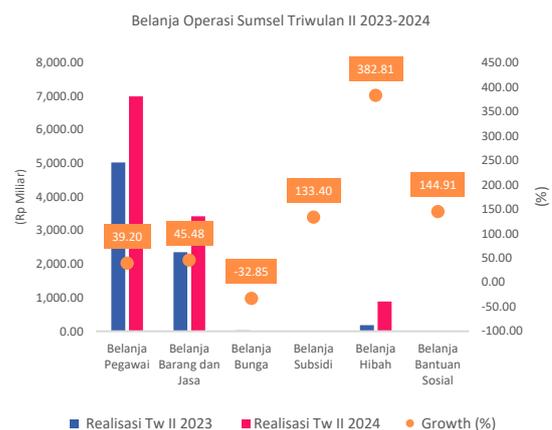
Grafik 2.18. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Belanja Daerah



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Kinerja Belanja Operasi tumbuh positif di hampir semua jenis belanja kecuali belanja bunga. Realisasi belanja operasi sebesar Rp11,34 triliun atau 38,26% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 66,96% dari total realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan II 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja operasi tumbuh 49,33% (yoy) yang dipengaruhi realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 2.19. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Belanja Operasi



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Dilihat secara lebih rinci per jenis belanja operasi, realisasi belanja pegawai mencatatkan tren yang positif. Sampai dengan triwulan II 2024, belanja pegawai terealisasi sebesar Rp6,99 triliun atau 45,39% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja pegawai tumbuh positif 39,20% (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan belanja gaji dan tunjangan, belanja pegawai BLUD dan belanja pegawai BOS. Diindikasikan pengaruh dari pengangkatan PPPK dan penyesuaian kenaikan tarif gaji ASN.

**Belanja barang dan jasa tumbuh positif hingga triwulan II 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.** Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp3,42 miliar atau 28,44% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja barang dan jasa tumbuh 45,48% (yoy) dipengaruhi oleh pertumbuhan pada belanja barang habis pakai, belanja jasa kantor, belanja sewa Gedung dan peralatan, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja barang dan jasa BLUD dan belanja barang dan jasa dana BOS.

**Belanja bunga juga mengalami kontraksi hingga triwulan II 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.** Realisasi belanja bunga sebesar Rp17,10 miliar atau 50,64% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja bunga turun-32,85% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan pengeluaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan perbankan dan bukan bank dibandingkan tahun sebelumnya.

**Belanja subsidi tumbuh positif hingga triwulan II 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.** Realisasi belanja subsidi sebesar Rp9,32 milyar atau 55,5% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja subsidi tumbuh 133,40% (yoy) dipengaruhi oleh realisasi belanja subsidi pada triwulan II 2024 yang lebih tinggi pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Diindikasikan pengaruh dari adanya Hari Raya Idul Fitri, beberapa pemda memberikan subsidi dana kepada BUMD yang memiliki tuisi layanan kepada masyarakat (Feeder LRT, Transmusi, PDAM).

**Belanja Hibah hingga triwulan II 2024 mencatatkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.** Realisasi belanja hibah sebesar Rp884,87 miliar atau 44,02% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja hibah tumbuh positif 382,81% dipengaruhi oleh peningkatan belanja hibah kepada pemerintah pusat dan belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagai dampak dari penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 pada Februari. Juga adanya pencatatan terhadap Belanja Hibah dari dana BOS untuk pendidikan dasar.

**Belanja bantuan sosial mencatatkan tren yang positif dibandingkan tahun sebelumnya.** Realisasi belanja bantuan sosial tercatat Rp16,97 miliar atau 25,86% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja bantuan sosial tumbuh 144,91% (yoy) dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial kepada masyarakat dan belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan pada triwulan II 2024

**Belanja modal tumbuh positif dan mempengaruhi pertumbuhan belanja daerah di Sumsel.** Realisasi belanja modal sebesar Rp1,86 triliun atau 24,66% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja modal tumbuh positif 132,46% (yoy) dikontribusikan oleh meningkatnya realisasi belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan seperti jalan dan jembatan serta belanja modal bangunan air dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja realisasi tersebut selaras dengan beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada beberapa wilayah di Sumsel. Realisasi belanja modal tersebut memberikan indikasi yang positif untuk pertumbuhan ekonomi sumsel kedepannya dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

**Pertumbuhan realisasi belanja tidak terduga meningkat untuk merespon berbagai bencana banjir yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan.** Hingga triwulan II 2024, realisasi belanja tidak terduga tercatat Rp8,28 miliar atau 1,96% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja tidak terduga tumbuh positif 128,77% (yoy) sebagai respon untuk

pengeluaran tidak terduga dalam penanganan kejadian banjir di wilayah Sumsel seperti Kab. Musi Rawas, Kab. OKU Selatan, Kab. Lahat, Kab. OKU dan Kab. Musi Banyuasin. Selain itu BTT dipergunakan untuk penyelesaian kelebihan potongan temuan BPK RI oleh Kab.OKU Timur.

**Belanja transfer tumbuh positif hingga triwulan II 2024.** Realisasi belanja transfer sebesar Rp3,73 triliun atau 46,74% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja transfer tumbuh positif 83,00% (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan bantuan keuangan atas bagi hasil pajak daerah oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota di Sumsel dan bantuan keuangan yang diberikan oleh Kabupaten kepada desa.

### B.3 Surplus/Defisit APBD

**Sampai dengan triwulan II 2024, APBD Sumsel mencatatkan surplus.** Realisasi APBD Sumsel tercatat surplus sebesar Rp 2,38 Triliun atau tumbuh 13,15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kinerja APBD di Sumsel, selain itu terlihat dari peningkatan kinerja realisasi penerimaan daerah dan realisasi belanja daerah yang menunjukkan adanya kegiatan perekonomian di Sumsel.

### B.4 Pembiayaan Daerah

**Realisasi pembiayaan daerah mengalami tren yang meningkat di triwulan II 2024.** Realisasi pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp1,14 triliun atau 108,89% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi pembiayaan daerah kontraksi negatif sebesar-36,51% (yoy) dikontribusikan dari penurunan penerimaan pembiayaan dan penurunan. Penerimaan pembiayaan terealisasi Rp1,24 triliun atau terkontraksi -39,69% yang utamanya dikontribusikan dari penggunaan SILPA tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tercatat Rp108,31 miliar atau turun-60,51% (yoy) yang dipengaruhi oleh penurunan penyertaan modal/investasi pemda dan penurunan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri hingga triwulan II 2024.

### B.5 Proyeksi Realisasi APBD

**Realisasi APBD Sumsel triwulan III 2024 diproyeksikan mengalami pertumbuhan baik dari sisi pendapatan dan belanja.** Realisasi pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp27,57 triliun atau 61,84% dari target APBD. Sementara itu, realisasi belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp7,37 triliun atau 16,20% dari pagu APBD. Dari sisi proyeksi pertumbuhannya, realisasi pendapatan daerah akan mengalami pertumbuhan 7,46% (yoy) dan pada saat yang sama realisasi belanja daerah akan mengalami pertumbuhan 0,02% (yoy) hingga triwulan III 2024.

**Realisasi APBD Sumsel diperkirakan tumbuh positif hingga akhir tahun anggaran 2024.** Di triwulan IV, realisasi pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp43,15 triliun atau 101,47% dari target APBD. Hal tersebut dikarenakan kinerja pendapatan dan belanja daerah Sumsel dimungkinkan karena pada triwulan II 2024 hampir mencapai target, untuk belanja hampir mencapai 40% yaitu 37,22% dan pendapatan daerah sebesar 43,47% yang melebihi proyeksi untuk triwulan II 2024. Faktor pembangunan infrastruktur dan geliat aktivitas ekonomi serta pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun ini akan mendorong kinerja APBD di Sumsel lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel 2.10. Proyeksi Realisasi APBD Sumsel

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	Pagu	s.d. TW II		s.d. TW III		s.d. TW IV	
		Realisasi	%	Proyeksi	%	Proyeksi	%
Pendapatan Daerah	44.481,61	19.334,62	43,47	27.507,43	61,84	45.135,49	101,47
PAD	9.357,78	2.645,72	28,27	4.882,89	52,18	8.266,66	88,34
Pendapatan Transfer	34.758,53	16.650,47	47,90	23.284,74	66,99	37.083,87	106,69
Lain-lain Pendapatan yang sah	365,30	38,43	10,52	114,71	31,40	260,97	71,44
Belanja Daerah	45.528,86	16.945,16	37,22	22.800,85	50,08	44.217,63	97,12
Belanja Operasi	29.577,21	11.346,43	38,36	15.415,64	52,12	27.613,29	93,36
Belanja Modal	7.552,18	1.862,20	24,66	3.392,44	44,92	8.922,15	118,14
Belanja Tidak Terduga	422,76	8,28	1,96	45,07	10,66	105,73	25,01
Belanja Transfer	7.976,71	3.728,25	46,74	3.928,53	49,25	6.161,21	77,24

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

### C. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. LRA Pemerintah Konsolidasian ini mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dilakukan eliminasi akun-akun resipokal. Dalam hal ini eliminasi dilakukan terhadap belanja tranfer ke daerah dari sisi LRA pemerintah pusat di eliminasi dengan pendapatan transfer dari sisi LRA pemerintah daerah.

Pendapatan konsolidasian wilayah Sumsel sampai dengan Triwulan II tahun 2024 mencapai Rp15,43 triliun dimana capaian ini tumbuh 41,46% (yoy). Pendapatan tersebut mayoritas lebih disumbang oleh peran pendapatan pemerintah pusat sebesar Rp8,92 triliun atau 57,85% dari total pendapatan konsolidasian. Pada aspek pendapatan yang bersumber dari perpajakan, Pemerintah Pusat masih mendominasi dengan porsi 81,36%, namun pada periode ini, capaian PNB pada Tingkat konsolidasian Pemda lebih mendominasi dengan porsi 70,05% dari total PNB. Angka PNB pada pemerintah daerah dan Belanja Transfer pada pemerintah pusat merupakan angka setelah dilakukan eliminasi akun resipokal antara pendapatan transfer pemda

dan belanja transfer pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan sinyal bahwa aspek PNB yang didapatkan oleh daerah pada periode ini sudah semakin baik dan perlu untuk terus ditingkatkan.

#### Belanja konsolidasian wilayah Sumsel hingga Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp26,75 triliun dan tumbuh positif 11,69% (yoy).

Dari sisi belanja, kontribusi dari belanja pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan pemerintah daerah hingga periode Juni 2024. Pemerintah pusat berkontribusi sebesar 84,15%, sementara pemerintah daerah berkontribusi sebesar 15,85%. Dari sisi belanja pemerintah dan transfer, peran daerah telah mampu memberikan kontribusi sebesar 66,79% dan 29,64% dalam menggerakkan aktivitas perekonomian melalui kebijakan fiskal di Sumsel. Secara agregat, capaian ini membaik 14% apabila dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

#### Hingga triwulan II tahun 2024, defisit konsolidasian sebesar Rp10,58 triliun dimana tumbuh positif 27,89% (yoy).

Defisit didominasi oleh kontribusi pemerintah pusat yang mencapai 128,32%. Pembiayaan konsolidasian pada triwulan II tahun 2024 sebesar Rp493,82 miliar yang kontraksi-74,12% (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh lebih rendahnya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dari pemerintah daerah pada triwulan II tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.11. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Sumsel

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	2023 Konsolidasian	2024					Growth 2023-2024
		Konsolidasian	Pusat	Daerah	Kontribusi		
					Pusat	Daerah	
A. PENDAPATAN	10.911,69	15.435,26	8.929,36	6.505,89	57,85	42,15	41,46
I. Perpajakan	8.649,42	9.179,08	7.467,67	1.711,41	81,36	18,64	6,12
II, PNB	2.156,35	4.879,88	1.461,69	3.418,19	29,95	70,05	126,30
III, Hibah	105,92	1.376,30	-	1.376,30	0,00	100,00	1.199,34
B. BELANJA	23.951,17	26.751,68	8.313,17	18.438,51	31,08	68,92	11,69
I. Belanja Pemerintah	19.188,15	24.652,52	8.187,92	16.464,60	33,21	66,79	28,48
II. Transfer	4.763,02	2.099,16	125,25	1.973,91	5,97	94,03	-55,93
C. SURPLUS/DEFISIT	-8.276,46	-10.585,03	-13.582,90	2.997,86	128,32	-28,32	27,89
D. PEMBIAYAAN	1.908,37	493,82	-	493,82	0,00	100,00	-74,12
I. Penerimaan	2.070,27	560,25	-	560,25	0,00	100,00	-72,94
II. Pengeluaran	161,90	66,43	-	66,43	0,00	100,00	-58,97
E. SILPA (SIKPA)	-6.368,09	-10.091,21	-13.582,90	3.491,68	134,60	-34,60	58,47

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

---

# BAB III: PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH



## A. Pendahuluan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menjadi inisiatif strategis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya untuk memperkuat kualitas kebijakan desentralisasi fiskal yang telah berjalan lebih dari 18 tahun. Dalam UU HKPD tersebut, salah satu pilar utama adalah tentang Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah. Pilar tersebut berfokus untuk menyelaraskan antara kebijakan fiskal daerah dengan pemerintah pusat sehingga tercipta sinergi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara, yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selanjutnya, sebagai wujud dari upaya pemerintah dalam mengharmonisasikan belanja pemerintah pusat dan daerah, pada tahun 2023, Menteri Keuangan menetapkan *Standar Operating Procedure* (SOP) Link nomor 70 tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD. SOP tersebut memuat mekanisme Monev yang dilakukan oleh 3 (tiga) *Unit in Charge* (UIC) Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Anggaran (DJA) dan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) pada sisi perencanaan dan penganggaran, Ditjen Perbendaharaan (DJPb) c.q. Kanwil DJPb dari sisi pelaksanaan anggaran.

Secara khusus, dalam pelaksanaan SOP Link 70 Tahun 2023, Kanwil DJPb mendapatkan peran untuk mengawal pelaksanaan Belanja K/L yang mendukung Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik melalui aktivitas sebagai berikut:

1. *reviu kinerja realisasi anggaran dan capaian output harmonis*;
2. *analisis permasalahan harmonisasi belanja pemerintah pusat yang mendukung DAK Fisik di masing-masing wilayah*;
3. *identifikasi upaya harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah*.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, pada Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2024, Kanwil DJPb Provinsi Sumsel akan menyajikan data dan menjelaskan terkait gambaran kinerja, kendala dan tantangan, serta upaya harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di wilayah Sumsel.

## B. Kebijakan Penggunaan DAK Fisik 2024

### Nasional

Dalam RKP tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan 4 (empat) prioritas dari penggunaan DAK Fisik, yaitu

1. **pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem**, yang terdiri dari 2 (dua) tematik, yaitu,
  - a. *pengentasan pemukiman kumuh terpadu (bidang air minum, sanitasi, dan perumahan pemukiman)*;
  - b. *penguatan kawasan sentra produksi pangan pertanian, perikanan, dan hewani (bidang pertanian, irigasi, kelautan dan perikanan, dan jalan)*.

2. **penguatan daya saing usaha**, yang terdiri dari 2 (dua) tematik, yaitu
  - a. *penguatan destinasi pariwisata prioritas (bidang pariwisata, industri kecil dan menengah, UMKM, perdagangan, lingkungan hidup, dan jalan)*;
  - b. *pengembangan *food estate* (bidang pertanian, irigasi, kehutanan, dan jalan)*.
3. **peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk penurunan *stunting*) dan Pendidikan**, yang terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu Pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi;
4. **percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan daerah rendah karbon dan transisi energi**, yang terdiri dari 1 (satu) tematik dan 1 (satu) non tematik, yaitu:
  - a. *peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah Afirmasi (transportasi pedesaan, transportasi perairan, jalan, dan infrastruktur energi terbarukan)*;
  - b. *bidang jalan*.

### Regional Sumatera Selatan

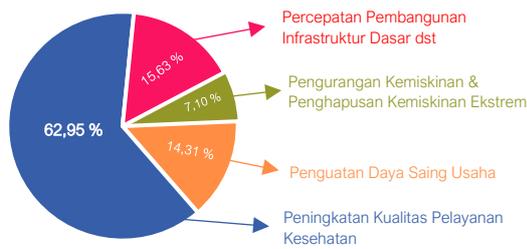
Sejalan dengan arah kebijakan nasional, rencana penggunaan DAK Fisik di wilayah Sumsel juga terdiri dari 4 (empat) prioritas yaitu

1. **pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem**, dengan tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan pertanian, perikanan, dan hewani (bidang pertanian, irigasi, kelautan dan perikanan, dan jalan);
2. **penguatan daya saing usaha**, yang terdiri dari 2 (dua) tematik, yaitu
  - a. *penguatan destinasi pariwisata prioritas (bidang jalan)*;
  - b. *pengembangan *food estate* (bidang pertanian, irigasi, kehutanan, dan jalan)*;
3. **peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk penurunan *stunting*) dan Pendidikan**, yang terdiri dari bidang Pendidikan, kesehatan, dan sanitasi;
4. **percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan daerah rendah karbon dan transisi energi**, dengan tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah Afirmasi (transportasi pedesaan, transportasi perairan, jalan, dan infrastruktur energi terbarukan) dan non tematik bidang jalan.

## C. Alokasi DAK Fisik Wilayah Sumsel

Pada tahun 2024, total pagu penyaluran anggaran DAK Fisik di wilayah Sumsel sebesar Rp1,43 triliun, turun 8,92% atau 1,57 triliun dibandingkan pagu anggaran tahun 2023. Namun, dari rencana kegiatan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Sumsel, alokasi anggaran DAK Fisik Tahun 2024 yang disepakati sebesar Rp1,42 triliun.

Grafik 3.1. Penggunaan Prioritas DAK Fisik Sumsel



sumber: Aplikasi OM SPAN TKD, 2024

Dilihat dari prioritas penggunaan, sebagian besar DAK Fisik Sumsel T.A. 2024 digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan yaitu mencapai Rp896,58 miliar atau 62,95% dari total alokasi anggaran. Paling rendah digunakan untuk pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp101,18 miliar atau 7,10% dari total alokasi anggaran

Tabel 3.1. Penggunaan DAK Fisik Sumsel T.A. 2024 Berdasarkan Bidang

Bidang	Alokasi (Rp Miliar)	Share
Pendidikan	566,01	39,74%
Jalan	422,18	29,64%
Kesehatan dan KB	329,52	23,14%
Pertanian	50,62	3,55%
Kelautan dan Perikanan	22,83	1,60%
Irigasi	18,92	1,33%
Transportasi Perdesaan	9,11	0,64%
Transportasi Perairan	2,65	0,19%
Pariwisata	1,30	0,09%
Sanitasi	1,05	0,07%
Kehutanan	0,10	0,01%

sumber: Aplikasi OM SPAN TKD, 2024

Berdasarkan bidang, alokasi DAK Fisik wilayah Sumsel T.A. 2024 terbesar pada bidang Pendidikan, Jalan, dan Kesehatan yaitu masing-masing Rp566,01 miliar (39,74%), Rp422,18 miliar (29,64%), dan Rp329,62 miliar (23,14%).

Tabel 3.2. Penggunaan DAK Fisik Sumsel T.A. 2024 Berdasarkan Tematik

Tematik	Alokasi (Rp Miliar)	Share
Pengembangan <i>food estate</i>	187,35 M	13,15%
Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	101,18 M	7,10%
Peningkatan Konektivitas & Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	53,74 M	3,77%
Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	16,53 M	1,16%

sumber: Aplikasi OM SPAN TKD, 2024

Selanjutnya, jika dilihat dari prioritas penggunaan berdasarkan tematik, alokasi terbesar berada pada tema pengembangan *food estate* yaitu sebesar Rp187,35 miliar atau memiliki *share* 13,15% dari total alokasi DAK Fisik T.A. 2024.

## D. Alokasi Belanja K/L RO Harmonis Wilayah Sumsel yang Mendukung DAK Fisik pada 6 Bidang

Alokasi Belanja K/L RO Harmonis yang mendukung DAK Fisik di wilayah Sumsel T.A. 2024 mencapai Rp2,68 triliun. Alokasi tersebut terbagi dalam 6 bidang dan 1 (satu) tematik, yang terdapat pada 4 (empat) K/L, 23 Satuan Kerja, dan 111 Rincian Output (RO). Secara keseluruhan, alokasi Belanja K/L (RO) Harmonis tersebut porsinya mencapai 12,53% dari total alokasi belanja K/L di wilayah Sumsel.

Secara keseluruhan, alokasi terbesar pada Kementerian PUPR sebesar 2,53 triliun atau 94,32% dari total Belanja K/L (RO) Harmonis yang mendukung DAK Fisik. Selanjutnya, pada Kementerian Pendidikan sebesar Rp127,95 miliar (porsi 4,76%), Kementerian Pertanian Rp20,38 miliar (porsi 0,76%), dan Kementerian Kesehatan Rp4,14 miliar (porsi 0,15%).

### Bidang Pendidikan

Alokasi Belanja K/L RO Harmonis Bidang Pendidikan di wilayah Sumsel T.A. 2024 sebesar Rp168,60 miliar, atau 6,28% dari total alokasi. Alokasi tersebut terdapat pada 2 (dua) Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian PUPR.

Pada Kementerian Pendidikan, alokasi Belanja K/L RO Harmonis tahun 2024 mencapai Rp127,95 miliar atau 75,89% dari total alokasi di bidang pendidikan. Alokasi tersebut tersebar pada 3 (tiga) Satuan Kerja dan memiliki 7 RO. Satuan Kerja yang dimaksud, yaitu

- Balai Bahasa Sumsel (Rp738,57 juta);
- Balai Guru Penggerak Prov. Sumsel (Rp112,64 miliar);
- Balai Penjamin Mutu Pendidikan Prov. Sumsel (Rp14,57 miliar)

Pada Kementerian PUPR, alokasi Belanja K/L RO Harmonis tahun 2024 sebesar Rp40,65 miliar atau 24,11% dari total alokasi di bidang pendidikan. Alokasi tersebut terdapat pada 1 (satu) Satuan Kerja yaitu Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Prov. Sumsel dengan 1 (satu) RO.

### Bidang Kesehatan dan KB

Alokasi Belanja K/L RO Harmonis Bidang Kesehatan dan KB di wilayah Sumsel T.A. 2024 sebesar Rp4,14 miliar, atau 0,15% dari total alokasi. Alokasi tersebut terdapat pada Kementerian Kesehatan yang tersebar pada 2 (dua) Satuan Kerja dan memiliki 23 RO. Satuan Kerja tersebut adalah

- Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang (Rp1,51 miliar);
- Dinas Kesehatan Sumsel (Rp2,63 miliar)

### Bidang Jalan

Mayoritas alokasi Belanja K/L RO Harmonis terdapat pada Bidang Jalan yang memiliki alokasi pada T.A. 2024 sebesar Rp2,35 triliun atau memiliki porsi 87,75% dari total alokasi. Semua alokasi tersebut terdapat pada Kementerian PUPR yang terbagi pada 6 (enam) satuan kerja dan 47 rincian output. Satuan Kerja yang dimaksud adalah

- Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Prov. Sumsel (Rp1,28 triliun);
- Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Prov. Sumsel (Rp374,18 miliar);

**Tabel 3.3. Alokasi Belanja K/L (RO) Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik Wilayah Sumsel T.A. 2024**

No	Bidang	K/L	Pagu (Rp miliar)	Jumlah Satker	Jumlah RO
1	Pendidikan	Kementerian PUPR	40,65	1	1
		Kementerian Pendidikan	127,95	3	7
2	Kesehatan dan KB	Kementerian Kesehatan	4,14	2	23
3	Jalan	Kementerian PUPR	2.357,00	6	47
4	Pertanian	Kementerian Pertanian	20,38	4	21
5	Air Minum	Kementerian PUPR	60,04	5	8
6	Sanitasi	Kementerian PUPR	75,81	2	4
<b>Total</b>			<b>2.685,98</b>	<b>23</b>	<b>111</b>

Sumber: SINTESA DJPb, 2024

3. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Sumsel (Rp275,58 miliar);
4. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel (Rp223,62 miliar);
5. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Sumsel (Rp186,51 miliar);
6. Dinas PU Bina Marga Prov. Sumsel (Rp8,12 miliar)

### Bidang Pertanian

Alokasi Belanja K/L RO Harmonis Bidang Pertanian di wilayah Sumsel T.A. 2024 sebesar Rp20,38 miliar, atau 0,76% dari total alokasi. Alokasi tersebut terdapat pada Kementerian Pertanian yang terbesar pada 4 (empat) Satuan Kerja yang memiliki 21 RO. Satuan Kerja tersebut adalah

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel (Rp11,82 miliar);
2. Dinas Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa (Rp3,36 miliar);
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel (Rp3,34 miliar);
4. Dinas Perkebunan Prov. Sumsel (Rp1,86 miliar)

### Bidang Air Minum

Alokasi Belanja K/L RO Harmonis Bidang Air Minum di wilayah Sumsel T.A. 2024 sebesar Rp60,04 miliar, atau 2,24% dari total alokasi. Alokasi tersebut terdapat pada Kementerian PUPR yang terbesar pada 5 (lima) Satuan Kerja yang memiliki 8 (delapan) RO. Satuan Kerja dimaksud adalah:

1. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (Rp2,50 miliar);
2. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel (Rp1,77 miliar);
3. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VIII (Rp2,32 miliar);
4. Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prov. Sumsel (19,58 miliar);
5. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Prov. Sumsel (Rp34,87 miliar).

### Bidang Sanitasi

Alokasi Belanja K/L RO Harmonis Bidang Sanitasi di wilayah Sumsel T.A. 2024 sebesar Rp75,81 miliar, atau 2,82% dari total alokasi. Alokasi tersebut tersebar 2 (dua) Satuan Kerja dan memiliki 4 RO. Satuan Kerja tersebut adalah

1. Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumsel (Rp3,85 miliar);
2. Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prov. Sumsel (Rp71,96 miliar).

### E. Kinerja Realisasi Belanja K/L RO Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik Wilayah Sumsel

Secara total, sampai dengan akhir Juni 2024, Belanja K/L RO Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik Wilayah Sumsel telah terealisasi sebesar Rp1,22 triliun atau 45,28% dari total alokasi. Sementara anggaran DAK Fisik wilayah Sumsel baru terealisasi sebesar Rp66,85 miliar atau 13,79% dari total alokasi DAK Fisik T.A. 2024. Rendahnya realisasi DAK Fisik tersebut disebabkan oleh terlambatnya regulasi terkait

**Tabel 3.4. Realisasi Belanja K/L RO Harmonis Per Bidang**

penyaluran DAK Fisik T.A. 2024 yang baru ditetapkan pada bulan April 2024.

Bidang	Alokasi	Realisasi	%
Air Minum	60,04	12,13	20,19
Jalan	2,357,00	1,137,02	48,24
Kesehatan	4,14	1,25	30,20
Pendidikan	168,60	54,85	32,53
Sanitasi	20,38	10,56	51,83
Sanitasi	75,81	0,31	0,41
<b>Total</b>	<b>2.685,97</b>	<b>1.216,11</b>	<b>45,28</b>

Secara nominal, realisasi Belanja K/L (RO) Harmonis terbesar disumbang oleh bidang Jalan yang terealisasi sebesar Rp1,14 triliun. Sementara yang terendah adalah bidang Sanitasi yang sebesar Rp309,95 miliar. Menurut K/L, sumbangan terbesar berasal dari Kementerian PUPR yaitu sebesar Rp1,17 triliun.

### F. Capaian RO Utama pada Belanja K/L RO Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik

#### Bidang Pendidikan

Pagu tertinggi pada Belanja K/L RO Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan wilayah Sumsel tahun 2024 adalah RO Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru pada Satuan

Kerja BGP Prov. Sumsel dengan alokasi anggaran sebesar Rp89,69 miliar. Sampai dengan akhir Juni 2024, anggaran RO tersebut tercatat baru terealisasi sebesar Rp14,74 miliar atau 16,44% dari alokasi. Meskipun realisasi anggaran tergolong rendah, Capaian Output RO tersebut telah terealisasi sebesar 48,12%. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja BGP Prov. Sumsel efisien dan *on track* dalam pelaksanaan RO tersebut.

Pagu tertinggi kedua yaitu RO Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prov. Sumsel dengan total alokasi tahun 2024 sebesar Rp40,65 miliar. Hingga akhir Juni 2024, realisasi anggaran pada RO tersebut mencapai Rp26,65 miliar atau 65,57% dari alokasi. Selain itu, Capaian Output pada RO tersebut juga telah terealisasi sebesar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prov. Sumsel telah *on track* dalam melaksanakan RO.

Pagu tertinggi ketiga adalah RO Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mendapat Pendampingan Pembelajaran pada Satuan Kerja BGP Prov. Sumsel dengan alokasi sebesar Rp15,10 miliar. Sampai dengan akhir Juni 2024, anggaran RO tersebut telah terealisasi sebesar Rp8,22 miliar atau 65,57% dari alokasi. Capaian Output pada RO tersebut juga telah terealisasi dengan baik yaitu sebesar 66,75%.

### Bidang Kesehatan

Pagu tertinggi pada Belanja K/L RO Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan wilayah Sumsel tahun 2024 adalah RO Tenaga Kesehatan yang dilatih Terkait Manajemen dan Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Satuan Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang, dengan total alokasi sebesar Rp1,51 miliar. Sampai dengan akhir Juni 2024, realisasi anggaran pada RO tersebut sebesar Rp338,00 juta atau baru mencapai 22,42% dari alokasi. Selain itu, Capaian Output RO tersebut juga baru mencapai 29,03%. Masih rendahnya realisasi tersebut karena terdapat kegiatan pada RO tersebut bersumber dari dana PNPB, yang sampai dengan akhir Juni 2024 belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu petunjuk teknis penggunaan.

Pagu tertinggi kedua dan ketiga terdapat pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan, yaitu RO Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dengan total alokasi sebesar Rp512,05 juta, dan RO Tenaga Kesehatan yang dilatih TOT kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging di FKTP dengan total alokasi sebesar Rp286,72 miliar. Hingga akhir Juni 2024, baik anggaran maupun Capaian Output belum ada realisasi pada kedua RO tersebut belum ada realisasi karena kegiatan terkait baru akan dilaksanakan pada Semester II 2024.

### Bidang Jalan

Pagu tertinggi pada Belanja K/L RO Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Jalan wilayah Sumsel tahun 2024 adalah RO Pembangunan Jalan Bebas Hambatan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Prov. Sumsel, dengan total alokasi sebesar Rp1,29 triliun. Sampai dengan akhir Juni 2024, realisasi anggaran RO tersebut sebesar Rp806,91 miliar atau 62,60% dari alokasi. Capaian Output RO tersebut juga telah jauh melampaui target volume yang ditetapkan.

Pagu tertinggi kedua adalah RO Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU-AP) Jalintim Sumsel pada Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel, dengan alokasi sebesar Rp223,62 miliar. Hingga akhir Juni 2024, realisasi anggaran RO tersebut sebesar Rp110,36 miliar atau 49,35% dari alokasi. Namun Capaian Output RO masih belum ada realisasi.

Pagu tertinggi ketiga adalah RO Jalan Strategis (ProPN) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Sumsel, dengan alokasi sebesar Rp172,04 miliar. Hingga akhir Juni 2024, realisasi anggaran RO tersebut sebesar Rp44,87 miliar atau 26,08% dari alokasi. Dan Capaian Output RO tersebut juga baru terealisasi sebesar 22,54%.

### Bidang Air Minum

Pagu tertinggi pada Belanja K/L RO Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Air Minum wilayah Sumsel tahun 2024 adalah RO Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prov. Sumsel, dengan alokasi sebesar Rp18,58 miliar. Sampai dengan Juni 2024, realisasi anggaran RO sebesar Rp3,44 miliar atau 18,51% dari total alokasi. Sementara Capaian Output RO baru terealisasi sebesar 0,1%. Masih rendahnya realisasi RO tersebut dipengaruhi oleh proses pelaksanaan yang memakan waktu cukup lama sejak penerbitan SK Menteri hingga survei lapangan.

Pagu tertinggi kedua adalah RO Jaringan Air Baku yang Direhabilitasi pada Satuan kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Prov. Sumsel, dengan total alokasi sebesar Rp16,17 miliar. Hingga akhir Juni 2024, realisasi anggaran RO sebesar Rp833,82 juta atau baru 5,16% dari alokasi. Namun untuk Capaian Output telah mencapai 38,66%. Rendahnya realisasi anggaran pada RO tersebut disebabkan terdapat kendala pekerjaan Rehabilitasi *Intake* dan kendala akses yang sulit pada pekerjaan konstruksi rehab Jaringan Pagarjati.

Pagu tertinggi ketiga adalah RO Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Embung Universitas Sriwijaya yang Dibangun pada Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Prov. Sumsel, dengan total alokasi sebesar Rp10 miliar. Sampai dengan akhir Juni 2024, realisasi anggaran RO sebesar Rp3,57 miliar atau 35,67% dari alokasi. Capaian Output RO telah mencapai 66,15% dari target volume. Secara umum, pelaksanaan RO tersebut telah sesuai dengan rencana kegiatan.

### Bidang Sanitasi

Belanja K/L RO Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Sanitasi wilayah Sumsel tahun 2024 hanya memiliki 3 (tiga) RO yang terdapat pada Satuan Kerja Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan. Ketiga RO tersebut adalah RO Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (Rp68,75 miliar), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota (Rp5,51 miliar), dan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi (Rp1,55 miliar). Dari Ketiga RO

tersebut, sampai dengan akhir Juni 2024 baru RO Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi yang memiliki realisasi yaitu sebesar Rp309,95 miliar atau 20% dari alokasi, dengan realisasi capaian output mencapai 47,06%.

Rendahnya realisasi RO pada bidang sanitasi disebabkan terdapat blokir anggaran Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk TPST Sementul dengan pagu Rp66,45M dan pekerjaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota yang seluruhnya masih terblokir sebesar Rp5,51M karena dokumen reviu BPKP yang belum dilengkapi.

### Bidang Pertanian

Pagu tertinggi pada Belanja K/L RO Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian wilayah Sumsel tahun 2024 adalah RO Area Penyaluran Benih Padi pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Sumsel dengan alokasi sebesar Rp4,67 miliar. Hingga akhir Juni 2024, realisasi anggaran RO sebesar Rp4,53 miliar atau mencapai 96,95% dari alokasi. dan capaian output telah tercapai 100%.

Pagu tertinggi kedua adalah RO Area Penyaluran Benih Jagung yang juga pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Sumsel dengan alokasi sebesar Rp4,50 miliar. Hingga akhir Juni 2024, realisasi anggaran sebesar Rp1,34 miliar atau mencapai 29,87% dari alokasi dan capaian output terealisasi 32%. Masih rendahnya realisasi dipengaruhi oleh proses pencairan dana yang menunggu proses serah terima barang dengan petani.

Pagu tertinggi ketiga adalah RO Layanan Kesehatan Hewan pada Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Prov. Sumsel dengan alokasi sebesar Rp2,50 miliar. Sampai dengan akhir Juni 2024, realisasi anggaran RO sebesar Rp2,25 miliar atau telah mencapai 90% dari alokasi. Realisasi capaian output telah mencapai target 100%.

### F. Kendala dan Tantangan

Dalam pelaksanaan Belanja K/L RO Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik di wilayah Sumsel tahun 2024, terdapat beberapa kendala dan/atau tantangan yang dihadapi, yaitu

1. Adanya blokir anggaran yang menyebabkan Satuan Kerja belum dapat melaksanakan kegiatan;
2. Faktor eksternal seperti lokasi yang sulit untuk diakses sehingga menyebabkan pengangkutan material harus dilakukan secara konvensional, banjir yang berdampak pada perubahan rencana dan anggaran pekerjaan;
3. Proses pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama;
4. Untuk pembangunan infrastruktur, terdapat tantangan dalam pembebasan lahan yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan fisik tertunda;
5. Terdapat kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu regulasi dari pusat.

Sementara itu, dalam pelaksanaan DAK Fisik di wilayah Sumsel tahun 2024, terdapat beberapa kendala dan/atau tantangan yang dihadapi, yaitu

1. Sampai dengan akhir Juni 2024 realisasi DAK Fisik masih sangat rendah karena aturan teknis terkait DAK Fisik Tahun 2024 baru terbit di bulan April 2024.
2. Masih ditemukan deviasi antara Pagu, RK dan Kontrak kegiatan DAK Fisik akibat pemda belum dapat memenuhi persyaratan teknis K/L sehingga alokasi tersebut tidak disetujui.
3. Beberapa OPD teridentifikasi terlambat melakukan proses pengadaan yang disebabkan adanya faktor belum menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan adanya proses pergeseran APBD akibat penerapan Kebijakan DAU yang ditentukan penggunaannya
4. Pemahaman Pemda terkait ketentuan teknis penyampaian dokumen masih belum komprehensif.

### G. Upaya Sinkronisasi Satuan Kerja dan Pemda

Untuk memastikan program dan kegiatan Belanja K/L dengan DAK Fisik dapat berjalan secara harmonis, Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan beberapa hal:

1. Tahap perencanaan, Satuan Kerja Pemerintah Pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, Satker Kementerian PUPR berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah dalam penentuan lokasi yang hendak dilakukan pembangunan;
2. Tahap Pelaksanaan, Satuan Kerja Pemerintah Pusat, dalam hal upaya peningkatan kapasitas Guru, Satuan Kerja Kementerian Pendidikan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah terkait penentuan peserta guru yang akan ditugaskan;

Tabel 3.4. Capaian RO Belanja K/L (RO) Harmonis Yang Mendukung DAK Fisik Wilayah Sumsel T.A. 2024 dengan Pagu Terbesar

No	Nama RO	Satuan	Pagu (Rp M)	Realisasi (Rp M)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
<b>Bidang Pendidikan</b>								
1	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	Orang	89,69	14,74	16,44%	4.476	2.154	48,12%
2	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	unit	40,65	26,65	65,57%	20	11	55,00%
3	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	Orang	15,10	8,22	54,44%	1.988	1.327	66,75%
<b>Bidang Kesehatan</b>								
1	Tenaga Kesehatan yang dilatih terkait Manajemen dan Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LP-2)	Orang	1,51	0,34	22,42%	310	90	29,03%
2	Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Upaya Perbaikan Status Gizi (LP - 4)	Orang	0,51	0,00	0,00%	52	-	0,00%
3	Tenaga Kesehatan yang dilatih TOT kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging di FKTP (SDM-23)	Orang	0,29	0,00	0,00%	30	-	0,00%
<b>Bidang Jalan</b>								
1	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	km	1.289,00	806,91	62,60%	8,27	351,65	4250,06%
2	Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU - AP) Jalintim Sumsel	km	223,62	110,36	49,35%	0,01	-	0,00%
3	Jalan Strategis (ProPN)	km	172,04	44,87	26,08%	1.073,60	242,03	22,54%
<b>Bidang Air Minum</b>								

No	Nama RO	Satuan	Pagu (Rp M)	Realisasi (Rp M)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
1	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	SR	18,58	3,44	18,51%	4.800,00	4,99	0,10%
2	Jaringan air baku yang direhabilitasi	Km	16,17	0,83	5,16%	0,77	0,29	37,66%
3	Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Embung Universitas Sriwijaya yang dibangun	Km	10,00	3,57	35,67%	1,30	0,86	66,15%
<b>Bidang Sanitasi</b>								
1	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	KK	66,45	0,00	0,00%	10.000	-	0.00%
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	KK	5,51	0,00	0,00%	20	-	0.00%
3	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	KK	2,30	0,00	0,00%	1	-	0.00%
<b>Bidang Pertanian</b>								
1	Area penyaluran benih padi	Hektar	4,67	4,53	96,95%	13.000	13.000	100.00%
2	Area penyaluran benih jagung	Hektar	4,50	1,34	29,87%	5.000	1.600	32.00%
3	Layanan Kesehatan Hewan	layanan	2,50	2,25	90,00%	100.000	100.000	100.00%

Sumber: SINTESA DJPb, 2024

---

# BAB IV: ANALISIS TEMATIK



## A. Perubahan Iklim

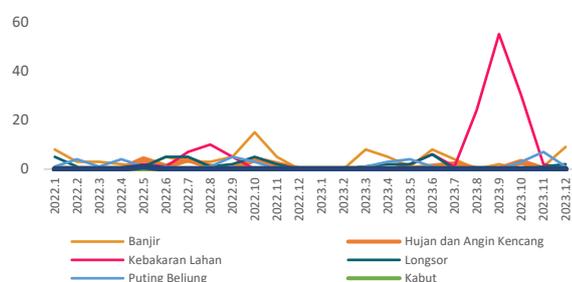
Perubahan iklim merupakan topik yang semakin banyak dibahas dari waktu ke waktu karena fenomena ini sudah terjadi di seluruh belahan bumi. Iklim mengalami perubahan sebagai akibat aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan perubahan komposisi pada atmosfer secara global. Meningkatnya emisi menimbulkan efek gas rumah kaca yang menghambat pelepasan panas ke luar atmosfer dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Berdasarkan Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2023, kegiatan manusia telah menyebabkan kenaikan suhu global saat ini sekitar 1,1 derajat celsius dan diperkirakan akan naik sekitar 1,5 derajat Celsius pada tahun 2030-2050. Pemanasan global ini menyebabkan perubahan jangka panjang pada sistem iklim dan meningkatkan risiko bencana seperti meningkatnya intensitas curah hujan sehingga terjadi banjir (fenomena La Nina) dan sebaliknya yaitu kemarau panjang dan kekeringan (fenomena El Nino).

Sumsel pun telah merasakan fenomena ini. Berdasarkan data Stasiun Klimatologi Sumsel, suhu maksimum tertinggi pada tahun 2023 tercatat sebesar 37,4 derajat celsius, yang merupakan suhu tertinggi dalam tiga puluh tahun terakhir. Suhu yang tinggi ini merupakan salah satu pemicu timbulnya titik api (*hotspot*) yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karhutla di Sumsel sebagian besar terjadi pada lahan gambut. Berdasarkan data dari Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Sumsel, luasan lahan gambut di Sumsel saat ini tersisa 1,7 juta hektare atau 7,55% dari total luas lahan gambut Indonesia yang mencapai 13,43 juta hektare (gambut tropis terluas di dunia). Lahan gambut merupakan sistem lahan basah unik dan penyerap karbon yang signifikan. Keunikan ekosistem gambut ini berperan penting dalam pengendalian perubahan iklim sehingga harus dijaga kelestariannya.

Berdasarkan Data Kejadian Bencana Hidrometeorologis Sumsel, dalam kurun waktu 2022-2023, bencana banjir dan kebakaran lahan merupakan bencana yang paling banyak terjadi di Sumsel sebagaimana terlihat pada grafik 4.1.

Sementara itu, dari grafik 4.1. juga terlihat bahwa bencana kebakaran terbanyak terjadi pada bulan Agustus 2022 dan September 2023. Hal tersebut selaras dengan rendahnya curah hujan dan frekuensi hari hujan pada bulan tersebut. Sebaliknya persentase penyinaran matahari di bulan tersebut menunjukkan angka persentase yang tinggi.

Grafik 4.1. Sebaran Bencana Alam di Sumsel per Bulan (2022-2023)

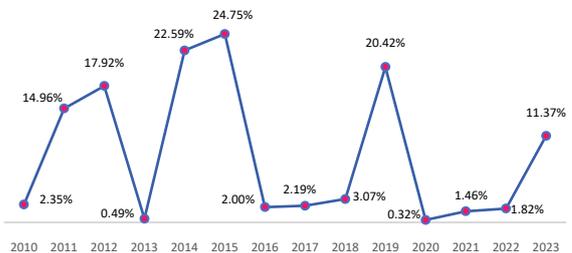


sumber: [www.staklim-sumsel.bmkg.go.id](http://www.staklim-sumsel.bmkg.go.id)

Data terkini berdasarkan Geoportal Data Bencana Indonesia per 3 Agustus 2024, tercatat sudah terjadi 51 kejadian bencana di Sumsel (periode 1 Januari 2024 s.d. 3 Agustus 2024) dengan rincian 40 kejadian banjir, 8 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 2 kejadian cuaca ekstrem, dan 1

kejadian tanah longsor. Kejadian bencana banjir cenderung merata di Sumsel, didorong oleh curah hujan dan frekuensi hujan yang cenderung sering di setiap bulannya (kategori deras curah hujan 50mm/hari). Jumlah turunnya hujan per bulan rata-rata sebanyak 17 hari dan untuk hujan deras rata-rata sebanyak 5 hari perbulan.

Grafik 4.2. Persentase Karhutla Sumsel Terhadap Seluruh Indonesia



sumber: [sipongi.menlhk.go.id](http://sipongi.menlhk.go.id) (data diolah)

Karhutla yang terjadi di Sumsel dalam kurun waktu 2010 s.d. 2023 menunjukkan fluktuasi sebagaimana tergambar pada grafik 4.2. Karhutla di Sumsel yang terluas terjadi pada tahun 2014-2015 dengan persentase lahan terbakar di atas 20% dari total karhutla di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016 s.d.2022 trend karhutla menurun, dan mulai meningkat lagi pada tahun 2023. Angka karhutla tersebut termasuk kebakaran yang terjadi pada lahan gambut. Lahan gambut tersebut berada di kawasan enam kabupaten yakni Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Muara Enim dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Lahan gambut yang berada di Kab. OKI merupakan yang terluas di Sumsel, yaitu sekitar 769 ribu hectare.

Berkurangnya luasan lahan gambut Sumsel selain akibat kebakaran pada setiap musim kemarau, juga karena pengelolaan dan alih fungsi lahan gambut yang tidak tepat, serta deforestasi. Deforestasi dan degradasi hutan merupakan penyebab peningkatan emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) yang signifikan. Hutan dan lahan gambut secara alami mengikat CO<sub>2</sub> dari atmosfer dan melalui proses fotosintesis mengubahnya menjadi biomassa. Dengan siklus alami ini hutan dan lahan gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar, namun deforestasi mengakibatkan CO<sub>2</sub> lepas ke atmosfer sehingga mengakibatkan pemanasan global.

Menurut kaidah konservasi, sumber daya alam tetap dapat dikelola namun dengan mengombinasikan upaya perlindungan, pemanfaatan dan pelestariannya secara terpadu. Maka dalam konteks ini, hutan dan lahan gambut selain merupakan ekosistem yang perlu dilindungi, juga merupakan potensi yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dengan tetap memerhatikan prinsip-prinsip kelestarian.

## B. Sektor yang Terdampak Perubahan Iklim

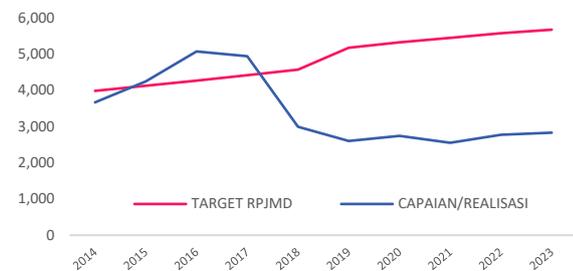
Berdasarkan Indonesia Climate Change Sektoral Roadmap (ICCSR) Sektor Pertanian Tahun 2010, sektor pertanian terutama sub sektor tanaman pangan adalah yang paling rentan terhadap perubahan iklim karena ketergantungan pada unsur iklim seperti suhu, curah hujan, kelembaban, dan sinar matahari. Lebih lanjut diungkapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pangan tahun 2011 bahwa pengaruh perubahan iklim terhadap sektor pertanian bersifat multidimensi, mulai dari sumber daya, infrastruktur pertanian, sistem produksi pertanian, aspek ketahanan dan

kemandirian pangan, serta kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Hasil penelitian Handoko, et.al. (2008), menyebutkan bahwa perubahan iklim antara lain menyebabkan penurunan produksi dan produktivitas tanaman pangan, penurunan GDP sektor pertanian serta fluktuasi harga produk pertanian Selain berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi tanaman pangan, perubahan iklim juga berpengaruh tidak langsung terhadap penurunan produktivitas tanaman pangan (Hadi et.al.2000). Hasil kajian Santoso (2016) juga mengungkapkan hasil bahwa perubahan iklim memiliki pengaruh negatif terhadap produksi tanaman pangan. Ruminta et.al. (2018) mengungkapkan dampak perubahan iklim terhadap pertanian di Indonesia, terutama penurunan produksi padi di daerah berisiko tinggi seperti Sumatera Selatan.

Dalam Laporan FAO Tahun 2023 *The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security 2023-Avoiding and reducing losses through investment in resilience*, disebutkan bahwa dari data 60 negara selama tahun 2007 – 2022 rata-rata kerugian pada sektor pertanian mencapai 23% dari total kerugian pada seluruh sektor produksi akibat bencana termasuk yang diakibatkan perubahan iklim.

Grafik 4.3. Target dan Capaian Produksi Padi Smsel



sumber: RPJMD Sumsel, Bappeda Prov. Sumsel

Sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim karena dapat mempengaruhi pola tanam, waktu tanam, produksi, dan kualitas hasil. Berdasarkan data BPS dan Dinas Pertanian dalam RPJMD Sumsel, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, capaian produksi padi hampir selalu berada di bawah target. Walau masih dalam kategori aman untuk mencukupi kebutuhan lokal namun risiko penurunan produksi akibat fenomena iklim perlu diantisipasi agar ketahanan pangan dapat terjaga.

Provinsi Sumsel merupakan salah satu lumbung pangan di Indonesia, dengan jumlah produksi padi terbesar kelima di Indonesia pada 2023, sehingga ketidakstabilan produksi pangan akan berpengaruh pada produksi pangan secara nasional. Oleh sebab itu pembahasan dalam kajian ini akan lebih banyak ke sektor pertanian.

Selain sebagai sektor yang terdampak, pertanian juga merupakan salah satu sektor penyumbang emisi yang utamanya berasal dari aktivitas perubahan penggunaan lahan dan pengelolaan lahan pertanian antara lain penggunaan pupuk khususnya urea. Aktivitas perubahan penggunaan lahan ini menyebabkan dampak positif dan negatif terhadap sosial, ekopnomi, maupun lingkungan. Dampak positifnya antara lain adalah peningkatan pendapatan masyarakat, tersedianya lapangan pekerjaan. Sedangkan dampak negatifnya antara lain berkurangnya keanekaragaman hayati/biodiversitas dan kerusakan lingkungan.

Adapun beberapa faktor pemicu alih guna lahan di Sumsel di antaranya adalah program swasembada pangan melalui ekspansi lahan pertanian, pembangunan infrastruktur jalan

dan bangunan, kebutuhan akan kayu dan lahan untuk perkebunan melalui ekspansi perkebunan/ deforestasi. Terjadinya alih guna lahan ini membawa berbagai konsekuensi terhadap lingkungan/ekologis, utamanya yaitu emisi GRK.

Analisa *trade-off* antara sektor pertanian dengan perubahan iklim perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang optimal dan realistis. Di satu sisi, sektor pertanian merupakan tulang punggung ketahanan pangan global, di sisi lain sector pertanian juga menjadi kontributor terhadap perubahan iklim.

### C. PDRB Sektor Pertanian

Distribusi PDRB Sumsel tahun 2013-2023 menunjukkan tren peningkatan pada sektor pertambangan dan perdagangan, sementara pada sektor pertanian dan konstruksi terjadi tren penurunan. Pada tahun 2013-2014, distribusi PDRB Sumsel dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor terbesar kedua setelah sektor pertambangan. Namun pada tahun 2015-2016 posisi tersebut digantikan oleh sektor industri pengolahan, bahkan pada tahun 2017 kontribusi tertinggi berasal dari industri pengolahan, demikian juga pada tahun 2020. Dalam kurun waktu 2015-2022, distribusi PDRB dari sektor pertanian menjadi yang terbesar ketiga. Pada tahun 2023 distribusi PDRB dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan semakin menurun sebagaimana terlihat pada Grafik 4.4.

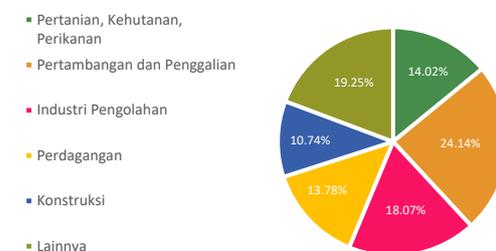
Grafik 4.4. Distribusi PDRB Sumsel 2013-2023 (%)



sumber: BPS Provinsi Sumsel

Struktur PDRB Sumsel triwulan II tahun 2024 masih didominasi oleh tiga sektor terbesar yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 24,14%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 18,07%, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,02% sebagaimana tergambar pada grafik 4.5. Peranan ketiga sektor tersebut mencapai 56,23%.

Grafik 4.5. PDRB Lapangan Usaha Sumsel Tw. II 2024



sumber: BPS Provinsi Sumsel

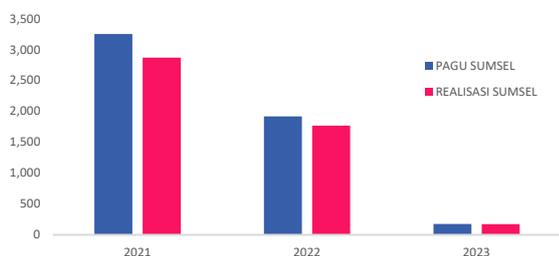
Dari 17 Kabupaten/Kota di Sumsel, kontribusi sektor pertanian yang terbesar berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Rawas Utara (Muratara), dengan kontribusi lebih dari 40%. Kontributor lainnya dengan distribusi lebih dari 25% berada pada Kab. Musi Rawas, Banyuasin, Ogan Komering Ulu

Selatan (OKUS), Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), dan Kab. Empat Lawang. Kontribusi sektor pertanian yang terkecil berasal dari Kota Palembang, yaitu di bawah 1%.

#### D. Analisis Belanja Terkait Perubahan Iklim

Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menghadapi perubahan iklim, salah satunya adalah melalui penandaan anggaran perubahan iklim (*climate budget tagging*). Hal ini dilakukan untuk memetakan dukungan APBN melalui identifikasi rincian output yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kementerian/Lembaga (K/L) diharapkan dapat menentukan rincian output yang tepat sehingga dapat menjadi salah satu referensi dalam memastikan efektivitas belanja serta bahan evaluasi dan formulasi kebijakan perubahan iklim yang lebih baik. Data pagu dan realisasi belanja tematik perubahan iklim tahun 2021 s.d. 2023 tergambar pada grafik 4.6 berikut.

Grafik 4.6. Pagu dan Realisasi Belanja Tematik Perubahan Iklim (Rp miliar)



sumber: sintesa.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data dari *sharepoint* Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, untuk wilayah Sumsel terdapat alokasi pagu anggaran perubahan iklim pada tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun untuk

7 KL dengan realisasi mencapai Rp2,8 triliun (88,22%), selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga hanya teralokasi sebesar Rp1,9 triliun untuk 6 KL dengan realisasi mencapai Rp1,7 triliun (92,09%). Pada tahun 2023 pagu belanja KL yang tertagging perubahan iklim menurun sangat drastis menjadi hanya sebesar Rp176,3 milyar dengan realisasi mencapai Rp174,6 miliar (99,04%). Alokasi yang terbesar berada pada Kementerian PUPR (BA 033) yang mendapat porsi lebih dari 80% total pagu dalam kurun waktu tahun 2021 s.d. 2023. Sedangkan alokasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK/ BA 029) pada tahun 2021 hanya 4,51% dari total pagu, tahun 2022 sebesar 5,43% dari total pagu, dan tahun 2023 hanya sebesar 2,33% dari total pagu. Untuk Kementerian Pertanian (BA 018) hanya mendapat alokasi di bawah 1% dari total pagu pada tahun 2021 dan 2022 serta 5,94% dari total pagu pada tahun 2023. Alokasi anggaran pada beberapa K/L lainnya mendapatkan porsi yang lebih sedikit lagi. Data alokasi anggaran perubahan iklim tahun 2021 s.d. 2024 berdasarkan aplikasi sintesa tersaji pada tabel 4.1.

Dari data di tabel tersebut, pada tahun 2021 s.d. 2024 alokasi anggaran perubahan iklim terbesar di Sumsel terdapat pada Kementerian PUPR (BA 033) dan pagu yang terbesar pada program ketahanan sumber daya air dengan output antara lain prasarana bidang sumber daya air dan irigasi. Output ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan antara lain pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang sampai dengan saat ini masih dalam pengerjaan; pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan non-padi; pengendalian banjir Sungai Bendung, Sungai Kedukan, Sungai Kelekar, Sungai Lambidaro-Sekanak, serta Sungai Musi; Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana; serta penyelenggaraan sanitasi yang

Tabel 4.1. Pagu K/L Tematik Perubahan Iklim (Rp Miliar)

Program Kementerian/Lembaga	2021	2022	2023	2024
<b>Kementerian Pertanian</b>	<b>27.16</b>	<b>18.56</b>	<b>10.47</b>	<b>34.38</b>
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	26.99	17.72	10.47	34.38
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	0.17	0.84		
<b>Kementerian Perhubungan</b>	<b>364.45</b>	<b>239.35</b>	<b>12.06</b>	<b>854.09</b>
Program Infrastruktur Konektivitas	364.45	239.35	12.06	854.09
<b>Kementerian Kesehatan</b>		<b>0.44</b>		
Program Kesehatan Masyarakat		0.44		
<b>Kementerian Sosial</b>	<b>0.90</b>			
Program Perlindungan Sosial	0.90			
<b>Kementerian Kehutanan</b>	<b>146.82</b>	<b>104.28</b>	<b>4.12</b>	<b>36.02</b>
Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	45.60	37.41	0.55	27.39
Program Kualitas Lingkungan Hidup	23.65	8.74	0.18	1.24
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	77.57	58.13	3.39	7.39
<b>Kementerian Kelautan dan Perikanan</b>	<b>2.73</b>			
Program Kualitas Lingkungan Hidup	-			
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2.73			
<b>Kementerian Pekerjaan Umum</b>	<b>2.710.86</b>	<b>1.556.72</b>	<b>149.04</b>	<b>3572.46</b>
Program Infrastruktur Konektivitas	890.86	307.79		
Program Ketahanan Sumber Daya Air	1.419.37	1.024.22		3572.46
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	400.63	224.71	149.04	
<b>Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</b>			<b>0.63</b>	<b>0.32</b>
Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika			0.63	0.32
<b>Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia</b>	<b>0.07</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>
Program Penyiaran Publik	0.07	0.05	0.05	0.05
<b>Total Sumsel</b>	<b>3.253.00</b>	<b>1.919.39</b>	<b>176.37</b>	<b>4.495.58</b>

Sumber: sintesa.kemenkeu.go.id

layak dengan beberapa outputnya terkait pengelolaan air limbah dan persampahan.

*Climate Budget Tagging* ini sudah sesuai dengan Buku Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim yang disusun Badan Kebijakan Fiskal (BKF), yaitu output sebagai basis penandaan anggaran. Namun pada tahun 2023, berdasarkan data dari *sharepoint* Direktorat Pelaksanaan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, maupun dari data tematik perubahan iklim di aplikasi sintesa, tidak terdapat alokasi untuk beberapa output yang seharusnya masuk dalam *tagging* perubahan iklim sebagaimana pedoman penandaan anggaran. Namun apabila data ditarik menyeluruh, terdapat alokasi untuk output-output tersebut. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat konsistensi dalam penandaan anggaran pada saat proses penganggaran sehingga penurunan yang sangat drastis pada alokasi anggaran perubahan iklim di tahun 2023 dimungkinkan terjadi karena hal ini. Selain itu ditemukan juga bahwa beberapa output yang tertagging pada tahun 2021 dan 2022 namun tidak tertagging pada tahun 2023 dan 2024.

Selanjutnya kami mencoba menarik data gabungan antara KL dan TKD dari data inquiry belanja di aplikasi sintesa tahun 2014 s.d 2024 untuk mendapatkan series yang lebih panjang. Data didapatkan dengan mengecualikan anggaran pada program/kegiatan/output pada kementerian teknis terkait (Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK) yang merupakan bagian dari dukungan manajemen/dukungan internal/layanan perkantoran, sedangkan untuk data TKD dilakukan filter khusus output 'pertanian' dan 'lingkungan hidup dan kehutanan'. Dengan demikian diharapkan data yang dihasilkan lebih relevan untuk dilakukan analisis.

Adapun kegiatan pada Kementan antara lain pengelolaan air irigasi untuk pertanian, perlindungan hortikultura, penguatan perlindungan perkebunan, peningkatan produksi pakan ternak dengan output berupa prasarana bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup serta sarana pengembangan kawasan. Pagu terbesar berada pada kegiatan pengelolaan air irigasi untuk pertanian.

Alokasi anggaran bidang pertanian di Sumsel dalam kurun waktu 10 terakhir secara rata-rata kurang dari 5% dari total pagu belanja pemerintah di Sumsel secara keseluruhan. Sementara alokasi pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan hanya sekitar 1% dengan realisasi anggaran rata-rata 90%.

**Grafik 4.7. Luas Panen dan Produksi Padi Sumsel (ribu)**

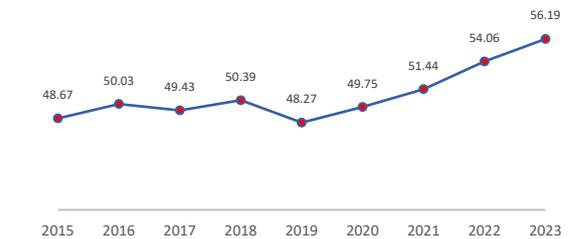


sumber: BPS Sumsel

Grafik 4.7. menggambarkan produksi padi Sumsel dan luas panen padi di Sumsel dalam kurun waktu 2015-2023. Terlihat kesamaan pola yang menggambarkan bahwa salah satu faktor/penyebab penurunan produksi padi adalah berkurangnya luas lahan panen. Hal ini dapat disebabkan beberapa hal antara lain alih fungsi lahan yang sebelumnya digunakan untuk menanam padi namun dialihfungsikan

menjadi lahan perkebunan, permukiman, industri, atau infrastruktur lainnya. Faktor penyebab lainnya adalah gangguan iklim dan bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau serangan hama dan penyakit tanaman.

**Grafik 4.8. Produktivitas Padi Sumsel (juta)**

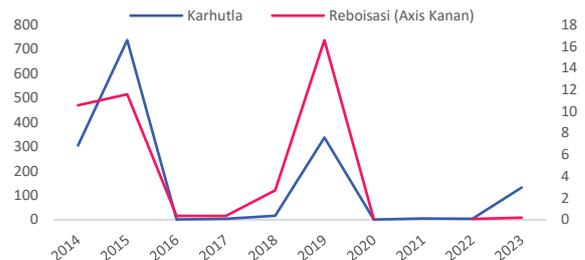


sumber: BPS Sumsel

Hal yang kemudian menjadi menarik adalah bahwa terdapat pola yang berbeda dalam hal produktivitas padi. Berdasarkan data dari BPS, produktivitas padi mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2015-2019, namun sejak 2020 menunjukkan tren peningkatan. Tren peningkatan dalam produktivitas padi ini dapat disebabkan berbagai factor antara lain peningkatan teknologi pertanian seperti adanya sistem irigasi dan pengelolaannya yang lebih baik, alat mesin pertanian (alsintan) modern, penggunaan varietas padi unggul yang lebih tahan penyakit/hama/kondisi cuaca ekstrem maupun penggunaan pupuk yang lebih efektif. Dari sini tergambar peranan belanja pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus mendukung sektor pertanian dengan berbagai kegiatan sebagaimana uraian sebelumnya sangatlah relevan.

Adapun kegiatan pada KLHK yang tertagging perubahan iklim di antaranya adalah kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan, serta penatagunaan kawasan hutan dengan output antara lain lahan gambut yang direstorasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan termasuk pengadaan sarpras pengendalian karhutla, serta rehabilitasi hutan dan lahan.

**Grafik 4.9. Luas Karhutla dan Reboisasi**



sumber: BPS Sumsel

Dari grafik luas karhutla dan luas reboisasi yang polanya serupa mengindikasikan dinamika antara degradasi lingkungan dan upaya pemulihannya. Karhutla terluas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi pada tahun 2015. Bencana kebakaran ini menyebabkan kerugian yang sangat besar. Berdasarkan kajian World Bank tahun 2016, kerugian total diperkirakan sekitar 3.919 juta dollar, diantaranya sebesar 1.205 juta dollar adalah kerugian pada aspek lingkungan. Emisi yang dihasilkan dari karhutla di Sumsel tahun 2015 diperkirakan mencapai 93% total emisi dari sektor lahan selama 4 tahun (2010-2014).

Kegiatan reboisasi pun dilakukan untuk merespon karhutla yang terjadi untuk memulihkan lahan yang terbakar dan mengembalikan fungsi ekosistem yang hilang. Pola pada grafik

tersebut juga mengindikasikan bahwa hutan dan lahan yang terbakar direboisasi secara rutin sehingga kejadian karhutla yang berulang juga harus diimbangi dengan reboisasi secara berkelanjutan. Hal ini menjadi tantangan karena walaupun reboisasi dilakukan, pemulihan ekosistem membutuhkan waktu yang lama. Selain itu kejadian karhutla Sumsel yang terus berulang juga mengindikasikan belum optimalnya pengendalian karhutla.

**Tabel 4.2. Korelasi Belanja Tematik Perubahan Iklim dengan PDRB Sektor Pertanian, Prodktivitas Padi, dan indeks ketahanan Pangan**

	PDRB	Prod. Padi	IKP	RAIKLIM
PDRB	1	0,356	0,096	0,412
Prod. Padi	0,356	1	0,240	0,075
IKP	0,096	0,240	1	0,075
RAIKLIM	0,412	0,075	0,075	1

sumber: BPS, KLHK, DJPb (data diolah)

Selanjutnya dengan ketersediaan data yang terbatas, seperti belum tersedianya tagging perubahan iklim pada DAK dan juga data tahunan yang minim, kami mencoba untuk melihat hubungan/korelasi belanja DAK Fisik maupun Non Fisik yang terkait perubahan iklim (bidang/subbidang irigasi, jalan, pertanian, pariwisata, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan) dengan distribusi PDRB sektor pertanian, produktivitas padi dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Data realisasi DAK diambil dari OMSPAN-TKD tahun 2020 s.d. 2023. Hasil yang didapat adalah adanya hubungan yang positif dan *moderate* antara realisasi anggaran perubahan iklim dengan distribusi PDRB sektor pertanian, sedangkan korelasinya ke produktivitas padi positif namun lemah, dan hubungan ke IKP yang sangat lemah.

Selanjutnya berdasarkan regresi linear sederhana dengan model fixed effect pada variabel bebas realisasi anggaran perubahan iklim (RAIKLIM) dan variabel terikat PDRB sektor pertanian, didapatkan hasil bahwa meskipun variabel RAIKLIM tidak signifikan secara individual, namun model secara keseluruhan sangat kuat dalam menjelaskan variabilitas PDRB sektor pertanian karena efek tetap dari cross-sections (daerah kab/kota) yang signifikan. Ini menandakan bahwa ada perbedaan besar antar daerah kab/kota yang tidak dapat dijelaskan hanya oleh realisasi anggaran perubahan iklim saja, tetapi tetap penting dalam analisis.

### E. Intervensi Pemerintah Melalui Kebijakan Non Belanja

Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam menangani berbagai tantangan terkait perubahan iklim. Terdapat dua prioritas nasional pada tahun 2024 yang terkait dengan perubahan iklim yaitu ‘memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan’ (PN1) serta ‘membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim’ (PN6). Salah satu sasaran PN 1 adalah terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan dan hal ini sejalan dengan sasaran pembangunan daerah Sumsel yang tercantum dalam RKPd Tahun 2024 yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA) serta meningkatnya perekonomian sektor unggulan dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan). Sedangkan sasaran dari indikator PN 6 adalah meningkatnya Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup; berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB; serta meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Peran Pemerintah Daerah Sumsel dalam pengendalian perubahan iklim antara lain dimulai dari penetapan target dan rencana aksi serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Pemda Prov. Sumsel telah berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Pemprov Sumsel juga telah melakukan inventarisasi GRK melalui Sistem Inventarisasi GRK Nasional Sederhana Mudah Akurat Ringkas, dan Transparan (SIGN-SMART) sejak tahun 2018 dan telah mendapatkan penghargaan dan Menteri LHK RI atas pelaporan terbaik.

Berdasarkan RAD GRK Sumsel, aksi mitigasi prioritas Prov. Sumsel antara lain adalah rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan teknis budidaya *agroforestry* dan konservasi tanah dan air, pencegahan dan pengendalian karhutla serta peningkatan penyerapan cadangan karbon. Sedangkan pada bidang pertanian-peternakan, salah satu aksi mitigasi adalah penggunaan pupuk organik dan *system intensification rice*. Metode ini diterapkan dengan tujuan meningkatkan produktivitas padi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keberlanjutan lingkungan melalui pemilihan varietas unggul yang tahan hama maupun kondisi iklim, pengelolaan nutrisi tanaman dengan mengutamakan penggunaan pupuk organik, pengelolaan air dan lahan secara efisien.

Selain perencanaan dan pendanaan yang baik, perlu dilakukan penguatan dengan intervensi kegiatan yang berbasis ekonomi hijau, tidak lagi *business as usual* sehingga dapat mencegah potensi kerugian ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dari perubahan iklim. Untuk itu Pemda Prov. Sumsel juga sudah menyusun Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan Tahun 2017-2030 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumsel No.21 Tahun 2017. Prinsipnya adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan serta lahan gambut.

Visi pertumbuhan ekonomi hijau Prov. Sumsel adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; pertumbuhan yang inklusif dan merata; ketahanan sosial,ekonomi, dan lingkungan; ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan; serta penurunan emisi GRK. Adapun strategi untuk mencapainya adalah melalui alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan dengan menyelaraskan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan; peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (*livelihood capital*); peningkatan produktivitas dan diversifikasi; perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil; peningkatan konektivitas dan skala ekonomi; restorasi lahan dan hutan yang mengalami degradasi fungsi; dan insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan.

Dengan visi dan misi tersebut tergambar dengan jelas kebijakan Pemda Sumsel dalam menghadapi perubahan iklim. Terlebih lagi dengan dilakukannya intervensi-intervensi terkait, antara lain kebijakan alokasi lahan untuk masyarakat miskin melalui reforma agraria, kemitraan dalam zona tanaman industri di dalam konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), kebijakan restorasi dan reklamasi dalam rangka tataguna lahan berkelanjutan, termasuk pemberian sosialisasi kepada masyarakat contohnya terkait membuka lahan tanpa membakar, dll.

Untuk dapat melaksanakan semua misi tersebut tentunya membutuhkan pendanaan yang besar, terlebih untuk memulihkan lingkungan yang terlanjur rusak. Berdasarkan data dari aplikasi sintesa, alokasi anggaran pada satker KLHK (BA 029) wilayah Sumsel hanya pada kisaran di bawah 6% dari total pagu Sumsel. Untuk itu pendanaan memang membutuhkan kontribusi dari seluruh pihak terkait. Sumber pendanaan selain dari DIPA pada K/L, juga berasal dari DAK, Dana Desa, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, hibah, dan kerjasama dengan pihak swasta.

Dengan implementasi perdagangan karbon melalui Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional, Sumsel juga berpeluang mendapatkan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (*Forestry and Other Land Use/FOLU*) dengan menekan kejadian karhutla (terutama di lahan gambut) untuk penguatan pembiayaan penanganan karhutla.

Kerjasama penanganan karhutla juga dilakukan dengan berbagai Lembaga/institusi, termasuk pihak swasta. Salah satunya adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) BMKG sebagai upaya mencegah dan mengendalikan Karhutla terutama pada saat memasuki puncak musim kering dengan tujuan utama melakukan pembasahan lahan gambut melalui tujuan utama melakukan pembasahan lahan gambut melalui air hujan. OMC dilakukan dengan penyemaian awan di wilayah lahan gambut dengan menggunakan bahan NaCl setelah sebelumnya dilakukan analisis kondisi cuaca di hari penyemaian sebagai modal dalam merencanakan sasaran penerbangan penyemaian awan untuk meningkatkan intensitas hujan. OMC wilayah Sumsel dilakukan Bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Wilayah Sumatera, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Lanud Sri Mulyono Herlambang, serta pihak swasta terkait.

Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan penganggulangan karhutla. Kerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan patroli, terutama selama musim kemarau untuk mencegah dan menindak pelaku karhutla sangat penting. Kepolisian Daerah Sumsel turut terlibat dalam penanggulangan karhutla secara langsung ke lokasi kejadian dengan pendanaan dari Operasional Kepolisian Direktif Kapolda.

Selain kerjasama antar instansi pemerintah/KL, Sumsel juga menjalin kerjasama dengan pihak asing. Sumsel menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi lokus *Project Sustainable Landscape for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Live)* yang dibiayai Pemerintah Kanada dalam kurun waktu 2021-2026 melalui *International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF)*. Proyek ini dirancang untuk mendukung upaya pemerintah mencapai Prioritas Nasional melalui penguatan penyediaan akses dan mutu suplai pangan sekaligus upaya pemerintah dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan juga pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan peraturan yang dihasilkan pemerintah daerah. Pelaksanaan Land4Live (Lahan untuk Kehidupan) memiliki fokus utama mengurangi deforestasi, meningkatkan kondisi lahan, serta meningkatkan penyerapan karbon di tiga provinsi di Indonesia: Sumsel, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Di Sumsel difokuskan pada dua daerah, yakni Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pada sektor

ekonomi dan iklim, mata pencaharian dan ketahanan pangan, terutama untuk para petani dan kaum rentan dan juga pada sektor usaha kecil, khususnya pada kaum perempuan. Proyek ini juga secara langsung menargetkan reklamasi lahan gambut dan mengurangi deforestasi sekaligus mengurangi kerentanan akibat perubahan iklim. Terdapat beberapa kegiatan dalam rangka revitalisasi ekonomi yang dilaksanakan di areal lahan gambut antara lain budidaya burung walet, ikan, kerbau rawa, lebah, tanaman semusim, industri pengolahan, wisata, peternakan unggas dan kegiatan lainnya.

Dari diskusi yang dilakukan Kanwil DJPb Sumsel dengan Bappeda Prov. Sumsel, sudah banyak produk kebijakan dalam menghadapi perubahan iklim, di antaranya Perda Prov. Sumsel No.8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Ekosistem Gambut, Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Berbagai kebijakan ini berkontribusi dalam peningkatan persentase penurunan emisi GRK. Indeks Kesehatan Lingkungan Hidup (IKLH) juga terdapat tren peningkatan sebagaimana tergambar pada grafik 4.10 dan 4.11.



sumber: SIS KLHK

# BAB V: KESIMPULAN & REKOMENDASI

---



Kesimpulan	Rekomendasi
<b>Ekonomi dan Kesejahteraan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekonomi Sumsel pada triwulan II 2024 menunjukkan pertumbuhan yang relatif kuat, meskipun terdapat beberapa tantangan, terutama dalam sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami perlambatan;</li> <li>2. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi yang masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah;</li> <li>3. Sektor-sektor lain seperti industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan memberikan kontribusi signifikan dan perlu terus dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu.</li> <li>4. Dari sisi kesejahteraan, meskipun terdapat penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kedalaman kemiskinan dan ketimpangan menunjukkan perlunya intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi ketidakmerataan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Diversifikasi Ekonomi:</b> Mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan penggalian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, terutama di sektor industri pengolahan dan pertanian yang memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut. Dukungan kebijakan dan insentif investasi perlu difokuskan pada pengembangan sektor-sektor ini.</li> <li>2. <b>Peningkatan Daya Beli Masyarakat:</b> Melakukan program-program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan akses ke sumber daya keuangan. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga.</li> <li>3. <b>Pengurangan Ketimpangan:</b> Pemerintah perlu memperkuat program bantuan sosial yang lebih terfokus pada kelompok yang paling membutuhkan dan memperbaiki distribusi pendapatan agar penurunan kemiskinan dapat diikuti dengan perbaikan dalam kedalaman kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.</li> <li>4. <b>Penguatan Infrastruktur dan Proyek Strategis:</b> Melanjutkan dan mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan infrastruktur transportasi dan irigasi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal serta meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi.</li> </ol>
<b>Fiskal Regional</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja APBN wilayah Sumsel tumbuh kuat dan solid dengan pendapatan dan belanja negara yang terus mencatatkan pertumbuhan positif, meskipun kendala seperti blokir anggaran dan proses lelang yang panjang pada penuntasan PSN, serta terlambatnya terbit petunjuk pengelolaan DAK Fisik 2024 menjadi faktor penahan keoptimalan capaian realisasi belanja negara di Sumsel.</li> <li>2. Selain itu, meningkatnya aktivitas transfer antar wilayah produk CPO dan turunannya dipengaruhi banyak perusahaan di Sumsel merupakan anak perusahaan dari induk perusahaan di daerah lain, mengakibatkan aktivitas ekspor komoditas ini berkontraksi dan berimplikasi pada masih rendahnya capaian penerimaan bea keluar;</li> <li>3. Kinerja APBD Sumsel tumbuh positif sampai dengan triwulan II 2024 hal tersebut diindikasikan oleh adanya pembangunan infrastruktur dan aktifitas ekonomi di wilayah Sumsel. Pendapatan daerah didorong oleh meningkatnya alokasi penyaluran TKD dan beberapa event kepariwisataan di Sumsel. Belanja daerah didorong oleh pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan air, kenaikan gaji ASN, pelaksanaan pemilu dan pilkada dan terkait penanganan bencana banjir di beberapa wilayah di Sumsel;</li> <li>4. Pendapatan transfer mendominasi pendapatan daerah di pemda Sumsel. Meskipun realisasi pendapatan daerah tumbuh untuk triwulan II 2024, pendapatan asli daerah di daerah Sumsel masih diharapkan dapat ditingkatkan. Berdasarkan indeks kemandirian fiskal 18 pemda di Sumsel, hanya pemda kota Palembang yang berstatus "Menuju Kemandirian". Hal tersebut dikarenakan kota Palembang merupakan pusat perdagangan;</li> <li>5. Belanja daerah masih dapat di dorong sampai dengan akhir tahun anggaran. Kinerja Belanja Daerah di Sumsel di Triwulan II 2024 menunjukkan pertumbuhan positif, namun hal tersebut masih dapat ditingkatkan s.d akhir tahun anggaran nanti. Dapat dilihat dari peningkatan neraca di utang jangka pendek yaitu pos utang pihak ketiga s.d triwulan II 2024 yang meningkat dibandingkan dengan tahun lalu diindikasikan bahwa adanya utang belanja yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengoptimalkan kinerja APBN di Sumsel, diperlukan <b>membentuk satu tim khusus yang melibatkan Kementerian PUPR, LKPP, dan Kementerian Keuangan dalam rangka percepatan lelang dan pelaksanaan anggaran PSN</b> di Sumsel melalui koordinasi intensif dan monitoring progress secara berkala. Selanjutnya, diperlukan mitigasi potensi gagal salur DAK Fisik melalui penguatan koordinasi antara KPPN, pemda, APIP untuk akselerasi pemenuhan syarat dan penyaluran DAK Fisik. Terakhir, diperlukan kebijakan untuk mendorong perusahaan melakukan ekspor langsung dari Sumsel melalui insentif fiskal atau pengurangan biaya logistik dengan memanfaatkan pelabuhan lokal serta penguatan infrastruktur dan fasilitas ekspor CPO dan turunannya di Sumsel;</li> <li>2. <b>Memperkuat koordinasi antar pemda pemprov dan pemkot/pemkab di Sumsel.</b> Pemprov selaku wakil pemerintah pusat didaerah dapat mengkoordinasi kinerja fiskal pemkot/pemkab di Sumsel. Koordinasi dijalin tidak hanya untuk pengharmonisasian belanja daerah namun dapat juga untuk menggali potensi pendapatan daerah. Event kepariwisataan di Sumsel diharapkan tidak hanya dilaksanakan pada beberapa wilayah di Sumsel, namun dapat melibatkan potensi wisata di daerah Sumsel lainnya sehingga memberikan dampak kepada PAD;</li> <li>3. <b>Pemda berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait dengan penyaluran TKD.</b> TKD merupakan salah satu sumber pendapatan yang diandalkan oleh Pemda di Sumsel. Pemda diharapkan dapat berkoordinasi secara rutin dengan DJPK dan KPPN agar tidak mengalami keterlambatan dalam penyaluran TKD. Sehingga pemda tidak mengalami kesulitan likuiditas saat melakukan pembayaran belanja dan memberikan dampak positif pertumbuhan ekonomi daerah.</li> </ol>

Kesimpulan	Rekomendasi
<b>Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja K/L RO Harmonis yang mendukung DAK Fisik di wilayah Sumsel hingga akhir Juni 2024 secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh perkembangan realisasi, baik anggaran maupun capaian output, yang masih tetap <i>on track</i>.</li> <li>2. Namun masih terdapat tantangan, terutama terkait regulasi yang terlambat, blokir anggaran, dan kendala teknis lainnya. Kendala tersebut menyebabkan realisasi anggaran dan capaian output di beberapa sektor masih rendah,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Percepatan Regulasi dan Koordinasi:</b> Pemerintah pusat perlu memastikan regulasi terkait penyaluran DAK Fisik diterbitkan lebih awal agar pemerintah daerah dapat memulai proses pengadaan dan pelaksanaan proyek lebih cepat. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga harus ditingkatkan, khususnya dalam hal pemahaman teknis dan administrasi;</li> <li>2. <b>Penyelesaian Blokir Anggaran:</b> Segera selesaikan permasalahan blokir anggaran yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan. Ini dapat dilakukan dengan mempercepat proses penyusunan dan pengesahan dokumen yang diperlukan;</li> <li>3. <b>Optimisasi Pengadaan dan Pembangunan Infrastruktur:</b> Perbaiki proses pengadaan dan penyelesaian masalah pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur agar tidak ada lagi keterlambatan yang signifikan. Pendekatan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan bisa menjadi solusi efektif;</li> <li>4. <b>Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan:</b> Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran dan capaian output, dengan fokus pada identifikasi masalah sedini mungkin untuk segera ditangani. Keterlibatan Unit in Charge (UIC) di tiap tahap akan sangat membantu dalam mencapai target yang telah ditetapkan;</li> <li>5. <b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah:</b> Pemda perlu diberikan pelatihan yang lebih intensif terkait penyusunan dokumen dan proses administrasi yang diperlukan untuk memaksimalkan pemanfaatan DAK Fisik. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka mampu memenuhi persyaratan teknis dan administrasi dengan lebih baik.</li> </ol>
<b>Perubahan Iklim dan Upaya Pemerintah</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dampak perubahan iklim sudah mulai dirasakan di Sumsel, yang ditandai dengan adanya bencana seperti meningkatnya suhu udara dan banjir;</li> <li>2. Sektor pertanian, sebagai tulang punggung ketahanan pangan di Sumsel, sangat rentan terhadap perubahan ini. Penurunan luas lahan panen dan produktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan iklim mengancam ketahanan pangan lokal dan nasional. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai intervensi, seperti reboisasi dan pengembangan teknologi pertanian, tantangan dalam pengendalian karhutla dan adaptasi terhadap perubahan iklim masih memerlukan perhatian serius.</li> <li>3. Dari sisi anggaran, terdapat inkonsistensi dalam penandaan anggaran perubahan iklim pada K/L. Sementara itu, di Pemerintah Daerah Sumsel belum memiliki tagging anggaran perubahan iklim.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Penguatan Infrastruktur Pertanian:</b> Pemerintah perlu terus mengembangkan dan memperkuat infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan teknologi pertanian modern, untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim</li> <li>2. <b>Pemulihan dan Perlindungan Lahan Gambut:</b> Upaya reboisasi dan perlindungan lahan gambut harus ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Penerapan teknologi baru seperti Operasi Modifikasi Cuaca dapat dijadikan prioritas untuk mengurangi risiko kebakaran hutan;</li> <li>3. <b>Pengembangan Kebijakan Ekonomi Hijau:</b> Pemerintah daerah perlu mendorong kebijakan ekonomi hijau yang berfokus pada penggunaan lahan yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui reforma agraria dan pengembangan sektor-sektor ramah lingkungan;</li> <li>4. <b>Peningkatan Kerjasama Multistakeholder:</b> Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus diperkuat, terutama dalam program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kolaborasi ini penting untuk memaksimalkan efektivitas intervensi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya;</li> <li>5. <b>Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Publik:</b> Edukasi dan pelatihan bagi petani dan masyarakat terkait praktik pertanian berkelanjutan serta penanggulangan karhutla perlu ditingkatkan. Hal ini akan membantu mengurangi risiko bencana dan mempromosikan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan iklim;</li> <li>6. <b>Optimalisasi Penggunaan Anggaran:</b> Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran perubahan iklim sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal. Pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal;</li> <li>7. <b>Perlu dilakukan sosialisasi/edukasi secara berkelanjutan</b> terkait penandaan anggaran perubahan iklim dan pedomannya kepada K/L maupun Pemda agar dapat diketahui besaran anggaran perubahan iklim yang akurat untuk kemudian dilakukan evaluasi kegiatan secara lebih tepat dan dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan kebijakan.</li> </ol>



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Provinsi Sumatera Selatan  
Jl. Kapten A. Rival No. 2, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I  
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30135  
Telp. (0711) 356534

 [djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/](http://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/)

 @DJPbSumsel

 @KanwilDJPbSumsel

 @KanwilDJPbSumsel

ISSN 3047-0994

